KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

VISI

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN."
(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

MISI

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

Salam #BersihMelayani

Pembaca Budiman, Majalah Ikhlas Beramal kembali kami hadirkan ke tangan pembaca. Di tahun 2016, IB hadir dalam periode 3 bulan sekali, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menemui pembaca setiap dua bulan sekali. Di edisi 97 tahun 2016, kami hadirkan tidak hanya suguhan tulisan-tulisan mendalam tentang sejumlah isu-isu yang dinilai kuat dan perlu didalami, namun di edisi perdana tahun ini, kami tampilkan sejumlah perubahan-perubahan penting dalam tata layout dan pemilihan tipografi untuk setiap judul-judul tulisan dengan huruf yang lebih tegas namun tetap "manis".

Bila menyimak setiap edisinya, kami berkomitmen menghadirkan yang terbaik bagi pembaca dengan sejumlah inovasi dalam gaya tulisan dan pemilihan judul yang berusaha keluar dari pakem formal dan kaku khas majalah dinas kementerian/lembaga. Tentu tidak mudah menegasikan persepsi dan stigma yang kadung melekat dalam sebuah majalah atau apapun medium publikasi institusi pemerintahan yang formalistik. Namun kami berupaya "keluar" dari stigma tersebut dengan mencoba menawarkan sesuatu yang lebih segar, ringan, dan sedikit berpuisi agar pembaca lebih rileks membaca jeroan majalah ini hingga halaman akhir, itu yang kami harapkan.

Sejumlah tulisan kami sajikan dengan karakter tulisan bergenre feature, yakni tulisan yang dikemas dengan gaya bertutur agar pembaca bisa menghayati tulisan tersebut. Mari kita simak tulisan "Peluh Penghulu di Pulau Terluar" dan sejumlah tulisan lainnya, karakter penulisan ini selanjutnya akan kami gunakan. Intinya, kami ingin yang berat dibaca menjadi asyik dibaca.

Edisi perdana tahun 2016, kami menggali dan menghadirkan laporan penyelenggaraan Rapart Kerja Nasional Kementerian Agama sebagai Laporan Utama edisi ini. Pemilihan tema ini tentu memiliki alasan tersendiri, karena bagaimanapun momen ritual tahunan ini dengan seluruh output nya menjadi tonggak penting perjalanan institusi ini selanjutnya, minimal dalam kurun satu tahun, dan ditambahkan dengan hasil wawancara mendalam tentang rakernas bersama Sekretaris Jenderal Kemenag. Selain rakernas, pada rubrik laput ini, momentum kunjungan Grand Syekh Al Azhar juga kami tempatkan dalam laporan utama selain tulisan-tulisan tentang komitmen DWP Kemenag dalam kampanye Perempuan Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya, untuk melengkapi informasi pembaca, sejumlah tulisan mendalam tersaji dalam Fokus Berita yang mengupas peran Kemenag dalam penanganan eks Gafatar pasca evakuasi, penyelenggaraan Konferensi OKI. Tulisan lain kami tampilkan dalam Ragam Berita, Kebijakan, Warta Daerah, Warta Internasional, dan kisah suka duka penghulu dalam menjalankan tugas pengabdinnya di pulau-pulau terluar negeri ini, pembaca dapat simak dalam rubrik Sisi Lain selain perjuangan sosok Waskito Jati yang berhasil meraih beasiswa di Harvard University. Dua tulisan tersebut kami harapkan jadi inspirasi bagi aparatur Kemenag dan generasi muda lainnya, agar jangan lelah dan mengeluh dalam mengabdi dan berjuang meraih mimpi.

Kami berharap seluruh materi yang tersaji dalam majalah ini dapat menjadi referensi informasi dan memperkaya pengetahuan pembaca tentang Kementerian Agama.

Selamat membaca

Pengarah | Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si (Sekjen)

Penanggung Jawab | Dr. H. Rudi Subiyantoro, M.Pd (Kepala Pinmas)

Redaktur | Rosidin, S.Si, M.M. (Kabid Humas)

Penyunting/Editor | Achmad Gufron, S.Kom, M.M. (Kabid TIK), Sulistyowati,SH.M.Pd. (Kabid Data), Moh. Khoeron Durori, S.Ag., MA (Kasubbid LIP), Iwan Supriadi, S.Sos. (Kasubbid HKN), Dodo Murtado, S.Ag. (Bidang Humas), Syaiful Huda, S.Sos. (Bidang Humas)

Fotografer | Chairul Wahyudi, SE., M.Si. (Bidang Humas), Boy Azhar, S.Kom. (Bidang Humas), Romadanyl, S.Sos. (Bidang Humas)

Sekretariat | Thobib Al Ashyar (Ditjen Bimas Islam), Akmal Salim Ruhana, SH.I (Balitbang), Muhtadin (Ditjen Pendis), Nurul Badruttamam (Itjen), Tetra Adi Siswanto, MM (Ditjen Bimas Kristen), Yohanes Dwimbo, S.Sos, M.Si. (Ditjen B. Katolik), Drs. Murni D. Djinu (Ditjen Bimas Hindu), Saiman, SS, M.Si, (Ditjen Bimas Buddha), Nur Endrayanto, S.Sos. (Kasubbag TU Pinmas), Drs. Taofik Hidayat, M.Si. (Bidang Data), Drs. Sutadji (Bidang Data), M. Sidik Sisdiyanto,S.Ag. (Bidang TIK), Ambar Astuti, SH. S.IPI. (Bidang Humas), Syamsudin, SE., M.Si. (Bidang Humas), Tri Pamuji, SE. (Bidang Humas), Didah Kholidah, S.Sos. (Bidang Data), Suwarni (Bidang Humas), Supriyatini, A.Md.(TU Pinmas), Ngadiningsih (TU Pinmas), Ruwaidah R, S.Sos. (TU Pinmas)

Alamat Redaksi/Tata Usaha | Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat Telp/Faks: 021-3812101

Alamat Web/E-mail | www.kemenag.go.id, redaksi_ib@kemenag.go.id

SURAT PEMBACA

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sebagai ASN Kementerian Agama, penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Kemenag 2016 saya menggarisbawahi sejumlah arahan bapak Menteri Agama yang mendorong seluruh program yang dirancang harus mempunyai dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat.

Poin penting ini tentu senapas dengan apa yang digariskan Presiden Jokowi agar dalam penyusunan program harus tegas dan fokus pada hasil dengan tidak menggunakan pilihan bahasa yang absurd dan tidak jelas output-nya.

Selain itu, program dan kegiatan pengulangan yang dilaksanakan setiap tahunnya yang sudah seperti rutinitas tanpa inovasi dan kreasi baru dengan biaya besar namun tidak berdampak seperti diharapkan Presiden harus segera dievaluasi. At least, pilihan untuk bersih dan melayani menjadi keniscayaan bagi kita semua, dan itu yang diharapkan semua.

Wassalam.....

Roni Wibawa
Jawa Barat

Salam hormat,

Gencarnya kampanye perilaku dan komunitas Lesbias, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kebebasan menjadi keprihatinan tersendiri.

Pernyataan tegas pemerintah melalui Kementerian Agama yang menolak pelayanan pernikahan sejenis dengan dalih kebebasan patut diapresiasi, bukan hanya tidak sejalan ketentuan undang-undang perkawinan tapi sangat tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang bangsa ini meyakininya.

Terimakasih

Nova Anggraini
Sulut

Salam hormat,

Saya mengapresiasi langkah tepat Kementerian Agama yang menindak tegas pelaku dan biro keberangkatan perjalanan haji dan umrah yang telah melakukan tindak penipuan terhadap jamaah yang ingin menunaikan ibadah umrah, dengan melaporkan penyelenggara umrah tersebut ke aparat hukum.

Tindakan tegas ini tentu menjawab harapan masyarakat yang ingin menunaikan ibadahnya dengan aman dan terlebih sering kita dengar dan saksikan pemberitaan adanya jamaah umroh yang ditelantarkan di Bandara atau dana yang sudah disetor dibawa kabur.

Semoga, Kementerian Agama terus konsisten menindak tegas dan memberikan sanksi kepada biro perjanalan umroh yang melakukan penipuan, demi memberikan kebaikan kepada masyarakat luas yang ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci.

Supardi
Sumatera Utara

Redaksi;

Terimakasih atas apresiasinya, untuk selanjutnya dihimbau kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah umrah untuk memastikan 5 hal; Pastikan Travelnya, Pastikan Jadwalnya, Pastikan Terbangnya, Pastikan Hotelnya, Pastikan Visanya

ikhlas Beramal menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama. Setiap Tulisan atau artikel harap disertai identitas lengkap (nama, alamat, nomor telepon/ponsel/faksimili), foto penulis, dan foto-foto penunjang tulisan.

Naskah yang dimuat akan mendapat imbalan. Setiap naskah yang sudah dikirim ke redaksi tidak dikembalikan.

Naskah dapat dikirim melalui e-mail atau surat elektronik redaksi Majalah ikhlas Beramal:

redaksi_ib@kemenag.go.id

DAFTAR ISI

EDISI-97
JAN-MAR 2016

12 **LAPORAN UTAMA**
SEJUMLAH CATATAN PENTING MENJADI OUTPUT RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) KEMENTERIAN AGAMA YANG DIGELAR UNTUK TIDAK HANYA MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2015.

18 PENGAWASAN
MENGEJAR TARGET KINERJA 75 PERSEN

22 REFORMASI BIROKRASI
PGPS NO, SMART ASN YES

24 **WAWANCARA**
Dengan pola baru dalam perumusan hasil rakernas yang lebih terukur dan jelas, dinilai menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang ber-nas dan fokus, tidak abstrak dan konseptual.

40 **FOKUS BERITA**
MERANGKUL YANG MENYIMPANG
DAN RENOVASI MASJID PUN TETAP JALAN
MASJID ISTIQLAL, HARUS JADI CONTOH
MENERUSKAN PERJUANGAN YANG BELUM SELESAI

50 **RAGAM BERITA**
PEMBASMI BAKTERI SAPI DARI MTSN 1 MALANG
IKHTIAR MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN
MENGOPTIMALKAN KINERJA PETUGAS DENGAN SISKOPAHAT
MAN 13 JAKARTA, SIAP BERSAING
LAPORAN PEMANTAUAN GMT DI KEPULAUAN SERIBU

72 SISI LAIN
PELUH PENGHULU DI PULAU TERLUAR INDONESIA

58 **KEBIJAKAN**
KINI PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN HAJI SEMAKIN MUDAH
KEHADIRAN BIMAS KATOLIK, HARUS DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH UMAT
2016, PT HINDU TARGETKAN AKREDITASI B
SIMDIKLAT HARUS MUDAH DIAKSES MASYARAKAT

62 **KOLOM**
Hasil Rakernas untuk Kinerja Bernas

66 **WARTA INTERNASIONAL**

68 **WARTA DAERAH**
SABDA, ROLE MODEL KERUKUNAN DI JAKARTA
GORONTALO DIUSULKAN JADI PERCONTOHAN

71 **DHARMA WANITA**
PEMBINA DWP, JANGAN BOSAN LAKUKAN
PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL

76 **LEBIH DEKAT**

WASKITO JATI, ALUMNI MADRASAH PERAIH BEASISWA DI HARVARD UNIVERSITY

78 **RESENSI**
Memahami Falsafah Negara dan Bangsa
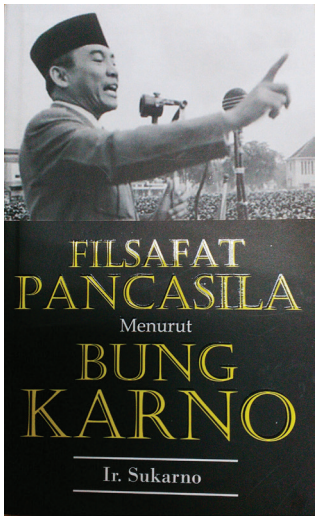

HARMONI YANG BERSAHAJA

HARI RAYA NYEPI UMAT HINDU DI BALI TAHUN 2016 DIRAYAKAN BERBARENGAN DENGAN TERJADINYA FENOMENA ALAM GERHANA MATAHARI TOTAL (GMT) DI MANA UMAT ISLAM MELAKSANAKAN SHALAT KHUSUF (GERHANA). UMAT HINDU DAN ISLAM TAMPAK BERSAHAJA SALING MENGHORMATI DENGAN KEYAKINANNYA MASING-MASING. MEREKA SALING MENJAGA DAN MENGHARGAI DALAM PERBEDAAN TERSEBUT. SEBUAH HARMONI YANG INDAH DAN BERSAHAJA.

Foto: Sania (Pranata Humas) dan Komang Gede Tri Sutrisna (Staff Bidang Urusan Agama Hindu). Teks: Dodo Murtado

CHARACTER
TOYS
Rp18.000

SELAKSA KATA
"Berdampingan"

Hotel Bali Mulia

GULA-GULA MAHATMA GANDHI

Gula-gula adalah salah satu jenis makanan enak yang sangat digemari anak-anak. Saking gemarnya, tidak jarang anak-anak sampai sakit karena tingkat konsumsinya yang sangat banyak. Hal itu juga yang menjadi kekhawatiran seorang janda satu orang anak sebagaimana dikisahkan Mahatma Karamchand Gandhi dalam salah satu bagian bukunya yang berjudul An Autobiography OR the Story of My Experiment with Truth.

Dikisahkan, Mahatma K. Gandhi memiliki tetangga seorang janda dengan satu orang anak yang berumur 10 tahun. Anak janda tersebut agak bandel, terlihat dari sikapnya yang suka tidak patuh dengan nasihat ibunya. Salah satu kebiasan jelek anak ini adalah makan gula-gula. Hal itu mengkhawatirkan sang bunda karena takut anaknya sakit disebabkan terlalu banyak makan gula-gula.

Tahu kalau Mahatma K. Gandhi suka memberikan saran danpendapat, janda itu pergi ke rumahnya untuk meminta nasihat. "Mahatma tolong nasihati anak saya. Saya sudah larang jangan terlaluseringdanbanyak makana gula-gula, tetapi diatidakmaumengindahkannya. Saya sangat khawatirituakanmengganggukesehatannya," katanya.

"Tolong kamu datang dua minggu lagi," jawab Mahatma K. Gandhi ataspermohonan tetangganya.

Ibu itu pulang untuk kembali lagi dua minggu mendatang. Saat tiba waktunya, dia kembali ke rumah Mahatma K Gandhi untuk menyampaikan permintaan yang sama agar tokoh India ini mau menasihati anaknya untuk tidak terlalu sering makan gula-gula.

Sesuai janjinya, kali ini Mahatma K. Gandhi menerima permintaan sang janda. Kepada anaknya, Mahatma K. Gandhi berkata, "Nak, janganlahkamuterlalu sering makan gula-gula, karena itu tidak bagus untuk kesehatan kamu dan kamu bisa sakit. Ikutilah nasihat dan pesan ibumu."

Nasihatituterdengarsangatsederhana, tidak lebih dari apa yang biasa dinasihatkan sang ibu kepada anaknya. Namun, meski sederhana, nasihat Mahatma K. Gandhi dipatuhi sang anak, diaberhenti makan gula-gula.

Penasaran, selang beberapa hari kemudian, sang ibu kembali ke rumah Mahatma K. Gandhi dan bertanya. "Wahai Mahatma, anak saya sekarang sudah berhenti makan gula-gula. Hanya, mengapa kamu menyuruh saya untuk menunggu dan datang lagi dua minggu, baru kemudian kamu menasihati anak saya?"

Kata Mahatma Gandhi, "Mohon maaf, saya meminta ibu datang lagi setelah dua minggu, karena dua minggu yang lalu, saya juga masih makan gula-gula."

(disadur oleh Moh Khoeron dari kisah salah satu pimpinan KPK Laode Moh. Syarif saat memberikan sambutan pada kegiatan Saya Perempuan Anti Korupsi di kantor Itjen Kementerian Agama, 1 Maret 2016)

EDITORIAL

#BersihMelayani

Tema Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2016 kata kuncinya adalah bersih melayani. Bersih melayani sudah kita ikrarkan bersama. Setiap aparatur Kemenag harus berusaha betul dan harus mampu mewujudkan dalam tindakan ucapan dan sejak dalam pikiran. Menteri Agama setidaknya menggariskan dua hal agar bersih itu bisa diwujudkan.

Pertama, secara fisik masing-masing kita harus bersih. Jangan ada lagi ASN Kemenag yang tidak nyaman di pandang, lusuh, kotor penampilannya. Tidak perlu harus berpakaian mahal, tapi secara fisik harus dibuktikan di kantor dan ruang kerja kita yang tertata dan bersih. "Tunjukkan bahwa kita bersih setidaknya secara fisik, secara kasat mata. Kedua, tidak kalah pentingnya adalah nurani dan pikiran yang sejak awal harus bersih karena akan tercermin pada prilaku dan dalam makna luas, setelah itu baru melayani. Dengan bersih itulah, maka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat kehormatan untuk menjadi penyelenggara negara, lalu kemudian kita melaksanakan fungsi kita melayani.

Inti harus bersih dan melayani bagi aparatur Kemenag juga menjadi inti (*core*) pidato Menteri Agama dalam Malam Tasyakuran Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-70 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Kuningan Jakarta, Jumat 22 Januari 2016 lalu. Menag menginstruksikan jajarannya agar bekerja lebih bersih dan menyajikan pelayanan prima (*service excellent*) bagi masyarakat. Cara mensyukuri atas seluruh rentang panjang perjalanan dan peran Kemenag di usia 70 tahun ini adalah menjadikan kementerian ini sebagai pelopor institusi pemerintah yang bersih dan melayani.

"Bersih dan melayani" yang menjadi kata kunci tema peringatan ulang tahun Kementerian Agama dan rakernas, dipilih untuk memacu kinerja aparatur Kemenag agar lebih optimal dan akuntabel serta berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan publik. Menag meminta jajarannya agar lebih nyata bekerja dengan berlandaskan 5 Nilai Budaya Kerja—integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan.

Bagi Menag, masa sosialisasi dan internalisasi kelima nilai budaya kerja itu sudah dianggap cukup selama satu tahun terakhir. "Sekarang bukan lagi masanya mengajak 'Ayo kerja.' Saat ini kita mulai ditanya 'Mana kerjamu?' Sudah saatnya kita menunjukkan kerja nyata dengan hasil yang kasat mata," tandas Menag. Untuk mengoptimalkan kinerja, sinergi harus diperkuat dengan disertai beberapa langkah seperti pembenahan administrasi, pengurangan kegiatan seremonial, penggunaan aplikasi teknologi, dan memperlancar layanan publik. Bila langkah-langkah ini dilakukan, Menag meyakini Kementerian Agama akan meraih prestasi lebih tinggi.

Menteri Agama setidaknya menyampaikan lima langkah konkrit mengoptimalkan kinerja bagi aparaturnya. Lima direktif Menag tersebut, pertama, membenahi administrasi dan meningkatkan transparansi. Kedua, memperbesar dampak program kementerian bagi pemangku kepentingan. Ketiga, mengimplementasikan layanan prima. Keempat, memperkuat kerjasama. Kelima, meningkatkan kepekaan sosial. Agar seluruh target-target dapat terpenuhi melalui langkah-langkah itu, Menag selalu mengingatkan agar setiap satuan kerja di kementeriannya meningkatkan sinergi dan integrasi. "Ibarat sapu lidi, ia akan berfungsi optimal jika bersatu erat dan bergerak beriringan," begitulah Menag menganalogikan.

Bersih melayani sebagai spirit perubahan bagi institusi yang sudah berusia 70 tahun ini, didefinisikan sama oleh Sekjen Kemenag. Kementerian Agama yang bersih itu adalah Kementerian Agama yang semakin sedikit korupsi, kolusi dan nepotisme, semakin transparan, semakin akuntabel dan itu sudah kita mulai dengan implementasi program zona integritas, implementasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih di seluruh satuan kerja tanpa terkecuali. Untuk menjadi birokrasi yang bersih itu tidak hanya kita bebankan seluruhnya pada integritas seorang Direktur Jenderal, misalnya. Karena untuk menjadi bersih dan melayani tentu ada pada kapasitas semua di antara kita, ada pada semua elemen di dalam setiap diri kita. Semoga

Dodo Murtado

JARUM jam sudah bergeser menjauh dari angka 12 malam. Jelang perggantian hari, rapat sidang Komisi I yang membahas tata kelola belum selesai. Perdebatan dan lontaran argumen masih mewarnai rapat, hingga akhirnya Ketua Sidang Komisi I Syihabuddin Latief mengetuk palu menandai sidang komisi dinyatakan selesai. Di banding dua komisi lainnya yang membahas pendidikan dan layanan keagamaan, atmosfir rapat di sidang komisi I yang membahas tata kelola cukup alot. Sejumlah isu penting menyangkut tata kelola kepegawaian, singkronisasi program kerja dan anggaran Kementerian Agama pusat dan daerah, harmonisasi struktur dan tata kerja pusat dan daerah, kebijakan penyaluran bantuan, penguatan regulasi, pengawasan, *quick wins*, dan anggaran memicu dialektika diskusi dan perdebatan dikalangan peserta rapat. "Isu redistribusi pegawai, regulasi, dan harmonisasi struktur dan tata kerja cukup menyita waktu rapat," ujar salah satu peserta yang berasal dari PTKN yang keluar ruangan rapat untuk mengganti kopinya yang dingin.

Mekanisme perumusan hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2016 berbeda dengan pola rakernas tahun sebelumnya. "Kalau biasanya di dalam rakernas (tahun-tahun sebelumnya) yang penting ketemu, dan kemudian rekomendasinya juga tidak semenggigit seperti tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam saat ditemui Ikhlas Beramal di ruang kerjanya usai shalat Jumat, 18 Maret 2016. Nur Syam menggambarkan, di dalam sidang komisi dipaparkan masalahnya apa, penyelesaiannya seperti apa, hambatannya seperti apa, dan hasil akhir yang diin ginkan seperti apa. Selanjutnya dibuat dalam satu matrik, yang dengan matrik itu, kita tahu ini menjadi masalah kepegawaian, masalah dalam struktur, dalam bidang keuangan, bidang haji, kerukunan umat beragama, atau pelayanan KUA. Semua dituangkan dalam dalam satu matrik, sehingga kita lebih mudah termasuk rencana aksi (*action plan*) penyelesaian dari hambatan yang kelak ditemukan, kemudian siapa yang bertanggungjawab, dan seterusnya. "Jadi saya nilai, rakernas kemarin ada satu kemajuan yang luar biasa dalam raker itu, karena kita bisa memetakan problem-problem kita selama ini dan kemudian bagaimana kita membangun rencana aksi untuk menyelesaikannya," kata Nur Syam.

Apa yang dinyatakan Sekjen Nur Syam tersebut menjawab keinginan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam arahannya saat membuka rakernas yang menandaskan agar setiap satuan kerja di Kementerian Agama di antara sekian banyak program yang dirancang harus dipilih program unggulan yang betul-betul memiliki dampak signifikan pada masyarakat yang kita layani. "Tidak hanya program unggulan yang dipilih, tapi seluruh program yang sifatnya

RAPAT KERJA NASIONAL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016

2016, HARUS LEBIH BAIK

SEJUMLAH CATATAN PENTING MENJADI OUT PUT RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) KEMENTERIAN AGAMA YANG DIGELAR UNTUK TIDAK HANYA MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2015. MENAG MENEGASKAN AGAR SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016 HARUS BERDAMPAK SIGNIFIKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.

reguler harus ada progres ke arah yag lebih baik, tidak cukup dan apalagi rendah, harus lebih baik," tegas Menag kepada seluruh pimpinan Kementerian Agama yang menjadi peserta rakernas.

Menag mengilustrasikan, serapan anggaran Kemenag tahun 2014 mencapai 87,05 persen dan tahun 2015 mencapai 89,23 persen, mendukuki peringkat keempat dari Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran terbesar. Ia minta agar serapan anggaran tahun 2016 ini harus lebih baik, juga peringkatnya. "Progres harus meningkat," tandasnya kembali. Menag memisalkan, dalam haji, peningkatan itu harus terlihat, ada hal yang baru dan inovatif dan digagas sehingga kemudian jamaah merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan. "Harus ada kesadaran untuk meningkat dibanding tahun lalu," ujar Menag menekankan.

Penegasan lain yang disampaikan Menag yang harus menjadi fokus seluruh peserta Rakernas) Kementerian Agama tahun 2016, bahwa forum rakernas harus bisa dimanfaatkan sebagai medium dan wadah untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan Kemenag di tahun 2015. "Rakernas harus betul-betul bisa dijadikan tempat di mana kita melakukan mawas diri terhadap pelaksanaan program di 2015," terang Menag.

Manajemen Kinerja

Rakernas yang diselenggarakan tanggal, 29 Februari s.d. 2 Maret 2016 seperti diutarakan Nur Syam dalam rangka menguatkan manajemen kerja yang sudah dimplementasikan di Kementerian Agama. Dilakukan dalam rangka untuk memperkuat dan mengembangkan terhadap capaian-capaian Kementerian Agama terutama dilihat dari aspek manajemen kinerja. Kita ingin semakin memantapkan bagaimana sasaran kinerja pegawai supaya semakin realistis, semakin empiris, semakin memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat dan juga terutama harus memungkinkan untuk diukur, sehingga sasarannya lebih jelas, tidak bercorak abstrak, dan konseptual.

Nur Syam yang aktif menulis di blog -nya, menjelaskan, selain untuk memantapkan bagaimana sasaran kinerja pegawai, melalui rakernas ini kita ingin memperkuat basis indikator kinerja para pejabat-pejabat kita, yaitu yang kita upayakan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terutama juga semakin relevan dengan perubahan yang sekarang sedang terjadi dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan capaian kinerja kita. Sejauh ini, ujar Nur Syam, kalau kita menggunakan tolok ukur evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal hasilnya memang variatif, ada yang sudah memuaskan, ada yang sangat memuaskan, ada yang cukup. "Ke depan tentu kita inginkan, bahwa capaian kinerja kita semakin baik. Dan itu diawali dengan rakernas kita untuk melihat sampai sejauhmana kinerja yang kita lakukan," ucapnya.

Rakernas ini, ungkap Nur Syam, memiliki tiga agenda besar. Pertama,

agenda mengenai peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Menurutnya, kita ingin membangun kekuatan lebih bagus di bidang pelayanan administrasi ini, apakah itu yang terkait dengan regulasi, kepegawaian, pelayanan di bidang kerukunan umat beragama, kemudian juga terkait dengan pentingnya meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan struktur kita. "Ini menjadi agenda kita yang paling utama, kita ingin semua hal yang terkait dengan pelayanan administrasi itu agar kemudian semakin meningkatkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), dan stakeholders kita merasa semakin puas dengan pelayanan administrasi dengan berbagai aspek," paparnya kepada IB.

Dipaparkan Nur Syam, selain agenda peningkatan kualitas pelayanan administrasi, agenda kedua strategis yang dibahas dalam forum pimpinan Kemenag ini yakni tentang peningkatan akses relevansi dan daya saing pendidikan agama dan keagamaan. Menurutnya, ini yang menjadi agenda ke depan terutama satu tahun kedepan ini. Kita ingin pelayanan terhadap pendidikan semakin meningkat dan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas guru, dosen, kualitas tenaga pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, kemudian juga meningkatnya kualitas daya saing siswa kita. "Saya rasa (ini) menjadi bagian-bagian penting yang perlu kita tingkatkan ke depan," papar Nur Syam.

Ketiga, program-program pelayanan agama dan keagamaan serta layanan kehidupan umat beragama. Ini yang kemarin didiskusikan seluruh para Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat agama-agama. Dijelaskan Nur Syam, dalam fokus diskusi tersebut, semua sepakat mengenai bagaimana peningkatan pelayanan terhadap kehidupan beragama. Menurut guru besar UIN Surabaya ini, di dalam peningkatan kerukunan umat beragama ini, yang menjadi isu penting adalah bagaimana ke depan Indonesia menjadi laboratorium kerukunan umat beragama. "Itu saya rasa menjadi salah satu dari tujuan yang kita inginkan di tahun 2016 ini, kata Nur Syam selain isu lain menyangkut persoalan terorisme dan pornografi.

Proyeksi A nggaran

Presiden Jokowi kerap mengingatkan jajaran menteri Kabinet Kerja agar penggunaan anggaran 2016 berbasis

pada program atau *money follow programe*, bukan berbasis fungsi atau *money follow function*. Dengan demikian, anggaran digunakan berdasarkan prioritas program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Presiden, penggunaan anggaran ke depan tidak lagi berprinsip lagi pada "*money follow function*" sehingga penggunaan anggaran dibagi sesuai struktur organisasi kementerian, mulai dari eselon I sampai IV. "Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana. Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada," kata Presiden dalam sidang paripurna di Istana Negara, Rabu 10 Februari 2016.

Menurut Presiden, organisasi memang diperlukan, namun program prioritas tetap yang harus dikedepankan. Jadi yang jelas, Presien menandaskan bahwa harusnya *money follow programe*. Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat. Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Selain haus anggaran harus berbasis program, Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. "Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu," ucap Presiden. Sehubungan itu, Presiden meminta agar para menteri Kabinet Kerja bisa mengendalikan arah dan kebijakan anggaran di setiap kementerian yang dipimpinnya. "Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya. Penggunaan program juga harus menyebut langsung keperluannya.

Kementerian Agama mentargetkan serapan anggaran Tahun 2016, 93 persen dari pagu anggaran 57,120 triliun. Tahun 2014 yang mencapai 91,30 persen, serapan anggaran Kementerian Agama tahun 2015 mengalami penurunan 2,07 persen. Diuraikan Sekjen, dari sisa anggaran yang tidak terserap, ada belanja pegawai yang tidak terserap 100 persen karena CPNS yang mestinya di akhir 2014 tuntas ternyata tidak selesai hingga 2015. Menurut Nur Syam, ini bukan salah proyeksi, itu sudah kita proyeksikan hingga mencukupi, namun karena ada faktor tertentu tidak terselesaikan misalnya penyelesaian K 2, sehingga tidak terserap sesuai prosentasi yang kita harapkan," ujar Sekjen.

Dalam penjelasan Sekjen, sektor pengadaan barang jasa tidak terserap relatif banyak. Belanja modal dan bansos yang tidak terserap seluruhnya membuat aspek inilah yang menyumbang tidak tercapainya target. Kepada seluruh Kakanwil khususnya, Nur Syam untuk 4 aspek belanja (pegawai, barang, modal dan bansos) terutama tiga aspek terakhir agar dimaksimalkan sesuai yang kita inginkan. "Kita bersyukur kita di tengah kesulitan masih bisa

MENAG LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN MENYAMPAIKAN ARAHAN PADA RAKERNAS KEMENAG 2016. SENIN , 29 FEBRUARI 2016

SUASANA SIDANG KOMISI III MEMBAHAS LAYANAN KEAGAMAAN RAKERNAS KEMENAG 2016. SELASA ,1 MARET 2016

mencapai 89,23 ersen anggara kita terserap. Tahun depan, jangan lagi mengakhirkan realisasi bansos," ujar Nur Syam yang menjelaskan bahwa untuk mencapai target serapan 93 persen, agar seluruh satuan kerja membuat proyeksi pelaksanaan program dan anggaran di tahun 2016.

Kepada seluruh pimpinan Kemenag yang hadir menjadi rakernas, Sekjen Kementerian Agama Nur Syam menekankan agar seluruh satuan kerja membuat proyeksi pelaksanaan program dan anggaran di tahun 2016. Idealnya, bulan Januari 2016 sudah dilakukan sehingga bisa mengetahui proyeksi dalam periode triwulan pertama (berapa). Dipaparkan Nur Syam, setidaknya ada lima langkah proyeksi dalam konteks ini. Pertama, menyusun Proyeksi Penyerapan Anggaran (PPA) yang mengacu pada penjadwalan pelaksanaan kegiatan pada setiap Unit Kerja untuk selanjutnya diintegrasikan menjadi PPA Kanwil dan segera membuat dan melaksanakan disbursment plan/ rencana penarikan dana; Kedua, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan lebih awal.

Mengacu pada Inpres No. 1 /2015 tentang Pengadaan Barang Jasa, agar seluruh penandatanganan kontrak sudah bisa dilakukan mulai bulan Januari dan sebelum bulan Maret selesai dan menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) lebih cepat. "Segera diselesaikan, yang bisa ditenderkan, selesaikan, mana yang dalam proses dan rencana agar dilaporkan sehingga bisa dilaporkan ke presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan. Hingga saat ini, kita bisa belum sampai seratus yang sudah kita kontrakkan," katanya.

Kedua, menyampaikan rencana pengadaan untuk diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Satker Kanwil melalui mekanisme LPSE. Ketiga, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012. Keempat, proyeksi lain yang disampaikan Sekjen, mengajukan UP (Uang Persediaan) untuk membayar kegiatan-kegiatan yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP. Sekjen mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara aktif mengawasi konsistensi pelaksananaan sesuai jadwal yang ditetapkan. "PPK harus konsisten mengamati jadual pengadaan barjas, juga rektor dan kakanwil melakukan evaluasi kebijakan stategis," ucapnya.

> Penggunaan anggaran 2016 berbasis pada program atau *money follow programe*, bukan berbasis fungsi atau *money follow function*. Dengan demikian, anggaran digunakan berdasarkan prioritas program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
>
> PRESIDEN JOKOWI

Melansir data hasil efisiensi anggaran melalui (*e-procurement*), tahun 2015 Kementerian Agama berhasil melakukan penghematan anggaran negara lebih dari Rp344 miliar. Penghematan ini terjadi seiring berjalannya layanan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). Sepanjang tahun 2015, pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di seluruh agensi LPSE Kementerian Agama mencapai 1.849 paket. Total pagu lelang lebih dari 2,36 triliun, sedang yang terbayarkan 2,01 triliun, sehingga ada penghematan mencapai lebih dari 344,64 miliar atau sebesar 14,6%.

Kebijakan lain dalam proyeksi anggaran 2016, yaitu melakukan evaluasi program-program, kebijakan dan organisasi dari fungsi atau pandangan strategi. "Segera melakukan revisi POK atas kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas, serta meningkatkan efisiensi pengeluaran pada berbagai tingkatan pengeluaran (output, kegiatan, program)," urai Nur Syam menjelaskan proyeksi anggaran kelima.

Reformasi Regulasi dan Anggaran

Selain menekankan signifikansinya proyeksi anggaran, Nur Syam meminta setiap unit Eselon I untuk segera melakukan reformasi regulasi dan

BANNER BERSIH MELAYANI DIBENTANGKAN SISWA SISWI MAN 4 JAKARTA SAAT PEMBUKAAN RAKERNAS KEMENAG TAHUN 2016 DI JAKARTA, 29 FEBRUARI 2016

PEJABAT ESELON I MENANDATANGANI PERJANJIAN KINERJA DISAKSIKAN MENAG SENIN, 29 FEBRUARI 2016

reformasi penganggaran. Menurutnya, regulasi yang justru menyulitkan serta penganggaran program yang tidak relevan dan berdampak langsung kepada masyarakat menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, ujar Nur Syam, agar dipetakan seluruh regulasi Kementerian Agama di setiap unit Eselon I. Mana yang masih relevan dan mana yang sudah tidak relevan. Menurutnya, regulasi yang menghambat percepatan program dan menyulitkan pelaksanaannya harus segera dievaluasi. Untuk itu, regulasi harus dirumuskan secara sederhana (simple) dan tidak mengakibatkan masalah pada pelaksana program. "Regulasi harus dirumuskan untuk percepatan program," tegas Nur Syam saat ditemui IB di ruang kerjanya, Rabu 23 Maret 2016.

Selain reformasi regulasi, Nur Syam juga meminta pimpinan satker untuk melakukan reformasi penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Tujuannya, agar setiap program dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sehingga diperlukan pemetaan secara jelas program apa harus dilakukan pada bulan apa. Ini dilakukan agar jangan sampai terjadi penumpukan anggaran pada triwulan keempat atau akhir tahun. Nur Syam mendorong agar dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan dan permasalahan. Selain soal ketepatan waktu pelaksanaan, reformasi penganggaran juga dimaksudkan untuk memfokuskan program. Nur Syam mencontohkan agar program infrastruktur bisa diselesaikan sebagai prioritas. Demikian juga dengan program-program yang berdampak positif dan massif bagi rakyat. "Lakukan program sedikit saja tetapi memiliki bobot signifikan bagi rakyat," katanya.

Nur Syam menggarisbawahi agar diupayakan merumuskan program yang riil, jelas, terukur, dan memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat. Program perjalanan dinas, konsinyering dan lain-lain yang bukan prioritas agar ditunda pelaksanaannya. Selain merumuskan program yang riil dan terukur, pimpinan satker juga diminta untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa ada fokus anggaran yang sama untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan kemasyarakatan. Koordinasi antar unit eselon I ini untuk memastikan prioritas dan fokus program. Selain kedua aspek di atas yakni reformasi regulasi dan penganggaran, Nur Syam meminta akan proses reformasi birokrasi yang sudah berlangsung di Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir bisa segera diakselerasi. Hal ini salah satunya dilakukan dengan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka kompetisi global. Saat ini semua berada dalam suasana kompetisi, dan agar survive maka kompetensi semua sektor harus dioptimalkan.

Langkah Strategis

Selain menggariskan proyeksi anggaran, untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran Kementerian Agama tahun 2016, Sekretaris Jenderal Kemenag menyampaikan sejumlah langkah strategis pelaksanaan anggaran yang terangkum dalam lima aspek. Kelima langkah strategis tersebut meliputi. Pertama, fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi Presiden dan tugas fungsi Kementerian Agama melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran terutama yang memiliki nilai tambah yang besar dan dampak langsung pada masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan, bantuan penyediaan sarana ibadah, pelayanan keagamaan serta pemeliharaan kerukunan umat beragama. "Fokus kegiatan dan

SEKJEN KEMENAG NUR SYAM MENYERAHKAN PIAGAM BAGI PERAIH JUARA MAJALAH DINAS KANWIL KEMENAG PROVINSI KEPADA SEJUMLAH KAKANWIL. RABU, 3 MARET 2016

program pada pencapaian visi misi Presiden. Presiden tidak ingin program yang abstrak. Kata pemberdayaan, peningkatan kualitas itu ditolak beliau. Kita sudah kerjasama dengan Bappenas untuk menarasikan lebih riil dan konkrit. Merumuskan nomenklatur program yang lebih empiris," ujar Sekjen.

Kedua, laksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran antara lain dengan efisiensi pada belanja perjalanan dinas, pembiayaan kegiatan sosialisasi, orientasi, workshop, konsinyering, rapat-rapat di luar kantor dan rapat kerja di luar wilayah kerja tanpa mengurangi target kinerja, termasuk didalamnya efisiensi belanja perjalanan dinas luar negeri seperti kegiatan studi banding dan undangan yang tidak berdampak langsung bagi peningkatan kinerja Kementerian Agama. Ketiga, jangan memunculkan lagi jenis kegiatan dan anggaran yang tidak jelas, tidak konkrit, atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd. Keempat, membatasi pembentukan tim-tim kegiatan yang outputnya tidak jelas dan hanya menghamburkan anggaran, karena sudah ada tunjangan kinerja.

Kelima, Sekjen mendorong setiap satker untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik secara internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. "Tingkatkan koordinasi agar kalau ada masalah segera diselesaikan," ujarnya. Selain kelima langkah strategis pengelolaan anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan harus diupayakan untuk meningkatkan kualitas Laporan

> Jangan memunculkan lagi jenis kegiatan dan anggaran yang tidak jelas, tidak konkrit, atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd
>
> SEKJEN KEMENAG NUR SYAM

Keuangan Kemenag menjadi WTP (tanpa DPP). Bagi Sekjen, laporan keuangan yang baik tergantung kepedulian pimpinannya masing-masing. "Seorang pimpinan harus memiliki perhatian lebih, opini WTP merupakan salah satu marwah Kemenag," tandasnya.

Untuk mencapai target laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Sekjen menyampaikan sejumlah langkah. Pertama, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan memperhatikan penjadwalan kegiatan dan *disbursement plan* yang lebih ketat sesuai target, penguatan kepatuhan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan termasuk standar biaya masukan/ keluaran, perjalanan dinas, kelengkapan dokumen SPJ, dan penguatan sistem pengendalian internal (SPI) dalam pelaksanaan program dan anggaran yang mengacu pada SOP. Kedua, pengadaan barang/jasa yang akuntabel dengan memperhatikan pemanfaatan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa dan peningkatan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada satuan kerja atau kelompok satuan kerja.

Meletakkan Dasar

Saat menutup Rakernas, Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam kembali menggarisbawahi bahwa tahun 2015 kita telah meletakkan dasar pengembangan Kementerian Agama dalam banyak hal. Pertama, kita telah memulai era baru reformasi birokrasi dengan yang kita sebut implementasi manajemen kinerja yang kita ketahui di awal tahun lalu kita tandatangani perjanjian kinerja dan setiap pertengahan dan akhir tahun akan dilakukan evaluasi. "Melalui manajemen kinerja, kita berharap diikuti secara tegas dan jelas memadai apa yang telah dilakukan dan program apa yang telah dihasilkan, dan di tahun 2016 apa yang kita lakukan," ujar Nur Syam.

Sejauh ini, ujar Nur Syam, manajemen performa kinerja dinilai makin bagus dan diharapkan tidak hanya membuat perjanjian kinerja dan produknya yang kita ukur, tapi juga ada pembinaan yang dilakukan bersama, karena tentu apa yang dicapai adalah sesuatu yang dicapai bersama-sama. Tahun lalu sudah kita letakan sistem akuntansi berbasis akrual. Kita sudah letakkan pondasinya di 2015, ini harus kita mantapkan agar Laporan Keuangan Kementerian Agama memenuhi standar akuntansi pemerintah. Dengan sistem akrual tersebut, penilain BPK RI atas laporan keuangan makin bagus dan kita harapkan kita peroleh WTP kembali.

Selain implementasi manajemen kinerja dan sistem akuntansi berbasis akrual, Sekjen menandaskan bahwa Kemenag telah meletakkan layanan bersih dan optimal sesuai Visi Misi Reformasi Birokrasi. Oleh karenanya, kita berharap kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam kerangka melakukan deteksi dini atas potensi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan anggara n. Hal ini dilakukan untuk mencapai mencapai Kemenag yang bersih, karena ada kerjasama baik antar unit.

Dodo Murtado

PENGAWASAN

MENGEJAR TARGET KINERJA 75 PERSEN

TAHUN 2015, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA MENGGANJAR KEMENTERIAN AGAMA DENGAN PREDIKAT B ATAU SKOR KINERJA RATA-RATA 62. TAHUN INI , AKUNTABILITAS KINERJA KEMENAG DITARGETKAN BISA MENCAPAI ANGKA 75.

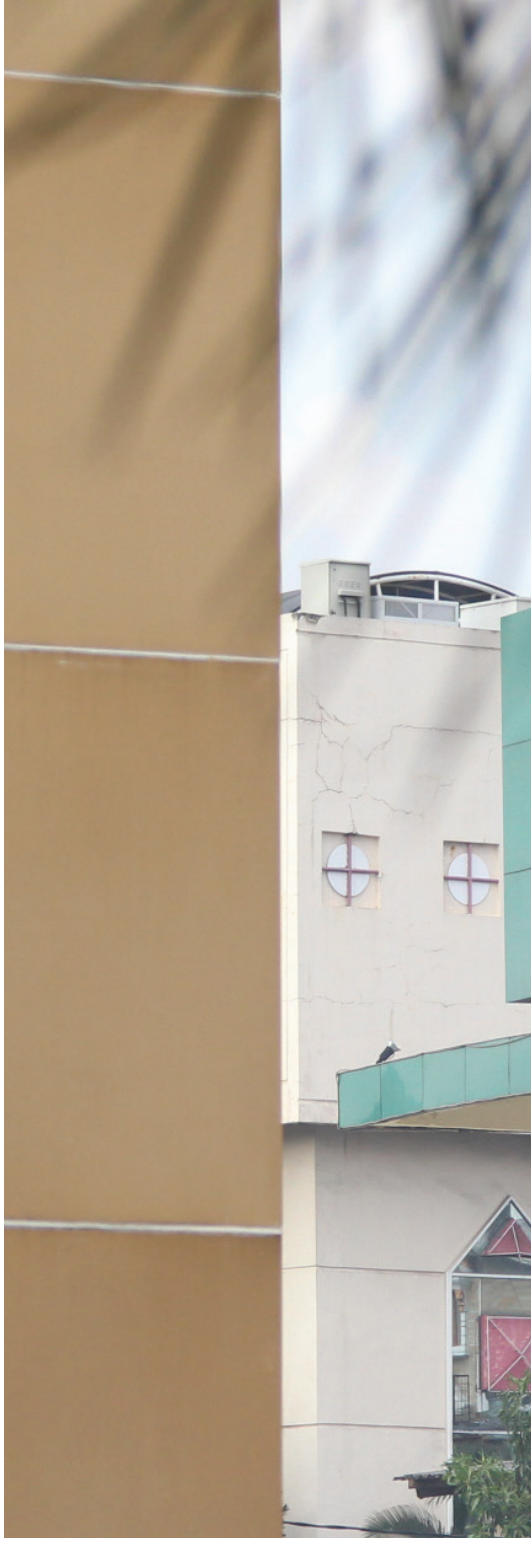

Target penilaian skor kinerja Kementerian Agama tahun 2016 yang bisa diraih dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih 75. Tahun 2014 memperoleh angka 54 dan bergeraknya ke skor 62 di tahun 2015. Jadi (skor 75) tidak terlalu ambisius untuk mencapai 80 atau 100, angka ini masuk dalam target kinerja kita. "Kita harus bersemangat, karena kalau tidak tercapai 75, berarti kita tidak mencapai target," papar Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Yasin dalam sesi materi Rakernas, Senin 29 Februari 2016.

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Agama yang diukur oleh Menpan dan RB melalui Lakip, tahun 2015 nilainya sudah bagus yakni 62. Sepanjang kemerdekaan baru kali pertama Lakip mendapat nilai B. "Ini harus kita pertahankan dan untuk dilanjutkan bahwa Lakip itu selalu B. Jadi, ujar Yasin optimis, kita sudah bisa duduk sama-sama rendah berdiri sama tinggi dibanding dengan instansi lain sehingga nilai kinerja 62,28 apabila harus bisa kita pertahankan dan bahkan bisa kita naikkan. Naik (skornya) indeks birokrasi reformasi oleh Kemenapan dan RB dari 62,28 bisa menjadi sampai 75, ini akan diikuti dengan kenaikan tunjangan kinerja.

Salah satu strategi dan pendekatan untuk mencapai target tersebut seperti dijelaskan M Yasin yaitu, menyusun tim (trainer) yang akan melakukan training ke satuan kerja selain menggelar training of trainer. Sejauh ini, rata rata satker yang ikut dalam Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Birokrasi, Bersih, Melayani (WBBM) memperoleh skor 75. Tahun 2013, ZI dan WBBM di satker-satker tersebut belum bisa dinilai, dan tahun 2014 baru bisa dinilai, meski baru satker di tingkat pusat atau di unit eselon I yang kemudian memperoleh nilai 54,83 karena beberapa aspek yang (nilainya) dibawah standar, misalnya penataan SDM, pengawasan peraturan perundang-undangan dengan skor umumya di angka 50. Setelah digabungkan dengan komponen pengungkit dan hasil, barulah dicapai angka 54,83. Dan untuk mendapat target 75, audit kinerja juga targetnya 75.

Meningkatkan ketaatan aparatur Kemenag terhadap peraturan menjadi salah satu poin pertama yang disampaikan M. Yasin yang juga mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam uraiannya tentang sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di antara 2015-2019. Meningkatnya ketaatan (*complience*), indikator kinerjanya adalah peningkatan jangkauan pengawasan. "Jadi jangan sampai samplingnya terlalu sedikit agar tidak representatif," kata Yasin.

Kedua, meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat. Bagi Yasin, setiap pengaduan jangan sampai ada yang dilantarkan karena pengaduan itu bisa saja pengaduan yang baik, sedang dan pengaduan yang tidak baik. "Yang tidak baik itu adalah yang fitnah yang tidak akan pernah kita tindaklanjuti," tegasnya.

Selanjutnya, meningkatkan tindak lanjut apa yang diaudit, apa yang menandatangani pakta integritas, mulai pejabat eselon I. Menurutnya,

proses tindaklanjut audit ini idealnya bulan Januari, tetapi sekarang belum terlambat. Pakta integritas, menurutnya, sudah dipersiapkan sejak awal Februari. "Kita syukuri sudah bisa ditandatangani, jadi pak Menteri gampang nagih, tercapainya kinerja dari masing-masing sektor eselon I dimulai dari yang di pusat sesuai apa yang ditandatangani. Kalau sudah tanda tangan tidak putus di tengah jalan. Artinya, harus satu tahun kalau genap satu tahun,". Keempat, pejabat melaporkan harta kekayaannya. Menpan menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara yang masuk ke dalam Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 1 harus melapor kekayaannya. "Jadi kalau dahulu itu hanya tertentu pejabat-pejabat yang di level eselon I, eselon II, sekarang semuanya diminta untuk melaporkan," kata Yasin.

E-Office

Sasaran strategis Itjen berikutnya adalah meningkatkan mutu kinerja dan integritas aparatur Kementerian Agama. Sesuai dengan judul rakernas tahun ini, dikatakan Yasin sekarang konsentrasinya adalah kinerja. Kinerja dari pusat ini kita "keroyok" antara Setjen dengan Itjen, jadi saling melengkapi di dalam peningkatan mutu kinerja antara satker di bawah Kementerian Agama. Indikatornya adalah kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Jadi integrasi database yang dalam lingkup e-office. Kali ini kita harus segera mendukung hal ini, kita targetkan sama-sama negara ini e-office untuk bisa menjadi world class government, kita harus didukung e-office atau kalau dalam tahapan dynamic birokrasi. Pada saat tahun 2025 kita semuanya harus e-office. E-office yang sudah terlaksana di negara-negara Asia antaranya Korea Selatan sudah full e-office. "Kita harus mendukung," tandas Yasin.

Satu hal lain yang menjadi poin penting dalam sasaran strategis yang disampaikan Irjen adalah jumlah regulasi pengawasan yang dihasilkan atau disempurnakan. Dalam pandangannya, saat ini kita banyak terjadi kekosongan pengaturan. Namun, secara simultan ada sejumlah produk peraturan perundangan yang dikeluarkan Kementerian Agama. "Untuk tahun 2015, banyak Peraturan Menteri Agama (PMA) yang diterbitkan, ini menunjukkan, semakin banyak pengaturan semakin terjadi suatu kepastian hukum," kata Yasin.

M Yasin dalam paparannya menyampaikan perihal kebijakan pengawasan yang dilakukan Ispektorat Jenderal. Menurutnya, kebijakan pengawasan diarahkan pada 11 program Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan tata kelola kemenag yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang maksimal. Penerapan sasaran pengawasan berdasarkan analisis resiko dari instansi atau satker yang mempunyai dana yang berlebih menjadi fokus prioritas yang ditawarkan pengawasan serta pendamping. "Satker yang paling banyak laporan dari internalnya maupun dari masyarakat atas terjadinya suatu pelanggaran yang kira-kira rentan terhadap penyimpangan dengan layanan publik menjadi fokus pengawasan kita," kata Yasin.

Terobosan lain yang digulirkan Itjen dalam peningkatan kualitas audit, salah satunya sistem pengawasan berbasis e-audit. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kerangka penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Dikatakan Yasin, ia sudah melakukan sejumlah rapat dengan Sekretaris Jenderal dan eselon 1 lainnya yang menyepakati untuk memadukan sistem seperti e-LHKPN, e-audit, e-hajj, Simkah, Emis, dan lainnya yang ada di setiap unit eselon I pada satu pintu yakni e-MPA atau Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran. "Itjen menjadikan yang e-MPA sebagai pintu masuk e-Audit. Sedang kita rancang, mudah-mudahan tahun 2016 ini bisa efektif," kata Yasin optimis.

Dodo Murtado

STRATEGI MENCAPAI 75 PERSEN

REFORMASI BIROKRASI MENJADI SALAH SATU AGENDA UTAMA PEMERINTAH DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR. MEMASUKI 2016, SELURUH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA DITUNTUT UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI.

Kementerian Agama pun memiliki target tersendiri. Setelah sebelumnya (2015) memperoleh nilai 68 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), tahun ini kementerian yang bermotto "IkhlasBeramal" ini menargetkan nilai 75.

Lantas bagaimana strategi yang akan dilakukan? Irjen Kemenag M. Jasin dalam kesempatan wawancara dengan tim Majalah Ikhlas Beramal, Rabu 30 Maret 2016, mengatakan bahwa salah satu strategi yang akan dilakukan adalah menyusun Tim Training of Trainer (ToT). Sebelum melaksanakan tugas pembinaan di satker-satker Kemenag, tim ini nantinya akan dilatih oleh Kemenpan & RB daninstansiterkaityang bisa membantu pencapaian target ini.

Keberadaan tim ToT ini penting, lanjut M. Jasin, untuk memastikan bahwa proses pendampingan penilaian reformasi birokrasi berjalan efektif dan berkesinambungan. Lebih dari itu, ToT juga penting dalam rangka mengubah mindset aparatur Kementerian Agama. Sebab, menurut mantan pimpinan KPK ini, syarat dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu perubahan maindset. Persoalan peningkatan capaian kinerja dan keteladanan, semuanya terkait dengan *mindset*.

M. Jasin menengarai perubahan pola pikir ini sudah mulai muncul, ditandai dengan banyaknya satker yang berinisiatif datang ke kantor Itjen untuk berkonsultasi terkait problem dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, utamanya tentang cara menyiapkan 26 unsur indikator pengungkit dan indikator yang baru masuk dalam Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM). "Walaupun para satker sudah datang kesini untuk konsultasi, kita tetap akan melaksanakan monitoring dan sosialisasi sehingga tidak hanya berhenti di Kankemenag. Zona Integritas itu harus dilaksanakan, sehingga tidak hanya sebagai slogan. Alat ukurnya yaitu audit kinerja. Untuk mendapatkan nilai 75 dari Menpan, audit kinerja kita targetnya juga harus 75," jelasnya.

Dari hasil penilaian yang sudah dilakukan, menurut M Jasin, rata-rata masih kurang dari 70 secara nasional. Nilainya pada kisaran 69 untuk 103 satker yang dilakukan penilaian. Tahun ini, Itjen menargetkan 200 satker lebih yang akan dilakukan.

Strategi lainnya adalah mencetak buku panduan pelaksanaan zona integritas. Sedikitnya, Itjen telah menerbitkan 50 buah judul buku yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Itjen di ranah pengawasan, termasuk soal panduang ZI WBK-WBBM. Namun, M. Jasin mengakui kalau ada terkadang proses *transfer knowledge* tidak cukup jelas dengan hanya membaca, karenanya ToT penting untuk melakukan pendampingan terkait pelaksanaan riilnya. "Jika satkernya lembaga pendidikan, apa yang harus dilakukan. Jika lembaga penelitian, bagaimana? Demikian juga dengan kampus dan satker lainnya," tutur M. Jasin.

Selain TOT dan buku, lanjut M. Jasin, Itjen juga membuka layanan konsultasi. Kita memberikan ruangan dan menyiapkan orang yang mampu menjelaskan pertanyaan setiap ASN atau satker. Tidak hanya di kantor, proses layanan konsultasi juga diberikan saat melakukan audit lapangan. "Tim audit kinerja harus mau sharing atas apa yang mereka keluhkan," tegasnya.

M. Jasin mengakui kalau rasio auditor dengan jumlah satker Kemenag masih sangat kurang. Satker Kementerian Agama berjumlah 4550, sementara auditornya hanya 234 orang. Sebagai solusi, Itjen kedepanakan memperkenalkan e-Audit Kinerja. Dengan begitu, satker yang tidak bisa dikunjungi auditor untuk dievaluasi secara langsung, akan mengirimkan realisasi target kinerjanya secara elektronik. Data-data yang masuk dievaluasi lalu dikirim balik sebagaihasil audit kinerja.

"Sistem ini dikembangkan sendiri oleh pegawai kami dan akan diperkenalkan tahun ini secara piloting. Sistem ini menjamin keterjangkauan bagi seluruh satker bisa lapor, akurasinya terjamin karena itu elektronik dan standart perhitungannya karena seragam jadi hasilnya sama," jelasnya.

Untuk menunjang pencapaian target ini, menurut M. Jasin, ada sejumlah peraturan yang harus disiapkan, antara lain: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Komite Sekolah, PMA tentang Beban Kerja Guru dan Dosen. PMA tentang beban guru sebenarnya sudah ada, namun hanya guru agama Islam. Karenanya perlu diamandemen untuk menambah pasal-pasal yang kurang.

Selain itu, diperlukan juga PMA tentang Pola Mutasi, PMA tentang Gratifikasi, serta PMA tentang Konflik Kepentingan. Artinya, kedepan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga tidak terjadi perdebatan di tingkat pelaksanaan. "Setelah ada peraturan, ada SOP-nya melalui surat edaran dari masing-masing unit eselon I," tandasnya.

Moh Khoeron, Chairul Wahyudi

EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEMENAG TAHUN 2015

MENPAN RB APRESIASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENAG

Ada semangat perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, terlihat dalam pencapaian penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mendapatkan peringkat B dan diberikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 11 Desember 2015 lalu.

Kementerian Agama memberikan respon yang positif bahkan sangat positif dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur negara berbasis laporan dan program kinerja. "Saya mengapresiasi kinerja dan transparansi kinerja Kementerian Agama dan serta tidak resisten terhadap penilaian kinerja," demikian dikatakan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya saat kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 di Auditorium Hm. Rasjidi Kantor Kemenag Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta, Selasa 19 Januari 2016. Selain Menag Lukman Hakim Saifuddin, hadir seluruh pejabat eselon I, II, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Kakanwil Kemenag Provinsi.

Menpan menjelaskan, setiap program dan kinerja instansi pemerintah harus berdasarkan hasil, harus dilakukan pemantapan sebelumnya, lalu melakukan perencanaan yang bermutu. Dikatakan Yuddy, dalam sistem kinerja pemerintah sekurang-kurangnya ada lima hal yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam melakukan setiap program-program.Pertama, kita harus memiliki perencanaan kegiatan berkualitas. Perencanaan itu harus terkait dengan Visi Misi Bangsa dan Negara, bahwa Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kesejahteraaan, pentingnya Negara hadir, pentingnya membangun Bangsa dari pinggiran, pentingnya memberantas korupsi kolusi dan nepotisme, pentingnya daya saing dan semua hal-hal yang menyangkut esitensi dalam membangun bangsa. "Setiap kementerian harus mampu mewujudkan tugas dan fungsinya didalam peraturan Presiden yang menetapkan akan ruang lingkup kementerian tersebut terfokus apa yang telah dicapai untuk Negara dan apa yang diminta oleh negara dapat kerjakan oleh kementerian sehinga menjadi perencanaan yang berkualitas terhadap hasil," ucap Yuddy.

Kedua, dalam mengukur keberhasilan Bangsa terlihat apabila angka kemiskinan semakin turun, kemakmuran kesejahteraan semakin tinggi, investor semakin banyak dan seterusnya. "Indikator dalam mengukur Kementerian Agama, antara lain melihat apakah tingkat KKN nya menurun, apakah penyelenggaraan haji semakin berkualitas, apakah menghasilkan pendidikan agama atau keagamaan berkualitas, apakah efesiensinya, apakah pelayanan lainnya berjalan semestinya, bahkan sasaran hasil institusi itu lebih dari ukuran daripada individunya," jelas Yuddy.

Menurut Yuddy, evaluasi dan pengawasan merupakan suatu cara bagaimana mengetahui keberhasilannya, bagaimana menilai kekurangannya dan bagaimana pengendaliannya. Selanjutnya terkait hasil, hasilnya bagaimana, apakah hasilnya ada yang sama dengan sebelumnya, atau ada indikator perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya."Itulah serangkaian dari akuntabilitas kinerja, jadi akuntabilitas kinerja instansi akan mendukung akuntabilitas negara secara keseluruhan. Bila akuntabilitas kementerian baik, maka proses berjalannya suatu Negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik, sesuai keinginan Bapak Presiden mewujudkan pemerintahan berkelas dunia," Yuddy. Yuddy optimis, di bawah kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kementerian Agama dapat menjadi leading sector pelayanan dari kementerian lainnya.

Perbaiki SAKIP

Kepada seluruh pimpinan Kemenag, Menag berharap, penilaian positif atas SAKIP tersebut harus mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Menag menggariskan lima hal bagi perbaikan SAKIP ini. Pertama, Menag menugaskan Biro Perencanaan untuk membuat payung hukum terkait penjabaran lebih lanjut yang mengatur tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Kementerian sampai pada level unit kerja eselon I dan II sesuai tugas, fungsi dan peran yang diharapkan dengan cara mereviuw kembali dokumen perencanaan di unit kerjanya, sehingga menjadi relevan dan terukur dan dapat dijabarkan dengan baik sebagai tolak ukur kinerja pada level bawah dan individu.

Kedua, menag minta membuat aplikasi untuk mengukur rencana aksi atas kinerja dan sub kegiatan atau komponen rinci kinerja per triwulan. Ketiga, Menag menugaskan Itjen untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap unit kerja dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang lebih memahami manajemen kinerja dengan baik.Keempat, Menag menugaskan Itjen untuk memanfaatkan reviu laporan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan. Kelima, Menag minta untuk lebih mendorong dan memperkuat penerapan "Budaya Kerja" melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang telah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme *reward and punishment* dan lain sebagainya.

Romadanil, Pujiyanto

REFORMASI BIROKRASI

PGPS NO, SMART ASN YES

PEMERINTAH AKAN MENCANANGKAN SMART APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), SMART ASN ADALAH ASN YANG TIDAK HANYA CANGGIH DAN PINTAR, TAPI JUGA MEMILIKI ETIKA, RELIGIUS SEBAGAI BAGIAN DARI GOOD GOVERNANCE DAN TARGET MENUJU WORLD CLASS GOVERNMENT

Tahun 2015-2019, kalau kita melihat RPJMN yang sudah memasuki fase ketiga, seharusnya pembangunan Indonesia dilakukan secara komprehensif yang mengandalkan sumber daya. Banyak hal terkait sumber dayanya, mulai dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia yang kompetitif, kemudian Iptek. "Ini yang ingin saya garisbawahi, ketika perencanaan pembangunan mengatakan bahwa kita ini SDM nya kompetitif. Ketika SDM nya harus berbasiskan iptek, lalu apa yang harus kita jabarkan? ujar Deputi SDM Kemenpan dan RB Setiawan Wangsa Atmaja yang memaparkan kebijakan di bidang SDM aparatur pada Rakernas Kemenag Tahun 2016 di Jakarta, 1 Maret 2016.

Kalau kita melihat dari SDM aparatur khususnya, dan akan menyangkut manajemen kinerja nantinya, tahun 2019 kita canangkan sebagai *Smart ASN*. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang canggih, tidak sekedar pintar, tetapi yang mempunyai etika, religius dan sebagainya. Kita ingin betul bagaimana memasukkan nilai-nilai ini di tahun 2019 nanti, bahwa kita adalah ASN yang *smart*.

Dengan *milestone* seperti ini , RPJMN yang pertama kita sudah mengenal yang namanya *good governance*. Masuk RPJMN yang kedua, yang kita kenal adalah reformasi birokrasi, kemudian lahirlah Undang-Undang ASN. "UU ASN ini betul-betul mengubah situasi di mana ASN sebelumnya yang tanda kutip barangkali kita ini "mau berkinerja atau nggak sama aja lah" jadi ada istilahnya yaitu PGPS. PGPS itu Pinter Goblok Penghasilan Sama, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang dengan UU ASN, tidak seperti itu lagi," tandas Setiawan.

Dikatakan Setiawan, sekarang ini mungkin belum terasa. Tetapi menurutnya, tidak lama lagi keluar Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji dan tunjangan yang baru. Artinya, baru bedanya akan terasa. Dijelaskannya, seseorang yang berkinerja dengan seseorang yang tidak berkinerja penghasilannya beda. Seseorang yang tidak berkinerja, gajinya, walaupun masa tugasnya lama tetapi tidak berkinerja itu akan tersusul oleh anak-anak yang baru yang berkinerja. " (Kondisi ini) baru memacu kita, kok kita tidak berkinerja pendapatan kita seperti ini," ujarnya.

Di dalam *milestone* yang ketiga 2015-2019, kita canangkan betul-betul smart ASN dan 2020 2005. Kita akan mencanangkan smart ASN sebagai *human capital*, bahwa ternyata negara ini memandang kita adalah merupakan modal, kekuatan. Oleh karena itu, kita ini harus didukung, diperhatikan, baik dalam sisi kesejahteraan dan sebagainya. "Inilah capai-capaian kita, mudah-mudahan barangkali di Kemenag ini pun sama-sama bahu membahu untuk mencapai target-target yang sudah kita canangkan ini," harap Setiawan.

Awal tahun 2016, tepatnya bulan Januari, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah berlaku. 11 negara akan hilir mudik masuk ke Indonesia, lalu bagaimana mereka ini menyiapkan SDM untuk bersaing dengan SDM di Indonesia. Diuraikan Setiawan, beberapa negara seperti Filipina dan Thailand sekarang sudah membuka kursus-kursus bahasa Indonesia. Indonesia ini menjadi target mereka untuk mencari lahan-lahan pekerjaan dan memasarkan produk-produknya. "Lambat laun nanti kita akan sadar kenapa banyak pekerja asing di sini. Kita akan merasakan seperti itu kalau kita kurang kompetensi di sini. Kita juga harus mencapai *sustainable development goals*, bahwa ini merupakan agenda dari PBB yang harus kita lakukan," kata Setiawan.

Di dalam grand design reformasi birokrasi 2010-2015, kita mencanangkan 2025 ini, kita harus menjadi *world class government*. Saat ini yang kita tuju. Nanti kita lihat bagaimana tahapannya dan bagaimana semua akan memberi inspirasi kepada kita untuk melakukan hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih optimis dari apa yang kita rasakan saat ini.

Sasaran Pembangunan ASN

Dalam RPJM kita, mengapa 2019 harus kita dapatkan *smart* ASN. Pembangunan ini harus berbasis kinerja. Dalam pandangan Setiawan, globalisasi sudah tidak bisa kita pungkiri, saat ini rasanya antarnegara sudah tidak ada bedanya. Sangat tipis dan sangat *real time*. Sehingga, mau tidak mau,

kompetisi antarnegara tidak bisa dihindari. Menyitir sebuah ungkapan, Setiawan mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi itulah yang akan menjadi pemenang. "Teknologi informasi dan digitasi harus kita kuasai. Kita harus mempunyai daya kolaborasi atau *networking* yang betul-betul melkat di dalam diri ASN," ujara Setiawan.

Dikatakannya, kita masih menghadapi segudang masalah internal. Tapi yang paling menonjol adalah *missmess*, jadi ketidakcocokan antara ketersediaan ASN yang ada dengan strategi pembangunan kita. Kemudian missmess antara spesifikasi jabatan dengan orang yang mengisi jabatan tersebut. Kemudian kita juga masih menghadapi masalah-masalah disiplin.

Di dalam konsep gaji dan tunjangan yang baru, terang Setiawan, yang namanya jabatan pimpinan tinggi itu tidak lagi menganut sistem steping kenaikan gaji. Baik jabatan administrasi maupun fungsional masih ada steping ke kanan untuk kenaikan gaji dan kinerja, karena kinerja kemudian bisa naik gaji. Tapi jabatan pimpinan tinggi itu tidak, dia harus berkinerja, kalau dia tidak berkinerja berarti dia harus mundur. Jadi ini adalah dorongan di dalam setting yang kita susun, bahwa kita lihat di luar negeri, sampai jabatan administrasi mereka harus berkinerja, tidak ada istilah tidak. "Di tahun 2019, kita harus kurang lebih profilnya seperti ini, dan ini adalah *top up* nya, yakni, ASN harus berwawasan global, menguasai IT atau digital dan bahasa asing," urai Setiawan

Ada tiga sasaran berkaitan bidang pembangunan aparatur untuk menuju *world class* 2025: Pertama, ASN di dalam khususnya birokrasi ini adalah harus birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kedua, birokrasi yang efektif dan efisien, dan ketiga, birokrasi pelayanan publik yang maksimal. Tiga sasaran ini sudah dipantau negara-negara internasional dan kemudian dibandingkan dengan negara satu dengan negara yang lainnya.

Perekat NKRI

Kepada seluruh peserta Rakernas, Setiawan mengatakan hahwa ASN harus menjadi perekat NKRI. Birokrasi ini harus menjadi katalisator perubahan, birokrasi ini harus menjadi teladan. Dan kita harus membangun dan meningkatkan profesionalitas kita. Dijelaskan Setiawan, mengenai *attitude management*, Presiden di dalam RPP, mengusulkan jabatan pimpinan tinggi harus bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Menurutnya, seseorang yang berkarir di suatu daerah bukan akan menjadi pensiun di daerah tersebut. RPP ini namanya RPP Manajemen PNS, kalau PP ini keluar, di dalamnya terdapat (ketentuan) bahwa seseorang dengan status Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) itu harus diputar di seluruh Indonesia. "JFT harus siap ditempatkan di manapun, karena yang diambil adalah manajerialnya. Manajerial harus 60% dikuasai oleh JFT, yaitu eselon II atau eselon I. JFT ini bagaimana mengatur *networking* dan sebagainya,kalau teknis yang di bawahnya," terang Setiawan.

Mengutip penilaian *Global Competitive Report* 2015-2016, peringkat Indonesia ini berada di posisi 37 dari 140 negara. Bahkan Filiphine, Thailand, Vietnam sudah di atas kita dalam penilaian ini. Dalam posisi ini harus kita waspadai dan bahwa kita dulu pernah di atas, baik dengan Malaysia, Filiphine, maupun dengan Thailand. "Faktor-faktor penilaian untuk itu kurang lebih dari bagaimana pengembangan *skill* dan edukasi, bagaimana dengan korupsi, bagaimana dengan infrastruktur. jadi penilainnya sangat banyak. Untuk kualitas aparatur, kita ini sudah terkejar oleh Vietnam," jelasnya. Dan untuk kategori *easy doing bussiness*, menempatkan Indonesia di tingkat 109.

Untuk Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di ranking 88 dari 198 negara. Kita belum bebas dari persepsi korupsi. Faktor penyebab yang paling menonjol adalah korupsi dan inefisiensi pemerintahan. "Jadi kami mengajak Kemenag untuk menjadi pelopor dalam hal-hal yang menjadi penilaian lembaga internasional ini," harap Setiawan.

Dijelaskakan Setiawan, apa yang kita canangkan di atas adalah sebagai target apa yang ada di nawacita 2014-2019. Khususnya di agenda kedua, menjadikan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, birokratis, terpercaya, sebagai agenda yang masuk prioritas kedua ini. "Jadi inilah titik tolak bagaimana *management performance* ini kita jalankan," katanya. Sejauh ini, untuk reformasi, sudah ada empat undang-undang birokrasi sudah kita selesaikan. Tinggal satu lagi yang akan kita selesaikan, yaitu UU sistem pengawasan internal pemerintah. Jadi, kalau lima UU fondasi ini keluar, sebetulnya reformasi ini bisa kita jalankan baik. Di antara lima UU yang sudah keluar yaitu, UU kementerian negara, UU pelayanan publik, UU administrasi negara, UU aparatur sipil negara, dan saat ini masih rencana itu sistem pengawasan internal pemerintah. "Inilah yang mendukung dengan reformasi birokrasi," tandas Setiawan.

Dodo Murtado

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI

PROF. DR. NUR SYAM, M. SI :

MEMANTAPKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2016 yang telah diselenggarakan tanggal 29 Februari s.d. 2 Maret 2016 lalu menghasilkan sejumlah catatan penting dan fundamental dalam kerangka meningkatkan kualitas peran dan pelayanan serta menghadirkan Kementerian Agama yang lebih bersih dan lebih melayani bagi masyarakat. Sejumlah isu strategis menjadi topik pembahasan mendalam dalam rakernas yang dihadiri seluruh pimpinan Kemenag tanpa terkecuali. Dengan pola baru dalam perumusan hasil rakernas yang lebih terukur dan jelas, dinilai menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang ber-nas dan fokus, tidak abstrak dan konseptual.

Mengenakan batik beraksen hijau gelap, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama **Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si** memaparkan lebih mendalam tentang apa yang menjadi tujuan, target, langkah-langkah (*action plan*) implementasi hasil rakernas Kementerian Agama Tahun 2016 kepada **Redaksi Majalah Ikhlas Beramal Moh. Khoeron Durori, Dodo Murtado** dan **Fotografer Chairul Wahyudi** di ruang kerjanya usai shalat Jumat, 18 Maret 2016 lalu.

Apa yang ingin dicapai dan bagaimana tindaklanjut dari Rakkernas Kementerian Agama Tahun 2016 kemarin?

Rakernas yang kita kita lakukan beberapa waktu lalu dalam rangka menguatkan manajemen kerja yang sudah kita terapkan di Kementerian Agama. Dilakukan dalam rangka untuk memperkuat dan mengembangkan terhadap capaian-capaian Kementerian Agama terutama dilihat dari aspek manajemen kinerja tadi. Kita ingin semakin memantapkan bagaimana sasaran kinerja pegawai supaya semakin realistis, semakin empiris, semakin memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat dan juga terutama harus memungkinkan untuk diukur, sehingga sasarannya lebih jelas, tidak bercorak abstrak atau lebih bercorak konseptual, semacam itu.

Kemudian, kita ingin memperkuat basis indikator kinerja para pejabat-pejabat kita, yaitu yang kita upayakan supaya semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terutama juga semakin relevan dengan perubahan yang sekarang sedang terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan capaian kinerja kita. Jadi kalau kita menggunakan tolak ukur evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama hasilnya memang variatif, ada yang sudah memuaskan, ada yang sangat memuaskan, ada yang cukup, dan itu kedepan tentu kita inginkan bahwa capaian kinerja kita tentu akan semakin baik. Dan itu saya rasa diawali dengan rakernas kita untuk melihat sampai sejauh mana dengan kinerja yang kita lakukan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, rakernas ini memiliki tiga agenda besar. Pertama, adalah agenda mengenai peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Kita ingin membangun kekuatan lebih bagus di bidang pelayanan administrasi ini, apakah itu yang terkait dengan regulasi, yang terkait dengan kepegawaian, terkait dengan pelayanan di bidang kerukunan umat beragama, kemudian juga terkait dengan pentingnya meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan struktur kita. Jadi saya rasa ini menjadi agenda kita yang paling utama, kita ingin semua hal yang terkait dengan pelayanan administrasi itu agar kemudian semakin meningkatkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dan *stakeholders* kita merasa semakin puas dengan pelayanan administrasi dengan berbagai aspek yang tadi Saya sebutkan.

Kemudian, yang tidak kalah penting juga tentang peningkatan akses relevansi dan daya saing pendidikan agama dan keagamaan, ini yang juga menjadi agenda kita ke depan terutama satu tahun kedepan ini. Kita ingin, misalnya, pelayanan terhadap pendidikan semakin meningkat dan tentu ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas guru, dosen, kualitas tenaga pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, kemudian juga meningkatnya kualitas daya saing siswa kita. Saya rasa (ini)

menjadi bagian-bagian penting yang perlu kita tingkatkan ke depan.

Dalam diskusi (rakernas) kemarin, saya lihat misalnya, ada upaya-upaya yang ingin dilakukan di tahun 2016 ini terutama untuk program-program unggulan, di antaranya di bidang pendidikan. Bagaimana mutu lulusan pendidikan tinggi kita semakin baik, semakin relevan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang agama dan keagamaan. Dan ini saya rasa menjadi elementer, termasuk juga program bagaimana program pendidikan tinggi tidak hanya sekedar memiliki distingsi dan exelensi, tapi ke depan tentu pendidikan tinggi menjadi destinasi dari mahasiswa asing untuk belajar ilmu-ilmu agama di Tanah Air kita.

Dan itu sangat memungkinkan di tengah carut marut dunia Timur Tengah yang seperti itu, sehingga kita berharap ke depan, orang justru melirik pengembangan struktur Islam di Indonesia yang lebih mengedepankan pada corak Islam yang *rahmatanlilaalamin* dan seterusnya. Selain tentu agenda-agenda yang terkait dengan tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, kemudian lalu terkait dengan pentingnya pengangkatan dosen-dosen non PNS dalam rangka memenuhi terhadap kebutuhan, ketercukupan dari program-program studi di perguruan tinggi agama, selain tentu juga peningkatan akreditasi (PTKN) yang sangat dipentingkan saat ini.

Kita tahu, baru ada tiga Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negeri (PTKIN) kita yang terakreditasi A, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, UIN Malang, UIN Jogjakarta dan sebagian besar sudah B akreditasi institusinya dan C, dan tentu ke depan harus kita perkuat supaya yang sudah B bagus lalu tentu bisa terakreditasi A. Nah ini Saya rasa sesuatu yang sangat penting yang juga menjadi bahan agenda dan diskusi, juga terkait dengan bagaimana meningkatkan terhadap kualitas perguruan tinggi kita yang baru berubah dari STAIN ke IAIN, dari IAIN ke UIN dan sebagainya. Ini salah satu agenda-agenda yang penting dibahas.

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan program-program pelayanan agama dan keagamaan, terkait dengan program layanan kehidupan umat beragama. Ini yang kemarin didiskusikan seluruh para Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat agama-agama ada dirjen Bimas Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu yang semua di dalam diskusi mengenai bagaimana peningkatan pelayanan terhadap kehidupan beragama termasuk juga pelayanan haji, dan semuanya itu dalam satu komunitas tersendiri.

Oleh karena itu, menurut Saya, di dalam peningkatan kerukunan umat beragama ini lalu menjadi isu penting adalah bagaimana supaya kedepan indonesia ini menjadi laboratorium bagi kerukunan umat beragama. Itu saya rasa

menjadi salah satu dari tujuan yang kita inginkan di tahun 2016 ini. Kemudian juga ada beberapa isu yang Saya rasa menarik, misalnya persoalan terorisme dan pornografi. Itu semua menjadi bahasan-bahasan di dalam sidang komisi di acara rakernas, dan tentu sudah menghasilkan beberapa program yang ke depan diharapkan lebih baik.

Ada hal yang menurut Saya menarik di dalam rakernas yang baru kita selenggarakan kemarin ini, kalau biasanya di dalam rakernas yang penting ketemu dan kemudian rekomendasinya juga tidak semenggigit seperti yang barusan ini. Misalnya di dalam sidang komisi, dipaparkan masalahnya apa, penyelesaiannya seperti apa, hambatannya seperti apa dan hasil akhir yang diinginkan seperti apa.

Selanjutnya, dibuat dalam satu matrik yang dengan matrik itu, kita tahu ini masalah kepegawaian, lalu ini masalah dalam struktur Kementerian Agama, ini masalah dalam bidang keuangan, ini masalah dalam bidang haji, ini masalah kerukunan umat beragama, ini masalah pelayanan KUA, dan semua dituangkan dalam dalam satu matrik, sehingga kita lebih mudah. Ada hambatan semacam ini, lalu ada rencana aksi penyelesaian seperti apa, kemudian siapa yang bertanggungjawab, dan seterusnya. Jadi Saya nilai, rakernas kemarin ada satu kemajuan yang luar biasa dalam raker itu, karena kita bisa memetakan problem-problem kita selama ini dan kemudian bagaimana kita membangun rencana aksi yang menyelesaikannya.

Rakernas menghasilkan sejumlah poin penting, apa tindak lanjut dari sekian persoalan yang menjadi rekomendasi, apakah ada evaluasi sehingga apa yang menjadi target tercapai?

Di dalam acara penutupan rakernas itu, Saya ingatkan, rakernas ini dilakukan dalam waktu berjalan, sedangkan RKKL sudah diputuskan setahun sebelumnya, jadi ini ada dua hal yang harus diperhatikan, bisa jadi bahwa hasil rakerns ini adalah merupakan sesuatu yang tidak persis sama dengan RKKL yang sudah kita rumuskan satu tahun sebelumnya, maka kemudian mereka Saya ingatkan agar jika kemudian program-program baru yang luar biasa dan itu relevan sesuai dengan Visi Misi Presiden, bisa menjadi *Quick Wins* Kementerian Agama itu suatu program yang sangat unggulan, maka sudah Saya ingatkan agar mereka segera melakukan revisi-revisi agar program-program yang dimiliki sebelumnya RKKL sehingga program yang unggulan tadi itu lalu bisa kita masukan ke dalam RKKL.

Karena bisa jadi, di tahun 2015 itu belum kita prediksi sesuatu yang penting. Contoh sederhana LGBT, LGBT itu menjadi fenomena menarik di 2016 tidak menjadi fenomena menarik di 2015, kalau misalnya dianggap bahwa urusan LGBT ini bagian dari tugas Kementerian Agama dan itu menjadi tuntutan masyarakat yang luar biasa mengenai bagaimana menangani LGBT, maka tidak ada salahnya kalau kemudian ada beberapa program yang kemudian bisa direvisi terkait sehingga bisa kita melakukan aksi untuk menangani persoalan LGBT dan isu lainnya. Jadi ada program-program yang Saya rasa tidak diprediksi di tahun 2015 untuk program 2016 dan itu ternyata ada di tahun 2016. Maka dengan sangat terbuka, kita harus melakukan revisi-revisi anggaran kita dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang terjadi di tahun 2016.

Jadi ada program jangka panjang, tentu ada program jangka panjang yang harus dimulai dari sekarang misalnya mengenai reristribusi pegawai, kenapa ini harus dipikirkan? Karena tentu ada dampak kepegawaian yang terjadi kalau tidak ditangani secara jelas. Satu contoh yang saya rasa dijadikan sebagai bahan diskusi dan perbincangan adalah misalnya di Pulau Jawa ini di KUA-KUA itu sudah *overcapacity* pegawai tapi sementara di luar Jawa itu sangat kekurangan.

Jadi kalau kita melakukan pengadaan terhadap pegawai KUA itu dilihat dari sisi ketercukupan dan lain sebagainya harus dianalisis dengan sangat kuat. Kalau ini tidak dilakukan redisribusi akan berakibat terhadap ketidakcukupan beban kerja, jadi beban kerjanya sedikit harus diambil banyak orang, sehingga memungkinkan orang per orang lalu itu tidak bisa memenuhi terhadap beban kerja yang sesuai dengan tunjangan kinerjanya.

Dan ini bila terus menerus dibiarkan, nanti bisa menjadi masalah, lalu menjadi temuan yang bersangkutan dibayarkan sesuai dengan kinerjanya sementara tidak memenuhi standar tercapaian kinerja atau standar beban kerjanya. Nah, ini harus dilakukan dalam tanda petik bisa redestribusi bisa dalam tanda petik mungkin ada hal-hal baru yang harus di bebankan kepada mereka. Oleh karena itu, Saya sudah meminta kepada Kepala Biro Ortala untuk merumuskan naskah ademik yang kaitannya dengan penambahan jabatan fungsional hal tertentu misalnya zakat dan wakaf, atau ada jabatan-jabatan tertentu yang kemudian bisa relevan dengan tuntutan kebutuhan sekarang misalnya tadi saya nyatakan contoh mengenai Jabatan Fungional Tertentu (JFT), mengenai penyuluh zakat dan wakaf sekarang menjadi kebutuhan yang luar biasa.

Ada banyak problem wakaf yang belum terselesaikan, ada problem zakat yang tidak optimal. Saya rasa perlu ada sentuhan negara di situ, dan kenapa misalnya orang-orang yang kemudian berada di KUA-KUA, di awal tidak diarahkan kesana, jadi kita tidak serta merta misalnya memangkas atau kemudian memindahkan, Saya rasa tidak, tapi yang bisa kita lakukan adalah mereka berada dalam satu struktur yang memungkinkan dia memenuhi beban tugasnya, beban jabatannya dan kemudian mereka bisa menerima tunjangan kinerja sesuai dengan beban kerja dan capaian kinerja yang dilakukan.

Ini saya rasa harus di mulai, sebab kalau tidak, akan menjadi beban di tahun-tahun berikutnya. Makanya, tadi saya sebutkan, kita tidak bukan langkah revolusioner dengan mem-pangkas, memindahkan bahkan tenaga honorer kita pangkas habis, Saya rasa tidak, tetapi menggunakan pola-pola evolusioner perlahan tetapi pasti, ada jaminan bagi mereka, dan itu lebih bijaksana.

Tahun 2015 tahun pondasi, kemudian Kementerian Agama sama-sama mendeklarasi tahun 2016 sebagai tahun kerja yang bersih melayani dan telah disampaikan. Salah satu isu yang mencuat peningkatan pelayanan, kira-kira rencana strategis di tahun 2016 adalah konteks peningkatan pelayanan seperti apa?

Tema kita dan Saya rasa sudah menjadi bahan yang secara umum telah diketahui publik, kita ingin agar Kementerian Agama ini semakin bersih dan semakin melayani, dan ini dua hal yang Saya rasa penting. Kementerian

SEKJEN KEMENAG NUR SYAM MENDAMPINGI MENAG LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN KETIKA MEMBUKA RESMI RAKERNAS KEMENAG TAHUN 2016 DI JAKARTA, 29 FEBRUARI 2016

Agama yang bersih itu tentu adalah Kementerian Agama yang semakin sedikit korupsi, kolusi dan nepotisme, semakin transparan, semakin akuntabel dan itu saya rasa sudah kita mulai di tahun 2015 itu dengan zona integritas, implementasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih, dan itu yang Saya rasa menjadi dasar kita di tahun 2016 semakin meningkatkan yang semacam ini.

Kita ingin agar untuk menjadi birokrasi yang bersih itu tidak hanya lalu kita bebankan seluruhnya itu pada integritas seorang direktur jenderal, misalnya. Karena untuk menjadi bersih dan melayani tentu ada pada kapasitas semua di antara kita, itu yang penting. Jadi oleh karena itu, semuanya harus mengarah ke sana, harus membangun zona integritas itu, harus membangun wilayah bebas korupsi, harus menjadi birokrasi yang bersih dan melayani dan itu Saya rasa ada pada semua elemen di dalam setiap diri kita dan itu yang harus kita lakukan.

Kemudian yang kedua, kita tentu harus semakin melayani isu sekarang, misalnya haji. Ini yang luar biasa, karena persoalan haji ini persoalan yang paling seksi di Kementerian Agama. Di tahun 2016 itu kita sudah meletakkan pelayanan itu sebagai sesuatu yang sangat mendasar dan kita sudah melakukan secara optimum mengenai pelayanan. Tetapi begitu pelayanan kita semakin baik, orang dilayani saja tidak cukup, tetapi orang ingin justru (ada) perlindungan. Jadi artinya, bahwa ketika pelayanan kita sudah optimum, hotel sudah bagus, katering bagus, informasi baik, dalam kata lain kita sudah memberikan pelayanan optimal itu tidak cukup, orang justru berpikir supaya Kementerian Agama lebih melindungi, jadi isunya berkembang menjadi isu perlindungan terhadap jamaah haji, dan inilah yang saya sebut bahwa tuntutan masyarakat itu semakin lama semakin tinggi, maka kita juga harus memberikan yang lebih tinggi pula, jangan sampai kita berhenti disitu bahkan kita harus melindungi.

Kementerian Agama sudah melakukan hal semacam itu, bagaimana kita memberikan perlindungan jemaah haji kita misalnya melalui perangkat *Global Position System* (GPS) untuk mendeteksi di mana jamaah haji kita dan seterusnya, dan ini Saya rasa adalah bagian-bagian yang Saya sebut sebagai pengembangan. Tetapi pelayanan sendiri juga ada standarnya, apa sih yang kita jadikan sebagai standar bahwa pelayanan kita sudah optimal?

Maka, menurut Saya, tahun 2016 ini harus ada satu survei kepuasan pelayanan Kemenag , dan saya sudah melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di Badan Pusat Statistik (BPS) kita sudah lakukan pembicaraan-pembicaraan, bahwa tahun ini kita harus menyelenggarakan survei mengenai kepuasan pelayanan Kemenag. Maksud Saya biar kita mempunyai ukuran, tahun ini kita (targetkan) prosentasi terukur terkait pelayanan, tahun depan harus meningkat dan seterusnya.

Sama halnya dengan survei mengenai indeks persepsi korupsi, semakin lama harus semakin membaik, semakin rendah indeks persepsi korupsi sama halnya juga dengan laporan akuntabilitas kinerja itu kan juga semakin tahun semakin bagus. Tahun 2015 sudah kita letakkan pondasi Kemenag memperoleh penilaian yang baik dengan angka rata-rata 62.1 %. Tahun 2016 harus semakin bagus dan itu kita pantau dengan standar minimal 70 tidak boleh kurang. Inilah caranya yang harus kita bicarakan dengan mencermati manajeman kinerja kita ini, apakah manajemen kinerja kita semakin baik ke depannya tentu yang harus kita lakukan

Rencana survei kepuasan pelayanan Kementerian Agama oleh BPS sendiri kapan akan dilakukan ?

(Survei) mungkin akan kita lakukan sekitar akhir tahun (2016), dan tentu akan kita bicarakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendasar di mana. Misalnya, anggaran kita paling besar ada di pendidikan itu tahun lalu, dan pendidikan termasuk diantara yang prioritas untuk kita survei apakah siswa kita puas dengan pelayanan madrasah-madrasah kita. Apakah orang tua santri semakin puas dengan pelayanan pesantren kita, kemudian di perguruan tinggi dan seterusnya. Itu mungkin salah satu di antara yang akan kami prioritaskan selain tentu pelayanan secara umum, pelayanan administrasi. Jadi secara umum, adalah administrasi kita itu (masyarakat) puas dengan yang kita lakukan disini, apakah itu pelanggan internal maupun eksternal, dan itu Saya ingin dimulai tahun 2016 ini. [ ]

GRAND SYEKH AL-AZHAR, PROF. DR. AHMAD MUHAMMAD AHMAD AT- THAYYEB DALAM LAWATANNYA KE INDONESIA SELAIN MEMPERERAT JALINAN HUBUNGAN KEDUA NEGARA JUGA DALAM RANGKA MENEGUHKAN PRINSIP-PRINSIP DAN SIKAP MODERATISME DALAM ISLAM.

KUNJUNGAN GRAND SYEKH AL-AZHAR

PROF. DR. AHMAD MUHAMM AD AHMAD AT- THAYYEB

IKHTIAR MEMBUMIKAN MODERATISME ISLAM

Selama satu minggu, Grand Syeikh Al-Azhar (GSA) melakukan kunjungan di pelbagai tempat di Indonesia, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Majelis Ulama Indonesia, serta memberikan ceramah umum di beberapa kampus. Untuk merekam seluruh aktivitas GSA selama kunjungannya di Indonesia, Humas Kementerian Agama membentuk Tim Reportase khusus yang bekerja mendokumentasikan aktivitas GSA dalam bentuk foto, video dan tulisan yang selanjutnya menjadi bahan berita di portal berita www.kemenag.go.id. Tim tersebut ikut serta mendampingi GSA dan Menteri Agama di setiap titik lokasi yang menjadi tujuan GSA.

Sebagaimana diketahui, kiprah Grand Syeikh membangun sinergi dalam memperluas jejaring dan memperjuangkan Islam moderat di dunia begitu besar. Sebagai Ulama moderat dan menyerukan ukhuwah (persatuan), kedatangannya Grand Syekh Al-Azhar di Indonesia tentu memiliki beberapa dampak positif. Kondisi dunia Islam yang sedang menghadapi tantangan radikalisme dan kekerasan yang telah menghancurkan peradaban, barangkali dapat ditemukan jalan keluar dari khazanah pemikiran Grand Syekh yang disampaikan dibeberapa tempat di Indonesia.

***

Grand Syekh Al-Azhar tiba di Bandara

PRESIDEN JOKOW WIDODO MENYAMBUT KEDATANGAN GRAND SYEKH AL-AZHAR DI ISTANA NEGARA JAKARTA, SABTU, 21 FEBRUARI 2016

Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, 21 Februari 2016 malam. Kedatangan Syekh Ath-Thayyeb disambut langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.Ikut menyambut kedatangan Syekh Ath-Thayyeb beserta Majelis Hukama dan beberapa wartawan asing, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Bahaa Dessouki, Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi, dan tokoh ulama Quraish Shihab.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berharap Grand Syekh Al-Azhar dapat melihat langsung kehidupan beragama masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dan nantinya bisa menyampaikan model Islam di Indonesia kepada dunia internasional. "Mudah-mudahan beliau bisa berbicara di dunia internasional bahwa Islam yang berkembang di Indonesia bisa jadi model bagi umat Islam di dunia dalam ikut membangun peradaban di dunia ini," kata Menag Lukman.

Menag mengaku, umat Islam Indonesia berkepentingan dengan kedatangan Syaikh Ath-Thayyeb. Sebab, Grand Syekh adalah salah satu tokoh umat Islam dunia yang dikenal senantiasa menyuarakan faham Islam moderat, Islam *rahmatan lilalamin*, sehingga diharapkan dapat meredam faham-faham radikal yang mengatasnamakan agama. Faham demikian telah menjadi penyumbat sumbu persatuan dan kesatuan bangsa yang kemudian secara perlahan memancing untuk saling membenci, mengedepankan emosi, dan saling mencaci-maki. "Beliau akan berbicara di berbagai forum perguruan tinggi, pondok pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan akan ada pertemuan khusus dengan Majelis Hukama yang juga terdiri dari tokoh-tokoh Islam dunia," kata Menag.

Perbedaan Itu Rahmat

Senin, 22 Februari 2016, Grand Syekh Al-Azhar diterima Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.Selain Presiden Jokowi, kedatangan Grand Syekh Al-Azhar juga disambut oleh para menteri Kabinet Kerja. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Grand Syekh Al Azhar dan para menteri berlangsung tertutup.Usai pertemuan, Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir memberikan keterangan bahwa kedatangan Grand Syaikh Al-Azhar di Indonesia mempunyai beberapa agenda, termasuk untuk membumikan moderatisme Islam di Indonesia. Disampaikan Fachir, Al Azhar merupakan Perguruan Tinggi Islam yang sangat terkenal di Indonesia. Al-Azhar tidak sedikit menarik mahasiswa Indonesia. Saat ini saja tercatat lebih dari 3500 mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Al-Azhar. "Al-Ahar banyak melahirkan tokoh-tokoh luar biasa di Indonesia hingga sekarang ini. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya datang ke Indonesia," kata Fachir.

Mewakili Presiden Jokowi, Fachir mengucapkan terimakasihnya kepada Grand Syekh Al-Azhar yang telah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Indonesia. Al- Azhar adalah Perguruan Tinggi yang sangat moderat, samaseperti perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki tolorerasi dan moderasi yang cukup baik. Bahkan, Presiden memberikan apresiasinya, telah membangun dan sudah meresmikan empat gedung asrama Mahasiswa di Mesir yang dapat juga diperuntukkan bagi mahasiswa asing lainnya.

Mantan Menlu Alwi Shihab yang juga hadir dalam pertemuan itu menyampaikan harapannya kepada Grand Syekh Al-Azhar, agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim Indonesia, dan membimbing mahasiswa Indoensia di Mesir untuk menyebarkan kembali Islam yang jauh dari ekstrimisme dan jauh dari kekerasan. Pihak istana negara mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara persatuan diatas keberagaman karena keberagaman sejatinya adalah rahmat.

GRAND SYEKH AL-AZHAR MENYAMPAIKAN ORASI ILMIAH PADA PENGANUGRAHAN DOKTOR HONORIS CAUSA DARI UIN MALANG, SELASA, 23 FEBRUARI 2016

Ditambahkan Alwi, Presiden juga mengucapkan terimakasih kepada Al-Azhar karena selain memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia, juga telah mengutus ulama setiap tahunnya. "Tahun ini saja, ada 30 dai dari Al-Azhar datang ke Indonesia untuk memberikan pendidikan di

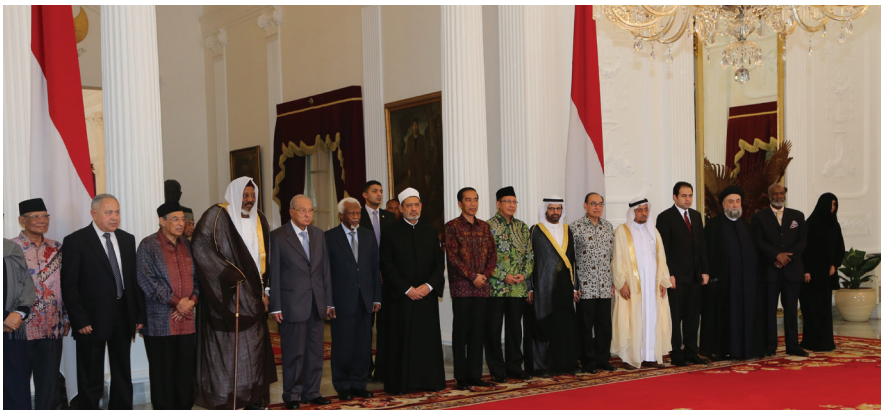

PRESIDEN JOKOWI DAN GRAND SYEKH AL-AZHAR BERFOTO BERSAMA DI ISTANA NEGARA JAKARTA, SELASA, 23 FEBRUARI 2016

Indonesia. Pertemuan ini cukup baik dan bermanfaat," kata Alwi Shihab.

Pertemuan dengan Presiden menjadi penting karena Mesir dan Indonesia masing-masing menjadi negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Indonesia dan Mesir memiliki keterhubungan historis dalam poros keislaman. Hubungan Mesir dan Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang. Para ulama' dari kedua negara pernah terjalin jaringan intelektual yang intensif dalam hubungan guru-murid sejak abad ke-19. Bahkan, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1945, di saat negara-negara Eropa mengingkari kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.

Indonesia di dunia Internasional selama ini dianggap menjadi teladan dalam pengelolaan keberagaman. Grand Syekh Al Azhar memuji Indonesia yang mampu menjaga harmoni dalam perbedaan. Menurutnya, Indonesia berhasil mengelola perbedaan pandangan keagamaan dan itu tidak terlepas dari peran para ulama.

"Itu tidak terlepas dari kiprah para ulama yang dapat bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. *Ikhtilaf* (perbedaan) adalah rahmat," terang Syekh Ath-Thayeb dalam pertemuan dengan sejumlah ulama dan tokoh cendekiawan Muslim di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Senin, 22 Februari 2016. Hadir juga dalam kesempatan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Dubes negara sahabat.

Menurut Syekh Ath-Thayeb yang juga Ketua Majelis Hukama, perbedaan merupakan *sunnatullah*. Perbedaan dalam Islam bahkan sudah terjadi sejak zaman Nabi. Syekh Ath-Thayeb lalu mencontohkan tentang salat. Menurutnya, para Sahabat belajar salat dari Rasulullah Saw. Namun, faktanya ada beberapa perbedaan kaifiyat (tata cara) salat yang sampai kepada umat Muhammad. "Untuk yang *syar'i* (prinsip) tidak ada perbedaan. Tapi untuk yang *furu'iyah* (cabang-cabang keagamaan) terjadi perbedaan pendapat," terangnya.

Perbedaan itu, lanjut Grand Syekh, mulai dari mengangkat kedua tangan saat takbiratul ikhram. Ada pendapat yang hanya sampai depan dada, ada yang berpendapat sampai dua telinga. Demikian juga perbedaan dalam bacaan Al-Fatihah, Maliki tidak didahului basmalah, sementara Syafii harus. Terkait hal ini, Grand Syekh menghargai peran MUI yang dapat menghimpun banyak ulama dari beragam ormas dan pemikiran yang berbeda. Menurutnya, MUI menjadi modal besar bagi upaya menyatukan umat Islam dan memberikan penyadaran kepada umat Islam agar tidak mudah terprovokasi. Grand Syekh menegaskan bahwa perbedaan para ulama adalah rahmat. "Yasurruni an yakhtalifa ashhabu Rasulillah (perbedaan di antara sahabat Rasulullah menyenangkan buatku)," tutur Syekh Ath-Thayeb mengutip pernyataan Malik bin Abdul Aziz.

Dalam keragaman pandangan dan pemahaman, Grand Syekh mengingatkan bahwa umat Islam tidak boleh terjebak pada klaim kebenaran. "La taqul ana wahdy ash-shahih waghairii khatha'un (Janganlah kamu mengatakan hanya saya saja yang benar, lainnya salah)," tegas Syekh Ath-Thayeb sembari menyampaikan harapannya agar MUI dapat menjelaskan cara pandang dalam menyikapi perbedaan ini kepada umat Islam di Indonesia.

Sunny & Syiah Bersaudara

Grand Syekh Al Azhar mengatakan bahwa umat Islam yang berakidah Ahlussunah bersaudara dengan umat Islam dari golongan Syiah. "Sunny dan syiah adalah saudara," terang Syekh Ath-Thayyeb saat dimintai pandangannya oleh Dirjen Bimas Islam Machasin terkait permasalahan Sunny dan Syiah. Menurut Syekh Ath-Thayyeb, Islam mempunyai definisi yang jelas. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, berpuasa, berzakat, dan beribadah haji bagi yang mampu. "Mereka yang melaksanakan lima hal pokok ini maka dia muslim. Kecuali mereka yang mendustakan," tegasnya.

Grand Syekh menilai bahwa tidak ada masalah prinsip yang menyebabkan kaum Syiah keluar dari Islam. Bahkan, banyak ajaran Syiah yang dekat dengan pemahaman Sunny. Perbedaan antara Sunny dan Syiah dalam pandangan Syekh Thayyeb hanya pada masalah imamiah. "Syiah mengatakan imamiah bagian dari Ushuluddin, kita mengatakan sebagai masalah furu," terangnya."Kalau kita membaca kitab-kitab Syiah yang lama, mereka secara umum menghormati para sahabat," tambahnya lagi. Grand Syekh berharap, para kaum Muslimin mempelajari dengan sungguh-sungguh pemikiran al-Asy'ariyah dan Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai bekal untuk beragama, beritual dan bermasyarakat.

Grand Syekh sendiri merupakan pemimpin dari Majelis yang selalu mengirim pesan perdamaian ke seluruh penjuru dunia; tidak hanya kepada para kaum Muslimin, tapi seluruh umat manusia.

Promosi Pendidikan Islam Moderat

Grand Syeikh al-Azhar Mesir, Prof Dr Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb selama di Indonesia juga melakukan serangkaian agenda dalam rangka penguatan pendidikan. Selasa, 23 Februari 2016, di aula Harun Nasution

TIM LIPUTAN | **PENGARAH :** RUDI SUBIYANTORO (KAPINMAS) | **KOORDINATOR :** ROSIDIN (KABID HUMAS) | **PENULIS** : MOH. KHOERON, IWAN SUPRIYADI, WILDAN HEFNI, DODO MURTADO, ARIEF EFENDI, PUJIYANTO | **FOTOGRAFER DAN VIDEO :** BOY AZHAR, ROMADANIL, SUGITO, SYAMSUDDIN, SANDI.

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Grand Syekh memberikan kuliah umum ditengah-tengah alumni Al-Azhar dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah. Dalam pidatonya, Grand Syekh mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah mampu menyingkap khazanah keilsaman yang suci serta nilai-nilai hukum Islam dan akhlaknya dengan mewujudkan nilai keadilan, persamaan,

GRAND SYEKH AL-AZHAR SAAT BERTEMU DENGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SENIN, 22 FEBRUARI 2016

moderatisme, toleransi, dan inklusifitas.

"Bangsa Indonesia telah mampu membantah bohongnya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam bahwa Islam adalah agama kemalasan dan tidak produktif sehingga masyarakatnya tidak maju. Namun, saat ini, dengan modal sosial dan ilmu pengetahuan yang ada, serta sikap yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, Indonesia menjadi model negara Muslim yang dapat dibanggakan oleh umat Islam dunia", tegas Grand Syekh.

Setelah dari UIN Syarif Hidayatullah, Grand Syekh meresmikan gedung baru Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) di Kota Tangerang Selatan. Selain meresmikan, pimpinan tertinggi Universitas al-Azhar Mesir tersebut juga memberi nama PSQ dengan nama Al-Azhar. Grand Syekh berharap, selain menjadi pusat studi al-Qur'an, PSQ dapat menggali Islam yang Rahmatan lil'alamin dan Islam yang moderat, dengan merujuk pada metodologi yang selama ini telah dipakai dan pelajari. Dalam kesempatan tersebut, ikut hadir para anggota Majelis Hukama' al-Muslimin yang beranggotakan 13 orang dari seluruh penjuru dunia. Dari 13 anggota tersebut, salah satu nya berasal dari Indonesia, yaitu Quraish Shihab.

Rabu, 24 Februari 2016, Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Thayyib menerima gelar Doctor Honoris Causa (HC) dalam bidang Pendidikan Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Upacara penganugerahan gelar kehormatan ini berlangsung hikmat pada sidang senat terbuka di Auditorium Gedung Rektorat UIN Maliki Malang. Menurut Alwi, Grand Syeikh telah berhasil mengembangkan toleransi atas dasar kasih sayang. Atas dasar itu, selaku promotor Prof. Dr. Alwi Shihab, bersama Prof. Dr. Machasin, dan Prof. Baharuddin, mendukung dan memperkuat keputusan senat UIN Maliki Malang untuk menganugerahkan gelar doktor ini. "Kita berharap, penganugerahan ini memperkuat niat Grand Syeikh dalam menebarkan perdamaian. Ini perlu dikembangkan di Indonesia agar ini bisa menginspirasi ruang Islam di masa mendatang dengan tantangan global yang semakin kompleks," papar Alwi Shihab.

Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Prof Dr Mudjia Raharjo M. Si mengatakan penghargaan akademik itu diberikan kepada Grand Syekh yang merupakan salah satu dari 500 orang terpenting di dunia. "Ini sebagai apresiasi atas jasanya. Terutama dalam pengembangan Islam moderat yang mengayomi semua golongan. Grand Syeikh Al Azhar merupakan sosok yang menginspirasi dalam tugas mengembangkan dan merawat cendekiawan Muslim. Selain itu, Syekh Ath-Tahyeb juga merupakan ulama besar yang disegani, intelektual muslim yang diakui dunia, serta tokoh yang selalu menyerukan kebenaran dan menebarkan kedamaian dunia" kata Mudjia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya berharap metode pendidikan dakwah di Universitas Al Azhar yang moderat dan toleran bisa dikembangkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Menag menilai, Grand Syekh Al Azhar yang juga Ketua Majelis Hukama al-Muslimin adalah sosok ulama *par-excellence* dan intelektual Muslim dunia penebar kedamaian. Sikap demikian itu ditunjukkan selama masa transisi politik di Mesir, di mana Syekh Ahmad ath-Tayyeb mengedepankan ishlah dan berusaha memediasi pihak-pihak yang berkonflik agar bersatu kembali demi kejayaan Mesir dan Islam.

Mengakhiri kunjungannya di Indonesia, Grand Syekh berkunjung ke Ponorogo untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga besar pondok modern Darussalam Gontor, sekaligus pembukaan perayaan 90 tahun pondok tersebut. Selain memberikan sambutan, Syekh Ahmad Ath-Thayeb juga meresmikan gedung Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. Dihadapan ribuan santri Pondok Modern Gontor, GSA menyampaikan beberapa pesan yang cukup tegas dan berani dalam mempromosikan Islam moderat ditengah-tengah ancaman radikalisme dan takfirisme di seluruh dunia.

Syekh Ahmad Ath-Thayeb lahir di Luxor-Mesir tahun 1946. Lulus sarjana pada tahun 1969, magister tahun 1971, dan doktor 1977 pada bidang Ilmu Filsafat Islam dan Teologi di Universitas Al Azhar Cairo. Grand Syeikh Al-Azhar mengawali karier akademiknya sebagai instruktur di Fakultas Teologi (1969), Dosen Teologi dan Filsafat (1972-1977). Dekan Fakultas Bahasa Arab dan Teologi Islam (1995-1999), Dekan Ushuluddin (1999-2000), dan Rektor Universitas Al Azhar (2003). Sejak 2010 hingga sekarang, Ahmad Ath-Thayeb diamanahi menjadi Grand Syekh Al Azhar.

GRAND SYEIKH AL-AZHAR

JADILAH PENYERU MANHAJ AL-WASATYY

"Saya berdiri di depan kalian dan saya melihat para siswa dan siswi berkumpul penuh di dalam gedung dan di luar untuk menyambut saya. Pemandangan seperti ini betul-betul melemahkan lisan dan perasaanku untuk mengungkapkan perasaan yang Saya pendam bagi kalian semua dari rasa cinta, penghormatan dan rindu. Inilah Al-Azhar yang diwakili oleh Syekh-nya, ulamanya dan Majlis Hukama'Al-Muslimin,"

Itulah ungkapan haru Grand Syeikh Al-Azhar (GSA) Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmad At-Thayyeb yang disampaikannya saat berkunjung ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kehadirannya di pondok yang berdiri tahun 1926 lalu ini, disambut hangat pimpinan pondok dan ribuan santri yang tegak berdiri membentuk pagar betis sepanjang jalan 1 KM menuju kampus pondok yang telah berusia 90 tahun. GSA didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wamenlu AM Fachir, anggota Wantimpres KH. Hasyim Muzadi, ketiganya merupakan alumni pondok tersebut, dan cendekiawan muslim Quraish Shihab.

Diungkapkan GSA, hubungan antara pondok ini atau Indonesia dengan Al-Azhar Al-Syarif, adalah hubungan yang telah lama. Sejarahnya kembali sejak tahun 50-an pada abad yang lalu atau bahkan sebelum itu. Dikisahkan GSA, dirinya pernah datang di sini10 tahun yang lalu tepatnya tahun 2006 ketika dirinya menjabat Rektor Universitas Al-Azhar bersama Wakil Rektor Al-Azhar, Prof. Dr. Abdul Fadhil. Dalam pandangan GSA, pondok ini telah memainkan peran penting dan utama dalam membentuk pola pikir moderat bagi para pemuda Indonesia. "Ini adalah peran yang sangat penting dan alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufik bagi para Pimpinan Pondok untuk menunaikan tugas yang sulit ini. Yaitu, tugas yang bahkan banyak negara Islam tidak mampu melaksanakannya sampai sekarang," ujarnya.

Pondok ini melihat masa depan yang jauh secara sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam dan memajukan kaum muslimin tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia Islam secara keseluruhan. Ia mengaku senang melihat Pondok ini menjadi miniatur dari Al-Azhar Al-Syarif dan berharap pondok ini terus berhubungan secara langsung dan intensif dengan Al-Azhar. "Hubungan antara Pondok ini dengan Al-Azhar harus terus berlangsung dan Al-Azhar harus memberikan perhatian yang sepantasnya kepada Pondok ini karena peran penting dan strategisnya," kata GSA.

GRAND SYEKH AL-AZHAR BERDIALOG DENGAN SANTRI PONDOK GONTOR SELASA, 23 FEBRUARI 2016

Dalam sejumlah pertemuannya, GSA berkomitmen memberikan 50 beasiswa untuk belajar di Al-Azhar bagi pelajar Indonesia, namun untuk pondok Gontor, ia mengkhususkan dengan 50 beasiswa sebagai tambahan. "Pintu-pintu universitas Al-Azhar terbuka untuk siswa-siswi Gontor," janjinya.

Kepada seluruh santri yang khusyu menyimak, GSA berpesan untuk menjaga *manhaj* (nilai-nilai) Al-Azhar. Mengutip apa yang disebutkan oleh Menteri Agama dalam sambutannya, GSA menjelaskan bahwa manhaj Al-Azhar adalah *manhaj al-wasatiyy* (moderat), manhaj yang terbuka dengan pihak lain. Menurutnya, mungkin saja kita berbeda pendapat dengan orang lain, tapi kita tetap menghormatinya. Kita tidak sendirian, bersama kaum muslimin di dunia ini umat lain, kita bersama penganut agama-agama yang lain, kaum ateis, penganut agama Hindu, Buddha dan lain-lain. "Kita tidak sendirian di alam semesta ini," tandas GSA.

GSA dalam pidotanya menekankan pentingnya dialog dan menjauh dari sikap fanatisme yang berlebihan dalam agama dan mahzab. Dalam berdakwah, GSA menandaskan agar cara dakwah yang digunakan adalah dakwah yang mengedepankan prinsip-prinsip hikmah dan *mau'idzah* sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-Nahl 16: 125. "Kalian adalah utusan dan penyeru *al-wasatiyyah*. Insya Allah kalian akan menjadi utusan di negeri ini yang sangat membutuhkan tekad dan usaha kalian, cita cita dan *manhaj* kalian. Manhaj al-wasatiyy adalah satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di umat sekarang dari perpecahan, pembunuhan dan peperangan. Manhaj inilah yang harus kita tanamkan kuat-kuat di jiwa dan pikiran anak-anak kita," seru GSA.

NYEPI DAN GMT, POTRET HARMONI DI BALI

FENOMENA GERHANA MATAHARI (GMT) YANG TERJADI PADA AWAL MARET LALU TERASA BERBEDA DAN MENJADI LEBIH ISTIMEWA KARENA BERTEPATAN DENGAN UMAT HINDU MERAYAKANHARI RAYA NYEPI TAHUN BARU SAKA 1938. DISEBUT ISTIMEWA KARENA PROSES NYEPI BAGI UMAT HINDU DAN SALAT GERHANA BAGI UMAT ISLAM BISA BERJALAN DENGAN LANCAR DAN HARMONI.

Di Rabu 9 Maret 2016 pagi, sementara umat Hindu di Bali merayakan tapa brata nyepi di rumahmasing-masing, umat Islam disunnahkan menjalankan salat gerhana di masjid atau mushalla sehubungan terjadinya fenomena gerhana matahari. Meski demikian, kedua prosesi ini berjalan dengan baik dan harmoni, karena kesadaran bertoleransi dari kedua belah pihak.

Potret harmoni dan toleransi ini salah satunya terlihat di Jalan Banteng Banjar Taman Sari Denpasar Utara. Saat umat Islam berangkat ke mushala terdekat untuk Shalat Gerhana Matahari, mereka diantar dan didampingi Pecalang (petugas desa adat) setempat. Kedua belah pihak bahkan tampak akrab saat kedua tangannya saling jabat.

Nuansa keistimewaan hari ini bahkan sudah terasa sejak beberapa hari sebelumnya, ketika sejumlah tokoh berkumpul dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga Keagamaan dan Instansi terkait pada Selasa 16 Februari 2016 lalu. Saat itu, para tokoh berkumpul untuk berembug tentang hal terbaik yang perlu dilakukan untuk menjaga harmoni dalam keragaman. Hasilnya, Seruan Bersama Majelis-Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali digaungkan, bahwa umat beragama harus ikut menjaga kesucian rangkaian pelaksanaan Nyepi. Umat Islam yang akan melaksanakan Shalat Gerhana Matahari, agar menyesuaikan dengan suasana Nyepi.

Dari seruan bersama itu, umat Islam yang akan melaksanakan Shalat Gerhana Matahari lalu berkoordinasi dengan Pecalang. Umat Islam melaksanakan Shalat Gerhana di musholla atau masjid terdekat, berjalan kaki alias tidak berkendara. Pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi pun berjalan khidmat, sebagaimana kekhidmatan umat Islam menjalankan shalat. Ini menunjukkan betapa toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama di Bali terjaga kuat.

Selain di mushalla Jalan Banteng Banjar Taman Sari Denpasar Utara, Shalat Gerhana Matahari juga dilaksanakan di beberapa titik, antara lain: Masjid Al Hikmah Denpasar Timur, Masjid Baiturrahman Desa Wanasari Dauh Puri Kaja Denpasar, dan Masjid Nurul Huda Tuban Badung.

Sania

SEMINAR ANTI KORUPSI DWP KEMENAG DAN KPK

YANG PEREMPUAN, YANG ANTI KORUPSI

AL-MAR'ATU 'IMAADUL-BILAAD. IDZAA SHALUHAT, SHALUHATIL BILAAD. IDZAA FASADAT, FASADATIL BILAAD. WANITA ADALAH TIANG NEGARA. BAIK WANITANYA, BAIK PULA NEGARANYA. RUSAK WANITANYA, RUSAK PULA NEGARANYA.

Ada yang berbeda di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada Selasa, 1 Maret 2016 pagi itu. Tempat bekerja para pengawas internal kementerian yang bermotto Ikhlas Beramal ini terlihat lebih ramai dari biasanya. Sebuah tulisan banner "Saya Perempuan Kementerian Agama Anti Korupsi" tegas tertera menjadi pembeda saat itu selain penghadir yang rata-rata didominasi perempuan . Pagi yang cerah, di kantor Itjen yang terletak di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Itjen Kemenag berkumpul untuk menegaskan komitmen bersama bahwa "Saya Perempuan Kementerian Agama Anti Korupsi."

Bekerjasama dengan *Australia-Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) dan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DWP Itjen menggelar seminar anti korupsi dengan mengangkat tema "Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan". Lebih dari 100 perempuan, tidak hanya keluarga besar DWP Kemenag Pusat tapi bahkan 26 DWP Kanwil Kemenag Provinsi, hadir untuk niat bersama ikut menjadi "tiang" terbaik bagi kemajuan negara. Gerakan ini terasa lebih monumental, mengingat Kementerian Agama menjadi yang pertama dari seluruh kementerian dan lembaga negara lainnya yang didatangi oleh SPAK untuk bersama-sama meneguhkan komitmen anti korupsinya.

Sebagai bentuk dukungan dari gerakan revolusioner ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua KPK Laode Moh. Syarif, Irjen Kemenag M. Jasin, perwakilan Dubes Australia Lucia Pietropaoli, dan Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati Iskak, hadir di antara mereka. Tampak juga Ketua Dewan Pembina DWP Kemenag pusat Trisna Willy Lukman dan Ketua DWP Kemenag pusat Endah Nur Syam.

"Dengan kegiatan ini, kami berharap kita sebagai perempuan dapat memiliki alarm dalam diri untuk membedakan mana hitam mana putih sehingga tidak ada lagi daerah abu-abu dalam kerangka tindakan pemberantasan korupsi," kata Ketua DWP Itjen Kemenag, Ardiaz Fitra.

Istri Itjen Kemenag ini mengajak wanita Kementerian Agama untuk bersama-sama mengubah pola pikir dan perilaku menjadi perempuan yang lebih bersih dari segala macam tindak korupsi. Lebih dari itu, perempuan Kemenag juga harus memiliki keberanian untuk bertindak terhadap terjadinya tindakan perilaku koruptif sehingga dapat bahu membahu dalam gerakan anti korupsi. "Seminar ini menjadi salah satu pendukung terhadap lima nilai budaya kerja yang menjadi ikon Kemenag. Kami ingin berkontribusi terhadap keteladanan dalam pola hidup sederhana," tandasnya.

Hal senada disampaikan Irjen Kemenag M Jasin. Menurut mantan salah satu pimpinan KPK ini, perempuan mempunyai peran strategis dalam membentuk pola hidup keluarga, utamanya yang terkait dengan *mindset* dan gaya hidup."Basis integritas adalah perubahan mindset. Perubahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga dan kantor, baru masyarakat nasional dan internasional," terang M Jasin.

Menurut Jasin, istri adalah partner terdekat suami. Istri adalah sosok penting dalam keluarga yang dapat memberikan inspirasi, membisikan sesuatu, mengatur pola konsumsi, *lifestyle*, dan menerapkan nilai luhur kepada generasi berikutnya."Kalau *lifestyle* bisa dibatasi sesuai kemampuan suami, maka kita (para suami) bisa menghindari penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

M. Jasin meminta, setelah diterima di Kemenag pusat, kegiatan AIPJ dan SPAK juga disambut dengan baik di Kanwil provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota."Kegiatan ini jangan hanya berhenti pada seminar, tapi bergulir pada kegiatan seiring perubahan *mindset* dan *lifestyle* ibu-ibu agar suaminya berkinerja lebih baik. Dengan demikian, tunjangan kinerja suaminya juga akan naik," tegasnya.

Menguntungkan Perempuan

Pemberantasan korupsi akan menguntungkan kaum perempuan. Sebab, korupsi selama ini terbukti telah memperburuk ketidakseimbangan dalam masyarakat yang berdampak buruk bagi perempuan. Kekayaan negara yang dikorupsi menyebabkan minimnya ketersediaan anggaran publik bagi ibu hamil dan anggaran perbaikan angkutan publik yang ramah perempuan. Itulah kenapa keterlibatan perempuan penting

dalam pemberantasan korupsi.

"Gerakan keikutsertaan perempuan dalam pemberantasan korupsi harus didukung," tegas Perwakilan Duta Besar Australia Lucia Pietropaoli. Perempuan bukan sekedar korban korupsi, lebih dari itu, menurut Lucia, perempuan dapat memainkan perannya sebagai bagian penting dari solusi. Perempuan memiliki kekuatan peran dan status, mulai dari ibu rumah tangga maupun status sosial lainnya, yang bisa digerakkan untuk mencegah korupsi dan berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang transparan.

Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) diluncurkan oleh KPK dan Australia bertepatan dengan Hari Kartini tahun 2014. Menurut Lucia, sekarang sudah lebih dari 200 ribu orang di 10 provinsi yang telah mengikuti pelatihan untuk memahami bagaimana perempuan bisa memberantas korupsi, dari ibu rumah tangga sampai anggota parlemen. SPAK juga sudah memiliki lebih dari 499 agensi."Gerakan SPAK sudah masuk dunia media sosial. Logo SPAK juga sudah dilihat jutaan orang," terangnya.

Gayung bersambut, gerakan perempuan anti korupsi di Kementerian Agama mendapat dukungan penuh dari Menteri Agama Luman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Gerakan SPAK sangat strategis karena melibatkan kaum perempuan yang menduduki posisi strategis, bahkan sejak pada komunitas terkecil, inti, yaitu kekuarga. "Saya bukan perempuan. Tapi saya juga anti korupsi," tegas Menag.

Perang melawan korupsi harus didukung, karena korupsi merusak tatanan kehidupan. Korupsi menjadi penghalang terwujudnya kemasalahan dan kesejahteraan bangsa. Karenanya, Menag mengajak keluarga besar Kementerian Agama untuk menyadari signifikansi keberadaannya sebagai bagian penting dalam pemberantasan korupsi demi terciptanya kemasalahan yang menjadi salah satu inti ajaran agama. "Jadi, kita perangi korupsi karena sadar akan misi bagaimana kehidupan ini bisa lebih baik tanpa korupsi, karena sadar bahwa korupsi tingkat destruktifnya luar biasa," kata Menag.

Contoh Pemberantasan Korupsi

Optimisme akan peran penting Kementerian Agama dalam pemberantasan korupsi digaungkan oleh salah satu pimpinan KPK Laode Moh. Syarif. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Menag Lukman Hakim Saifuddin, serta dibantu Bapak Irjen dan aparatur lainnya, dia optimis Kemenag akan menjadi contoh bagi kementerian lain dalam pemberantasan korupsi.

Syarif mengatakan, Kementerian Agama adalah kementerian pertama yang didatangi oleh SPAK. Hal ini, tegas Syarif, tidak terlepas dari kepemimpinan Menag LHS dan Irjen yang terbuka dalam gerakan anti korupsi sehinga SPAK dapat diterima di Kemenag. Apalagi, internaslisasi integritas dan anti korupsi banyak didapat pada nilai-nilai keagamaan sehingga wajar kalau Kemenag menjadi tempat pertama bergulirnya SPAK. "Saya sangat berharap, SPAK bisa mengunjungi kementerian dan lembaga lain dan semoga bisa diterima dengan baik," ujarnya.

Syarif menyambut gembira perkembangan SPAK, dari yang sebelumnya hanya berupa program, kini telah berubah menjadi gerakan. "Saya, Pak Menteri, dan Pak Jasin tidak bisa menjadi anggota SPAK. Tapi kami sangat mendukung," katanya.

Kepada ratusan anggota DWP Kemenag, pusat dan daerah, dosen Universitas Hasanuddin ini berpesan bahwa untuk menjadi anggota SPAK, maka syarat utamanya adalah mencintai gerakan anti korupsi. "Kalau ibu-ibu menjadi agen SPAK, cintai dulu yang namanya anti korupsi. Untuk cinta, ada syaratnya. Jangan kita mengajarkan sesuatu tetapi kita melakukan yang berbeda dengan apa yang kita bicarakan," tegas Syarif.

Soal cinta anti korupsi, Syarif memberikan contoh sederhana. Menurutnya, langkah awal yang bisa dilakukan kaum ibu dalam mencintai gerakan anti korupsi adalah dengan menanyakan selisih pendapatan suami dari gaji yang semestinya, terlebih jumlahnya signifikan. "Misalnya, ibu tahu gaji suaminya adalah 10 juta. Sekali waktu Bapak memberikan lebih dari 10 juta. Mungkin jarang yang nanya karena takut bapaknya tersinggung. Tapi sudah saatnya untuk bisa memberikan pertanyaan. Apalagi jumlahnya signifikan," tutur Syarif.

"Jadi sebelum menjadi agen SPAK, menginternalisasi dulu apa yang merupakan nilai-nilai SPAK. Sebab kalau kita menceramahkan sesuatu yang tidak kita yakini, tidak sampai," imbuhnya.

Kepada Menag Lukman, Syarif berharap Kemenag dan KPK dapat bekerjasama dalam berbagai bidang pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pendidikan. Maklum, Kemenag membina ribuan lembaga pendidikan dengan jutaan peserta didik. Syarif memandang perlunya pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. "Kami sangat berharap. Saya terus terang optimis di bawah kepemimpinan Bapak Menag,Kemenag akan menjadi contoh bagi kementerian-kementerian yang lain. Semoga Tuhan memberkati," harapnya.

Moh Khoeron

WAKIL KETUA KPK LAODE M SYARIF

80 SEN, KETIKA INTEGRITAS BUKAN SEKEDAR KATA-KATA

GERAKAN ANTI KORUPSI HANYA AKAN MENJADI SEMBOYAN YANG DITERIAKKAN, HAMPA TANPA IMPLEMENTASI DAN PERWUJUDAN.

Internalisasi nilai-nilai anti korupsi, antara lain: kejujuran dan integritas, menjadi hal penting dalam gerakan anti korupsi. Tanpa nilai yang mendasari, perang melawan korupsi akan terhenti pada slogan yang cenderung membawa sesorang pada *split personality*. Gerakan anti korupsi hanya akan menjadi semboyan yang diteriakan, hampa tanpa implementasi dan perwujudan.

Banyak cara untuk menginternalisasi nilai, bisa melalui pendidikan, juga pengalaman kehidupan. Salah satu pimpinan KPK Laode M Syarif mempunyai pengalaman kecil yang justru membekas di hati dan mampu menggerakan dirinya untuk bisa menjadi penggiat anti korupsi.

Kisah inspiratif itu disampaikan Syarif di hadapan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama saat merilis Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di kantor Itjen Kementerian Agama, Selasa 1 Maret 2016.

"Waktu sekolah di Quensland, Australia, saya mempunyai seorang supervisor yang bernama Prof. Douglas Fisher. Setiap ada Disnatalis Fakultas, dosen dan mahasiswa, khususnya *International Student* diundang untuk makan malam. Pada saat itu semua tamu undangan memakai jas sehingga terlihat gagah, dan banyak yang membawa kamera, termasuk saya," demikian Syarif mengawali kisahnya yang terjadi pada sekitar tahun 1997 an.

Malam itu, Professor Fisher datang bersama istrinya. Setelah memotret beberapa moment, selaku mahasiswa, Syarif tidak lupa mengambil gambar supervisornya bersama sang istri. Awalnya, foto diambil saat keduanya duduk. Sadar kalau ada muridnya yang memotret, sang professor meminta Syarif untuk mengambil fotonya bersama istri dalam posisi berdiri.

Syarif kembali memotretnya. Selang dua hari, Syarif ke ruangan sang professor untuk memberikan dua foto hasil jepretannya. "Saya cetak di Fuji Film dengan ongkos sekitar 40 sen per foto untuk ukuran biasa, post card. Setelah saya lihat foto dia, saya masukan di amplop, ada dua lembar. Lalu saya pergi menemui Professor Fisher dan memberikan fotonya," tutur Syarif.

Melihat fotonya tercetak, Prof. Fisher mengaku senang lalu menanyakan ongkos cetaknya? Syarif mengaku waktu itu masih dosen muda dan karenanya merasa agak tersinggung dengan pertanyaan supervisornya. Maklum, ongkosnya hanya 80 sen untuk dua foto, kurang dari 1 Dollar Australia. "Saya bilang, *this is a gift*. Ini hadiah buat Bapak," katanya.

"Tidak. *You are my student*. Saya tidak bisa menerima hadiah dari student saya, saya bisa *conflict of interest,*" jawab sang professor.

Saya berkeras untuk tidak menerima uang darinya. Namun, hal sama juga ditunjukan gurunya. "*Ok. You take it if you don't take my money*. Ambil saja itu foto kalau kamu tidak ambil uang itu," kata pria kelahiran Muna, Buton ini menirukan perkataan supervisornya.

Saya pun mengambil uang 1 Dollar Australia yang disodorkannya. Sebelum berlalu, Prof. Fisher berkata, "Terima kasih *and you keep that change*, sisa 20 sen nya itu untuk kamu." Saya jawab, "Tidak. Saya akan kembalikan 20 sen." Sang Professor berkilah bahwa uang kembalian itu diambil saja karena Syarif adalah muridnya. Namun Syarif tak bergeming dan tegas berkata, "Tidak mau. Saya kembalikan sisanya sebesar 20 sen," tegasnya.

Kejadian ini menurut Syarif memberikan pelajaran penting bagi dirinya tentang kejujuran dan integritas. Kedua hal itu menurutnya tidak perlu banyak diceramahkan, tapi yang terpenting adalah dicontohkan.

"Saya yakin persis, kalau sebelum saya mengalami kejadian itu, kalau ada mahasiswa saya di Unhas akan memberikan foto dua, saya akan bilang terima kasih. Saya tidak akan bicara berapa ongkos cetak dua foto itu. Tapi itu mengajarkan saya dan membekas di hati saya," tegas Syarif.

Dari pengalaman itu, Syarif menilai bahwa mengajarkan integritas bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Karenanya, Syarif mengajak semua pihak untuk berkaca dan menilai diri. Mungkin selama ini kita sudah mengajari anak-anak kita akan kejujuran, tapi tingkah laku kita itu kadang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita ceramahkan.

"Nak, kalau ada telepon dari Ibu Mery, bilang ibu tidur yaa. Padahal sang bunda tidak tidur, tapi sedang nonton televisi. Mungkin karena tidak mau bicara dengan ibu Meri, lalu sang bunda meminta anaknya untuk mengatakan hal yang tidak sesuai faktanya. Dan itu contohnya banyak sekali," demikian tutur Syarif membuat ilustrasi sederhana. Sayangnya, tanpa disadari, hal seperti itu justru sering terjadi, padahal lebih membekas di hati generasi bangsa ini.

Moh Khoeron

KERJASAMA PENDIDIKAN AUSTRALIA INDONESIA

KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN MUTU MADRASAH

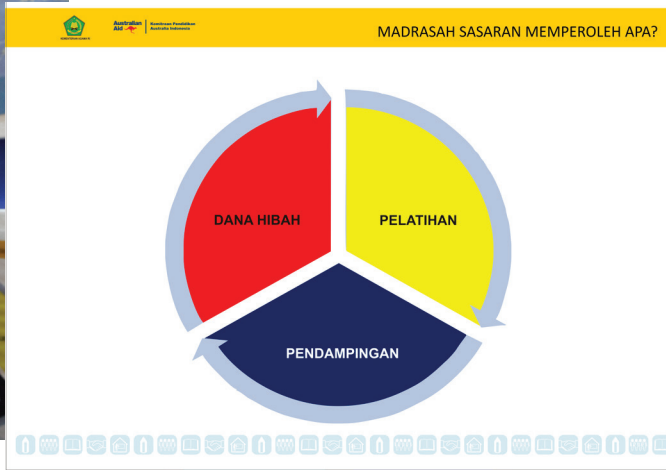

Bagi sebagian masyarakat, madrasah mungkin bukanlah pilihan pertama dan utama untuk mempercayakan putra-putrinya menimba ilmu dan mengasah otak demi masa depan. Hal ini tidak lain disebabkan asumsi bahwa proses pembelajaran berlangsung apa adanya, bangunannya hanya terbuat dari papan, gurunya tidak kompeten, alumninya susah bersaing masuk ke lembaga pendidikan favorit. Benarkah demikian? Barangkali gambaran seperti di atas menemukan pembenaran jika kita melihat profil madrasah tahun 90an.

Saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, madrasah mampu membuktikan bahwa lembaga pendidikan ini amat layak dijadikan pilihan dan memiliki potensi besar untuk bersaing dengan sekolah negeri. Implementasi Program kemitraan pendidikan Australia Indonesia komponen 3 menjadi salah satu bukti valid bahwa jika madrasah memperoleh asistensi yang semestinya, maka kualitasnya akan meningkat secara signifikan.

Program Kemitraan pendidikan Australia Indonesia komponen 3 merupakan kerja sama antara Australia dan Indonesia di bidang pendidikan yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Berdasarkan amanat regulasi, baik UU Sistem Pendidikan nasional maupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2009, setiap lembaga pendidikan diwajibkan untuk mengikuti proses akreditasi, yaitu penilaian terhadap kelayakansebuah lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan proses pendidikan (belajar mengajar). Ini berarti bahwa akreditasi merupakan parameter resmi untuk mengukur kualitas layanan pendidikan di lembaga pendidikan, termasuk madrasah.

Tritunggal

Sasaran program kemitraan ini berjumlah 1.500 madrasah swasta di 13 provinsiyang tersebar di 73 kota/ kabupaten dan terbagi dalam tiga tahap; tahap 1 sebanyak 565 madrasah, tahap 2 sejumlah 519, dan tahap 3 sejumlah 416 madrasah. Dukungan Program Kemitraan terhadap madrasah sasaran dikenal istilah tritunggal, karena setiap madrasah sasaran memperoleh dana hibah, pelatihan dan pendampingan. Dana hibah yang diterima madrasah sejumlah AU$ 10.000 atau senilai dengan Rp 100.000.000,00. Penggunaan dana ini harus sesuai dengan manual yang disusun C3, mempertimbangkan kebutuhan prioritas madrasah, dituangkan dalam rencana kerja madrasah (RKM/RKAM), sesuai dilaporkan sesuai dengan perencanaan.

Selain itu, madrasah juga dilibatkan dalam berbagai jenis pelatihan, baik pelatihan yang diselenggarakan oleh C3, lembaga mitra, maupun oleh madrasah sendiri.Setiap pelatihan ditentukan tagihannya sehingga target dan output yang direncanakan jelas. Pelatihan utama terdiri dari 7 modul yang diarahkan untuk memperkuat kualitas 8 standar pendidikan di masing-masing madrasah, dengan perkecualian

tidak untuk meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta bukan untuk pembangunan ruang kelas baru. Adapun jenis pelatihan dan arah penguatannya sebagaimana dalam table berikut:

No	Pelatihan	Standar Nasioal Pendidikan							
		Isi	Proses	SKL	PTK	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian
1	PME		X	X		X	X		
2	MBM (RKM)	X	X	X	X			X	X
3	Hidup Sehat	X	X	X		X	X		
4	KTSP – K13	X	X	X	X				X
5	PAIKEM	X	X	X	X				X
6	Perpustakaan	X	X		X	X	X	X	
7	Adm& Keu		X			X	X	X	

Catt: PME: Pengembangan Madrasah Efektif; MBM: Manajemen Berbasis Madrasah

Selain dana hibah dan pelatihan, madrasah juga didampingi oleh mentor yang telah lolos mengikuti proses rekrutmen. Pendampingan ini dimaksudkan agar madrasah terhindar dari malpraktek dan atau kesalahan penggunaan keuangan, memastikan madrasah melaksanakan tagihan pelatihan, serta menyediakan alternative solusi yang dibutuhkan madrasah saat madrasah menghadapi kendala dalam implementasi.

Model tritunggal ini dianggap ideal karena madrasah diberi pembekalan (melalui pelatihan), kemudian melakukan tindak lanjut dengan didukung dana yang ada, serta perkembangannya dimonitor melalui opendmapingan dan kunjungan oleh mentor.

Karakteristik program kemitraan

Program kemitraan pendidikan Australia Indonesia ini memiliki beberapa karakteristik yang mungkin bisa jadi berbeda dengan program-program yang sudah ada. Program ini merupakan sebuah permodelan (atau piloting) tentang upaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.Dengan segala catatan kelebihan dan kekurangan yang ada, diharapkan model sejenis diadaptasi oleh Kementerian Agama.Sejauh ini, Kementerian Agama telah secara konkret mengadaptasi model ini dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian. Tahun 2015, sejumlah 153 madrasah menerima dana hibah untuk melaksanakan program persiapan akreditasi. Tahun 2016, alokasinya meningkat drastis, Kementerian Agama menetapkan 3.000 madarasah sebagai sasaran program.

Nominal dana hibah program kemitraan bagi madrasah sasaran tidak besar karena bersifat stimulant. Hibah tersebut diharapkan mampu mendorong stakeholder madrasah untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan madrasah.Madrasah sasaran juga dituntut cerdas dan cermat dalam mengalokasikan pada program dan kegiatan prioritasyang berdampak besar. Salah satu poin utama pengembangan madrasah adalah penguatan kapasitas pengelolanya. Kalaupun ada perbaikan fisik, maka hanya renovasi ringan yang dapat dibiayai menggunakan dana ini.

Dampak dan Implikasi Program kemitraan

Program kemitraan berlangsung selama lima tahun, dari tahun 2011 - 2016. Porgram ini telah memberikan dampak dan implikasi dalam beberapa aspek. Pertama, dampak sistemik dan kelembagaan.Implementasi teknis program kemitraan di masing-masing provinsi dilaksanakan lembaga mitra lokal. Dari 14 Lembaga mitra di 13 provinsi sasaran, 10 di antaranya adalah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM), atau yang dulu dikenal dengan Madrasah Development Center (MDC). Program kemitraan ini secara langsung telah memberdayakan dan memperkuat peran PPM dan lembaga mitra non-MDC. Pengalaman mengelola program kemitraan telah menjadikan PPM (baik secara personel maupun kelembagaan) mampu menjadi lembaga yang qualified mulai dari mengelola pelatihan, mengelola personel yang terlibat, manajemen keuangan, penguatan jaringan baik ke instansi pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri, serta monitoring dan evaluasi program. Bahkan posisi PPM semakin kuat dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 721 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Pusat Pengembangan Madrasah (PPM). Ke depan, PPM diharapkan memainkan peran yang jauh lebih strategis bersama Kemenag,baik Kanwil maupun Kankemenag Kab/kota, dalam upaya peningkatan kualitas madrasah.

Kedua, penguatan peran pengawas. Dalam melaksanakan implementasi program kemitraan ini, setiap 5 – 7 madrasah sasarandidampingi oleh satu orang mentor.Secara keseluruhan, mentor dalam tiga tahap implementasi berjumlah 281 orang di mana 67% di antaranya berlatar belakang pengawas. Pengawas memang diprioritaskan untuk memerankan posisi mentor karena pengawas memiliki tupoksi mendampingi madrasah. Dengan menjadi mentor, pengawas memiliki pengalaman empiris dan sistematis dalam melakukan pendampingan di madrasah mulai dari pemenuhan tagihan pelatihan, mengelola dana hibah, melaksanakan pelatihan, pengembangan jaringan, serta komunikasi dengan stakeholder madrasah. Pengalaman menjadi mentor semakin meningkatkan kualitas pendampingan para pengawas di madrasah binaan. Jika sebelumnya

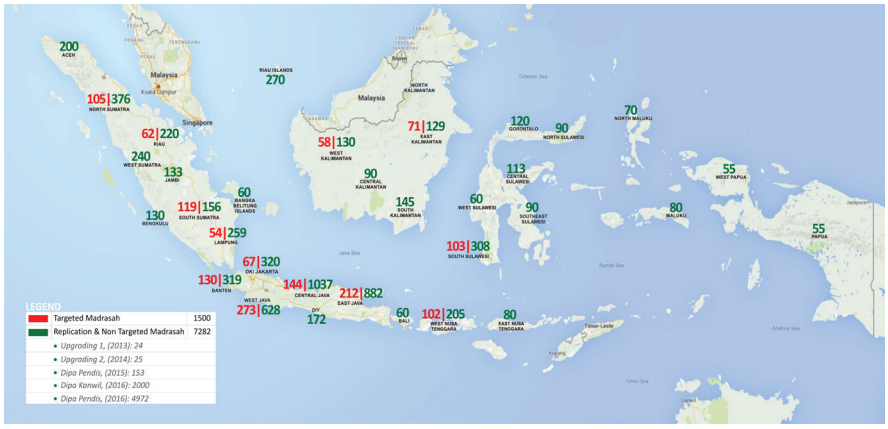

Tabel 1. Lembaga mitra pelaksana Program Kemitraan Pendiidkan Australia Indonesia Komponen 3

No	Provinsi	Mitra P1	Mitra P2	Mitra P3
1	Banten	PPM	PPM	-
2	DKI Jakarta	CTLD UIN Jakarta	-	-
3	Jawa Barat	UNISBA	UNISBA – CTLD UIN Jakarta	PPM
4	Jawa Tengah	LP MAARIF PWNU	LP MAARIF PWNU	-
5	Jawa Timur	PPM	PPM	PPM
6	Sumatera Selatan	YBSS Palembang	YBSS Palembang	-
7	Kalimantan Timur	PPM	-	-
8	Lampung	-	PPM	-
9	NTB	-	PPM	PPM
10	Sulawesi Selatan	-	PPM	PPM
11	Sumatera Utara	-	PPM	PPM
12	Riau	-	-	PPM
13	Kalimantan Barat	-	-	PPM

Ket:
- PPM: Pusat Pengembangan Madrasah
- CTLD: Center for Teaching and Learning Development
- YBSS: Yayasan Bina Sahabat Sriwijaya

kunjungan pengawas ke madrasah hanya bersifat formalitas dan administratif, maka kini pengawas benar-benar memberikan asistensi bagi madrasah binaan.Pengawas yang menjadi mentor juga mendiseminasikan pola-pola pengembangan madrasah model kemitraan bagi madrasah binaan yang tidak menjadi sasaran program ini.

Ketiga, peningkatan kualitas SNP di madrasah, bukan hanya hasil penilaian formal.Program kemitraan telah mendorong madrasah memiliki kepercayaan diri yang tinggi menghadapi penilain akreditasi.Hal ini tidak lain karena madrasah sudah melakukan berbagai penguatan pada aspek-aspek (atau standar) yang dinilai dalam proses akreditasi. Dari 1.500 madrasah sasaran program kemitraan, 438 (29%) di antaranya memperoleh nilai akreditasi A, 1004 (67%) peringkat B, 54 (4%) C dan 4 madrasah belum masuk kuota akreditasi.Skor akreditasi merupakan salah satu indikasi sekaligus sebagai parameter formal tentang kualitas dan kondisi yang ada di madrasah.Hasil ini membuktikan bahwa madrasah mampu bersaing dengan sekolah, bahkan di beberapa provinsi mampu mengungguli sekolah negeri sekalipun.

Meskipun asessmen dalam akreditasi lebih banyak mensyaratkan dokumen administrative, namun idealnya dokumen bukti pendukung akreditasi bukanlah sesuatu yang baru dibuat atau disusun menjelang kunjungan asesor akreditasi, tapi merupakan dokumentasi atau rekaman atas apa yang ada dan terjadi di madrasah secara factual. Atas dasar itulah, dalam program kemitraan dikenal dengan istilah akreditasi bermakna, akreditasi yang tidak hanya berorientasi skor namun lebih esensial yaitu peningkatan kualitas. Jika hanya berorientasi skor, misalnya targetnya A, maka cukup dengan menyelenggarakan bedah instrument dan memenuhi dokumen pendukung, target tersebut dapat tercapai.

Keempat, kesadaran kolektif tentang tanggung jawab pengembangan madrasah.Jika sebelumnya tanggung jawab memikirkan dan mengelola madrasah kita hanya dibebankan pada kepala madrasah, kini perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap eksistensi dan pengembangan madrasah mulai mengalami pergeseran. Program kemitraan telah mendorong meningkatnya kesadaran publikakan pentingnya berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan madrasah, terutama madrasah swasta. Dunia usaha dan dunia industri juga turut mengambil bagian dalam upaya peningkatan mutu madrasah dengan berbagai program dan kegiatannya. Anggota masyarakat juga mulai ikut serta berpartisiapsi dalam mengembangkan madrasah melalui rembug desa, komite madrasah, atau bahkan melalui dana PNPM. Kolektifitas semua pihak inilah yang akan menjadi modal besar bagi madrasah dalam menciptakan madrasah sebagai lembaga yang layak untuk menjadi rujukan dan pilihan bagi para wali murid.

Tantangan ke depan

Tantangan ke depan bagi madrasah sasaran adalah mereka harus mempertahankan kualitas yang sudah dicapai selama menjadi sasaran program kemitraan dan didampingi oleh mentor. Praktisnya, madrasah harus menyusun target untuk mencapai level dan kualitas yang lebih baik dibanding kondisi saat ini, pada periode tertentu di waktu mendatang. Kualitas yang ideal tidak pernah ada terminal akhirnya, karena ketika target yang direncanakan dapat tercapai maka madrasah harus menetapkan target yang lebih tinggi lagi.RKM harus terus direview sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman. Sehingga, madrasah memiliki daya saing dan keunggulan yang up-to-date, tidak lagi jadul.

Tantangan lainnya berkaitan dengan tingkat ketergantungan madrasah terhadap (program) bantuan. Madrasah kita sering kali berharap, setelah program kemitraan ini berakhir, Kementerian Agama dan Australia menginisiasi program lainnya di mana mereka kembali berharap dijadikan sasaran. Mindset seperti inilah yang seharusnya dihilangkan dari madrasah sasaran karena mereka sudah dibekali kemampuan manajemen administrasi, pengelolaan keuangan, kepemimpinan, pengembangan dan penguatan jaringan, serta peningkatan kapasitas pengelolanya. Artinya, madrasah seharusnya sudah memiliki kemandirian, baik dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki maupun dukungan stakeholder dan jaringan yang sudah dibangun oleh madrasah sendiri.Memang bukan tugas yang mudah, namun bukan tidak mungkin hal itu dapat tercapai.

Program kemitraan pendidikan ini hanyalah salah satu upaya dalam kerja besar memajukan madrasah. Dalam skala yang lebih luas, program peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah harus menjadi agenda urgen dan prioritas, baik bagi Kementerian Agama maupun madrasah sendiri, ada ataupun tidak ada program bantuan sejenis program kemitraan ini. Selain itu, keterlibatan dan kontribusi stakeholder madrasah menjadi elemen penting dalam upaya tersebut.

Muchammad Tholchah

REHABILITASI EKS GAFATAR PASCA EVAKUASI

MERANGKUL YANG MENYIMPANG

KEMENTERIAN AGAMA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DENGAN MELIBATKAN PSIKOLOG DAN PENYULUH AGAMA DI LOKASI PENAMPUNGAN EKS ANGGOTA GAFATAR YANG DIPULANGKAN DARI MEMPAWAH UNTUK MENGGALI BANYAK HAL TERKAIT KEHIDUPAN PARA EKS GAFATAR. PROGRAM TERSEBUT MENJADI BAGIAN DARI UPAYA KEMENAG DALAM PENANGANAN EKS ANGGOTA GAFATAR .

Pertemuan tertutup antara pemerintah daerah dengan pengurus kelompk eks Gafatar yang membahas tuntutan masyarakat yang merasa resah atas kehadiran anggota Gafatar di wilayahnya, Senin 18 Januari 2016 dibayangi ketegangan. Sebuah mobil milik pengurus Gafatar yang terparkir di halaman kantor Bupati Mempawah Kalimantan Barat dibakar massa. Keesokan harinya 19 Januari 2016, ratusan massa berkumpul di lahan pertanian yang selama ini menjadi tempat pemukiman (base camp) eks Gafatar. Massa membakar beberapa rumah Betang di lokasi yang merupakan pusat kegiatan pengikut Gafatar di Mempawah. Warga marah karena ultimatum mereka agar kelompok Gafatar meninggalkan Mempawah tidak dituruti.

Aksi diawali ketika warga terdekat lokasi eks Gafatar di Desa Moton Kec. Mempawah Timur berkumpul di depan gerbang base camp perkampungan eks Gafatar. Aparat keamanan yang jumlahnya terbatas tidak mampu mencegah massa yang terus berdatangan ke lokasi, hingga terjadi pembakaran beberapa rumah Betang milik eks Gafatar. Melihat kemarahan massa yang meluas dan meningkat eskalasinya, Bupati Mempawah mengeluarkan intruksi untuk mengevakuasi eks Gafatar ke Pontianak.

Bermula dari hilangnya Dokter Rica beserta anaknya dilaporkan oleh suaminya yang dibawa oleh dua orang yang kemudian diketahui merupakan anggota Gafatar. Berita ini menjadi awal terkuaknya kelompok Gafatar yang berhasil mempengaruhi sejumlah orang untuk "hijrah" ke Mempawah sebagai bagian dari misi keyakinannya. Masyarakat Mempawah resah ketika diketahui bahwa dokter Rica yang dilaporkan hilang pernah berada di Mempawah. Hasil investigasi kepolisian menyebut Rica dijemput dua orang yang kemudian diketahui merupakan anggota eks Gafatar. Masyarakat Mempawah akhirnya sadar bahwa para pendatang yang tergabung dalam organisasi kelompok tani (Poktan) sekitar Oktober tahun lalu adalah para anggota eks Gafatar. Mereka datang ke Mempawah, membeli lahan, kemudian menempati dan mengelola lahan pertanian.

Dari kasus Mempawah, berita tentang kehadiran eks Gafatar dari berbagai daerah yang eksodus ke Kalimantan Barat dan menamakan dirinya Poktan semakin meluas. Untuk menghindari anarkisme massa, Pemda Kalbar kemudian mengevakuasi para anggota kelompok Gafatar ini ke Bekangdam (Perbekalan dan Angkutan Kodam) Pontianak sejak Selasa 19 Januari 2016 malam. Keberadaan mereka ternyata tidak hanya di Mempawah, namun menyebar di 10 kabupaten di Kalbar, antara lain: Bengkayang, Melawi, Ketapang, Sanggau, Sambas, dan Kapuas Hulu. Sebagian ada juga yang ada di Kalimantan Tengah.

Menurut Wakil Gubernur Kalbar Christiandy, total eks Gafatar yang telah dievakuasi jumlahnya mencapai 5.579 orang.Secara bertahap, para pengungsi itu kemudian dipulangkan oleh pemerintah ke kampung halaman masing-masing, antara lain ke pulau Jawa dan Sumatera dengan biaya pemerintah daerah.

Kehadiran Eks Gafatar di Kalbar

Tujuan kehadiran ribuan anggota Gafatar di Kalbar, menurut para pengungsi yang diwawancarai penulis, adalah untuk mengadu nasib dengan bertani. Mereka mengakui kalau sebelumnya memang aktif di Gafatar. Mereka tertarik karena banyak kegiatan sosial yang dipelopori Gafatar, seperti donor darah, kerja bakti membersihkan masjid, membersihkan makam, dan lain-lain. Namun, karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Gafatar sebagai organisasi tidak dikeluarkan pemerintah, maka organisasi ini membubarkan diri pada Agustus 2015. Banyak pengungsi mengaku kehadirannya di Kalbar bukan sebagai pengikut organisasi Gafatar, namun karena tertarik menjalankan program Ketahanan dan Kemandirian Pangan (PKP) yang menjadi program utama Gafatar. Karena itu, mereka membentuk kelompok tani (Poktan) selama di Kalbar dan tidak lagi menggunakan nama organisasi dan atribut Gafatar.

Para anggota Gafatar ini, datang secara bertahap ke Kalbar, dengan pesawat udara atau kapal laut. Umumnya, mereka sudah di Kalbar sejak dua-tiga bulan lalu, tapi ada juga yang sudah setahun. Mereka berangkat dengan biaya sendiri yang dikumpulkan secara kolektif ke pimpinan kelompok dan diteruskan ke pengurus Gafatar. Uang yang disetor

SEKJEN KEMENAG NUR SYAM MEMBERIKAN ARAHAN PADA ANGGOTA GAFATAR YANG DITAMPUNG DI ASRAMA HAJI PONDOK GEDE JAKARTA

bervariasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Uang tersebut mereka dapatkan dari hasil menjual properti (rumah, tanah) yang mereka miliki.

Setibanya di Kalbar, mereka menempati daerah yang berbeda-beda, misalnya sekitar 350 KK menempati lahan di dua desa di Mempawah Timur yaitu desa Moton dan desa Pasir. Tanah di desa Moton relatif luas yaitu 43 ha, sedangkan di desa Pasir sekitar 16 ha. Mereka bekerja menggarap lahan mulai pukul 7 sampai 4 sore. Masing-masing lalu membentuk Poktan, yaitu: Poktan Manunggal Sejati dan Poktan Pasir Sejahtera. Meski demikian, tidak semua tinggal di *base camp*, karena beberapa mengontrak rumah di Kec. Mempawah Timur dan Mempawah Hilir. Diduga mereka yang mengontrak adalah para pimpinan Poktan.

Informasi yang penulis peroleh dari para eks Gafatar di pengungsian tersebut, seakan menepis opini bahwa mereka eksodus ke Kalbar karena mengikuti intruksi para pimpinan eks Gafatar, terutama Ahmad Musodeq. Pimpinan Millah Abraham yang merupakan faham keagamaan Gafatar ini dikabarkan memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Kalbar.

Hal berbeda diungkapkan Kapolres Mempawah, Jimantoro. Menurutnya, kehadiran anggota Gafatar yang kebanyakan berasal dari Pulau Jawa itu merupakan intruksi Ahmad Musodeq. Dari data-data yang diperolehnya, kuat dugaan bahwa Musodeq adalah orang yang mengendalikan organisasi ini. Musodeq juga diyakini mereka sebagai Mesias dan Rasul, menggantikan Nabi Muhammad.

Jimantoro tegas mengatakan, bahwa niat bertani hanya kamuflase, karena sejumlah alasan, antara lain: pertama, para pendatang tidak memiliki latar belakang petani, padahal untuk bertani dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak mudah. Kedua, latar belakang profesi mereka bervariasi, ada guru, pegawai, buruh, pedagang, dan lain-lain. Ketiga, apa yang dikatakan oleh Poktan Gafatar adalah uthopia (mimpi). Hasil pertanian yang mereka anggap dapat menghidupi bangsa Indonesia hanya jargon. Jika dilihat dari hasilnya, yaitu kangkung dan kacang panjang, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saja masih kurang.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan kesaksian sejumlah pihak, Jimantoro yakin Poktan ini tidak lain adalah Gafatar yang memiliki paham keagamaan Millah Abraham dan metamorfosis al-Qiyadah Islamiyah. Selain itu, dari *handphone* milik pengurus Poktan, ditemukan dokumen dengan Kop Surat Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara (NKTN). Dalam surat menyurat antar Poktan itu juga digunakan istilah seperti, Presiden, Menteri SDM, Menteri Kesehatan, Gubernur untuk Supardan (mantan Ketua DPD Gafatar Jawa Timur), dan Kepala Daerah (Bupati) untuk Ismail.

Pemerintah mengambil langkah hati-hati dalam menangani konflik antara masyarakat Kalbar dengan anggota Gafatar. Evakuasi dipilih sebagai alternatif dan upaya terakhir untuk menghindari jatuhnya korban dan kerugian yang lebih besar. Menurut seorang pejabat Pemda Kalbar, bagaimanapun nyawa lebih berharga dibanding material apapun, dan menyelamatkan nyawa merupakan asas dari segala pertimbangan hukum. Upaya preventif dan persuasif melalui diskusi dan dialog sebenarnya telah dilakukan Pemda, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Proses evakuasi oleh pemerintah berjalan cepat, sehingga eks Gafatar umumnya tidak berada lama-lama di pengungsian. Mereka segera dapat dipulangkan ke daerah asal. Petugas dari unsur TNI, Polri, BNPB, Dinas Sosial, dan Pemda Kalbar, secara umum berhasil menyiapkan sarana dan prasarana di pengungsian secara baik, sehingga kebutuhan pengungsi, yaitu: tempat tinggal sementara, makan, minum, dan kesehatan relatif terlayani. Para eks Gafatar yang mayoritas dari Pulau Jawa ini akhirnya berhasil dipulangkan dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut secara bertahap.

Penanganan Eks Gafatar

Warga eks Gafatar yang dievakusi dari Kalbar tidak langsung dipulangkan ke keluarga, namun ditempatkan di sejumlah tempat transit, antara lain: Asrama Haji Donohudan Solo, Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Cipayung, dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Di lokasi transit ini, dilakukan pendaataan ulang secara lebih rinci dan rehabilitasi trauma psikologis terutama bagi anak-anak dengan melibatkan para psikolog. Melalui proses identifikasi ini, Pemerintah diharapkan dapat menyusun *roadmap* pemenuhan hak-kewajiban, harapan, serta kompensasi eks Gafatar.

Ada beberapa langkah strategis yang ditetapkan pemerintah, beberapa diantaranya ditangani oleh Kemenag, yaitu: pertama, fasilitasi, menyediakan penampungan sementara disertai edukasi penggunaan fasilitas. Kedua, pemulihan, melakukan penyuluhan agama, pengamatan perilaku, pemantauan situasi berdasarkan preferensi keagamaan. Ketiga,

TIM PENYULUH KEMENAG UNTUK PENDAMPINGAN EKS GAFATAR DI ASRAMA HAJI DONOHUDAN, SOLO

pendidikan: mencari solusi pendidikan anak-remaja eks Gafatar. Keempat, rencana aksi: menjalankan rekomendasi rapat internal dan eksternal yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga negara terkait.

Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kemenag melakukan identifikasi dengan melibatkan psikolog dan penyuluh agama. Setiap hari para penyuluh dan psikolog yang ditugaskan datang ke lokasi transit. Di sini, para penyuluh menggali banyak hal terkait kehidupan para eks Gafatar, seperti latar belakang masuk, tujuan bergabung, kehidupan yang dijalani di Kalbar, harapan atau cita-cita, dan keyakinan keagamaan mereka.

Seorang penyuluh agama, Arif, setelah melakukan diskusi dengan beberapa eks Gafatar menyimpulkan, pada umumnya mereka mempercayai rukun iman, namun sedikit berbeda dalam rukun Islam. Syahadat mereka hanya menyebut lailaha illallah (tidak ada Muhammad Rasulallah), shalat itu esensinya dzikir, zakat tetep wajib, puasa itu menahan nafsu, sedangkan haji itu dengan berkumpul. Menurut mereka, dulu Ibrahim mengumpulkan pemuka Arab untuk bicara ekonomi, politik, dan lainnya.

Mereka berpandangan al-Quran bukan kitab sempurna, masih perlu hadits, tafsir, dan kitab dari nabi-nabi lain seperti Injil dan Taurat. Ulama saat ini hanya paham soal Islam dari al-Quran saja, padahal perintahnya harus mempelajari kitab-kitab lain. Dalam pandangan mereka, Ahmad Mushodeq adalah guru spiritual. Ia satu-satunya ulama yang pandai, tidak hanya al-Quran, tapi juga Injil dan Taurat. Mereka juga berkeyakinan, Nabi Muammad masa kenabiannya sudah habis, karena likulli syaiin ajal, sehingga saat ini ada nabi baru.

Sementara itu, seorang psikolog yang ditugaskan Kemenag, Raudlatul Munawaroh, dari hasil konseling yang dilakukannya kepada eks Gafatar di tempat transit menyimpulkan: pertama, pemahaman dan keagamaan anggota eks Gafatar kurang (mereka tidak sholat); kedua, semua jawabannya terkesan hasil doktrin Gafatar, bersemangat, serentak suami istri dengan intonasi yang sama; ketiga, selalu memuji-muji Gafatar dan selalau menyalahkan Pemerintah (karena dipulangkan); keempat, bersikeras untuk kembali ke lahan Gafatar di Kalbar; dan kelima, banyak jawaban yang terkesan ada yang ditutupi.

Setelah melalui kajian dan pembahasan, Rabu 3 Februari 2016, MUI akhirnya menetapkan bahwa aliran Gafatar yang memiliki faham Millah Abraham adalah sesat menyesatkan. Alasannya, aliran Gafatar merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI No 4 tahun 2007. Beberapa faham Millah Abraham yang dianggap sesat dan menyimpang, antara lain: mencampurkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.

Catatan temuan penyuluh agama dan psikolog di atas, penting bagi Kemenag untuk menetapkan langkah

efektif dalam program pendampingan eks Gafatar ketika kembali ke keluarganya masing-masing. Selain itu, fatwa MUI juga menjadi salah satu konsideran Pemerintah dalam menetapkan langkah hukum terhadap eks Gafatar. Berdasarkan UU No: 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka sanksi hukum yang bisa diberikan kepada eks Gafatar adalah dalam bentuk perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan penyebaran faham Millah Abraham melalui diterbitkannya suatu keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu Kementerian Agama diwakili Badan Litbang dan Diklat bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa kali menghadiri rapat Pengawas Aliran Menyimpang (Pakem) di Kejaksaan Agung. Salah satu pembahasan utamanya adalah penerbitkan SKB tentang eks Gafatar.

SKB Tiga Menteri

Setelah melalui serangkaian pembahasan, Kamis 24 Maret 2016, SKB Gafatar yang ditandatangani Jaksa Agung, Menag, dan Mendagri

PROSES EVAKUASI ANGGOTA GAFATAR MENGGUNAKAN KRI ANGKATAN LAUT

FOTO : THETANJUNGPURATIMES

SETELAH MELALUI KAJIAN DAN PEMBAHASAN, RABU 3 FEBRUARI 2016, MUI AKHIRNYA MENETAPKAN BAHWA ALIRAN GAFATAR YANG MEMILIKI FAHAM MILLAH ABRAHAM ADALAH SESAT MENYESATKAN. ALASANNYA, ALIRAN GAFATAR MERUPAKAN METAMORFOSIS DARI ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH YANG SUDAH DIFATWAKAN SESAT MELALUI FATWA MUI NO 4 TAHUN 2007

diumumkan. Jaksa Agung Agung Prasetyo meminta eks Gafatar untuk menghentikan penyebaraan ajarannya, kalau tidak akan dipidanakan. "Kami meminta masukan kepada semua pihak dari usur Kementerian Dalam Negeri, Kemenag, dari TNI dan Kejaksaan sendiri. Terakhir MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa ajaran Gafatar itu dinilai sesat dan menyesatkan kalau itu didiamkan bisa menimbulkan keresahan dan berbagai SARA," kata Agung Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, yang mendampingi Agung Prasetyo mengatakan, SKB Nomor: 93 Tahun 2016, Nomor: Kep-043/A/JA/02/2016, dan Nomor:223-865 Tahun 2016 telah memutuskan lima poin terkait pelarangan organisasi Gafatar. Pertama, para pengikut kelompok Gafatar dilarang melakukan dengan sengaja di muka umum untuk menceritakan dan menafsirkan tentang satu kegiatan keagamaan yang menyerupai Gafatar tersebut.

Kedua, memerintahkan kepada pengurus, pengikut dan simpatisan Gafatar untuk menghentikan penyebaran dan penafsiran kegiatan yang menyimpang ajaran agama Islam. Ketiga, apabila para pengurus, anggota dan simpatisan tidak mematuhi dalam poin pertama dan kedua, maka ada sanksi hukum tersendiri. "Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya," kataAdi.

Keempat, semua lapisan masyarakat agar memelihara keamanan, dan ketertiban dalam menjaga ketenteraman kerukunan umat beragama. SKB juga mengimbau lapisan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para pengurus, pengikut, dan simpatisan Gafatar.

Kelima, apabila masyarakat tidak mengindahkan peringatan SKB tersebut, maka sesuai dengan ketentuan akan diproses hukum. Keenam, SKB ini juga memerintahkan seluruh aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pembinaan dalam rangka pengamanan serta pengawasan pelaksanaan keputusan tersebut. "Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta padatanggal 29 Februari 2016, ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri," pungkas Adi.

Sebagai catatan akhir, pola penanganan eks Gafatar ini perlu dilakukan secara sistemik (ligitasi dan non ligitasi atau persuasif melalui pembinaan rapport), terpadu (melibatkan seluruh stakeholder), dan berkesinambungan. Dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara, Pemerintah tetap perlu menjamin keamanan, melindungi dan melayani hak-hak sipil pengikut/ kelompok Gafatar, sesuai dengan peraturan perundangan. Sementara itu, warga masyarakat tetap diimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarkis, melakukan perbuatan main hakim sendiri dan atau tindakan sewenang-wenang serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Catatan lainnya adalah, meski memiliki militansi yang kuat, secara psikologis eks Gafatar mengalami kekhawatiran atas masa depan mereka. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki rumah untuk tempat tinggal, mereka juga mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan. Nampaknya pemerintah harus bisa memberikan solusi bagaimana memenuhi kebutuhan hidup eks Gafatar saat ini. Jika mereka memang memiliki keinginan kuat hidup di Kalbar, tidak ada salahnya mereka dilibatkan dalam program transmigrasi dibawah pembinaan dan pengawasan pemerintah, namun harus dipastikan bahwa mereka telah terputus dari jaringan organisasi eks Gafatar.

Abd. Jamil Wahab

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DAN RENOVASI MASJID PUN TETAP JALAN

SETELAH MELALUI PERTEMUAN YANG DIFASILITASI BUPATI JAYAWIJAYA DENGAN SEJUMLAH TOKOH, FORKOMINDA, FKUB, PGGJ, MUI, PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITURAHMAN, FKMPT, IKWW, PERWAKILAN UMAT ISLAM DAN KRISTEN SERTA PIHAK KEMENTERIAN AGAMA DAN DPR PAPUA DISEPAKATI RENOVASI MASJID WAMENA DILANJUTKAN

Di depan halaman luas Kantor Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya Papua dengan rumput hijau melapisinya, sejumlah tokoh yang berasal dari beragam unsur, pemerintah daerah, TNI, Polri dan Kementerian Agama berpegangan erat satu sama lain sebagai wujad kesatuan dan kebersamaan selalu terbangun di bumi Jayawijaya, Papua

Renovasi keempat Masjid Agung Baiturahman Wamena Jayawijaya yang terletak di Jalan Yos Sudarso Wamena bersebelahan dengan Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya sempat terhenti menyusul adanya penolakan dari Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ) pada Kamis 25 Februari 2016 lalu. Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang-Diklat Kemenag Ibnu Hasan Muchtar dalam laporannya kepada Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Muharam Marzuki, Senin 7 Maret 2016, terkait Hasil *Fact Finding* terhadap Pernyataan Sikap PGGJ Wamena menjelaskan bahwa penolakan berawal dari berkembangnya isu di kalangan umat Kristiani seiring mulai dipasangnya pagar seng berkenaan dengan rencana renovasi masjid Baiturahman pada awal Februari 2016.

Desas-desusnya, masjid akan dibangun berukuran besar yang terdiridari 5 lantai/tingkat dan dengan kubah dan menara setinggi 70 meter. Izin mendirikan bangunan (IMB) masjid yang telah dikeluarkan oleh Bupati dianggap tidak sesuai dengan PBM tahun 2006 karena tidak menyertakan rekomendasi dari FKUB, Kemenag dan persetujuan lingkungan sebanyak 60 orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat. Informasi ini dibarengi dengan adanya pemberitaan melalui medsos dan elektronik (TV) berkenaan dengan kejadian-kejadian di wilayah Barat tentang sulitnya pendirian gereja.

Berawal dari situ, pada Minggu 21 Februari 2016, seluruh Gereja wilayah Wamena mengumumkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 akanmelakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor DPRD dan Kantor Bupati, dalam rangka menolak pembangunan/rehab Masjid Agung Baiturahman. Setelah mendapat masukan dari Dandim dan Kapolres Jayawijaya, PGGJ mengadakan pertemuan pada Selasa 23 Februari 2016, dan disepakati bahwa rencana demo dibatalkan dan diganti dengan pernyataan sikap kepada Bupati atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) pada Kamis 25 Februari 2016.

Melalui surat terbuka, PGGJ akhirnya mengeluarkan sembilan point pernyataan sikap, yaitu: 1) seluruh Denominasi Gereja di Kabupaten Jayawijaya meminta Pemerintah Daerah Kabuaten Jayawijaya mencabut/membatalkan ijin mendirikan Masjid Agung Baiturahman Wamena; 2) panitia pembangunan Masjid Agung Baiturahman harus menghentikan

PERTEMUAN TOKOH-TOKOH UMAT DAN PEMERINTAH DI KANTOR BUPATI JAYAWIJAYA MEMBAHAS SOLUSI KISRUH RENOVASI MASJID WAMENA

pekerjaan pembangunan; 3) menutup mushala/masjid yang tidak memiliki ijin atau menyalahgunakan ijin tempat usaha tetapi dijadikan mushala/masjid sebagaimana yang diatur dalam SKB Dua Menteri;

4) dilarang pembangunan mushalla atau masjid baru di Kabupaten Jayawijaya; 5) Dilarang menggunakan Toa/pengeras suara saat shalat karena sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat; 6) dilarang menggunakan busana ibadah (jubah da jilbab) di tempat-tempat umum; 7) hentikan upaya mendidik (menyekolahkan) anak-anak Kristen Papua di pesantren-pesantren; 8) hentikan mendatangkan guru-guru kontrak non-kristen; dan 9) demi keharmonisan, kenyamanan dan keamanan agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Keluarnya pernyataan sikap dari PGGJ ini disesalkan oleh Ikatan Keluarga Wilayah Walesi (IKWW) di Jayawijaya yang tinggal di Jayapura gabungan dari 3 (tiga) agama (Islam, Kristen dan Katolik) karena dinilai cenderung provokatif. Dalam pernyataan sikapnya, Jum'at 26 Februari 2016, IKWW menghimbau semua kelompok untuk menahan diri dan tidak terprovokasi sehingga dapat menimbulkan ketegangan yang lebih besar. IKWW juga mendesak Bupati untuk segera memfasilitasi pertemuan untuk menemukan solusi.

Bergerak Cepat

Bupati Jayawijaya bergerak cepat dalam menyikapi dinamika sosial di Wamena. Pada hari yang sama ketika menerima pernyataan sikap PGGJ, Bupati segera menggelar rapat Forkopimda dan menghasilkan keputusan yang akan diumumkan secara resmi seminggu mendatang, tepatnya pada Rabu, 3 Maret 2016.

Dalam rentang waktu seminggu, sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak digelar untuk mencari solusi terbaik bagi terus terjaganya kerukunan di Wamena. Selasa 1 Maret 2016, Kapolda Papua mengundang Forkominda Jayawijaya, FKUB Provinsi dan Kab. Jayawijaya, PGGJ, FKMPT, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Pertemuan itu menghasilkan Pernyataan Bersama untuk tidak saling melakukan penuntutan secara hukum dan secara suka rela mencabut pernyataan sikap masing-masing pihak.

Puncaknya, sesuai dengan yang dijanjikan, Bupati menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh pada Kamis 3 Maret 2016 di ruang kerja Bupati. Hadir dalam kesempatan ini, Forkominda, FKUB, PGGJ, MUI, Panitia Pembangunan Masjid Baiturahman, FKMPT, IKWW, perwakilan umat Islam dan Kristen serta pihak Kementerian Agama dan DPR Papua.

Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa pembangunan Masjid Baiturahman Wamena akan dilanjutkan dengan sedikit perubahan pada luas bangunan dan tinggi menara. Rencana awal panitia pembangunan masjid adalah dua lantai dengan ukuran 40×40 M2. "Dari pertemuan itu diputuskan pembangunan masjid tetap akan dilanjutkan, dengan catatan jika awalnya tinggi kubah dan menara masjid 20M, akhirnya diturunkan jadi 15M," kata Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo sembari mengatakan bahwa IMB yang sudah dikeluarkan akan disesuaikan.

Bangunan yang awalnya dua lantai juga diubah menjadi satu lantai saja. Luas bangunannya yang semula 40x40 M2, disepakati menjadi 25x25M2, tidak termasuk sayap kiri kanan, masing-masing 6,45M. Total luas bangunannya kurang lebih 38 meter persegi. "Keputusan ini kita sepakati bersama, dan kita akan jalani. Saya meminta kepada panitia pembangunan Masjid, untuk revisi kembali gambar yang sudah disampaikan pada pemerintah dan disampaikan lagi untuk kita menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengganti yang sudah kita terbitkan sebelumnya," kata John Wempi.

John Wempi berharap masalah ini tidak dilebih-lebihkan. Sebab, poin-poin tuntutan PGGJ kepada pemerintah sudah selesai dan dicabut yang ditandai penandatanganan kesepakatan. "Sembilan poin tuntutan itu sudah selesai di Polda beberapa waktu lalu. Semua menandatangani surat, sudah dicabut. Jadi, masing-masing pihak, baik tuntutan dari umat muslim Pegunungan Tengah Papua yang telah menyampaikan tuntutan maupun dari PGGJ, masing-masing telah mencabut. Itu sudah tidak lagi," katanya.

"Dengan adanya putusan ini, saya harap semua masyarakat menerimanya. Saya rasa masyarakat di lembah ini tahu adat dan budaya. Kalau ada masalah kita bisa bicarakan di Honai Adat. Di Polda juga saya sampaikan bahwa kembalikan hal ini kepada saya karena saya orang adat, saya orang budaya, kita akan putuskan di Honai kita sendiri. Jadi, hari ini kita putuskan dan saya kira akan diterima semua pihak dan ini keputusan yang terbaik," lanjutnya.

Tidak Saling Menuntut

Ketua PGGJ, Pendeta Abraham Ungirwalu mengakui bahwa setelah dilakukan perundingan bersama di Polda, semua pihak sepakat untuk tidak saling menuntut. Soal perubahan dan perkembangan pembangunan masjid, PGGJ menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk diputuskan

DIRJEN BIMAS KRISTEN ODITHA R HUTABARAT BERSAMA TOKOH UMAT JAYAWIJAYA DISAKSIKAN BUPATI JAYAWIJAYA SALING BERPEGANG ERAT TANGAN

secara bijak. "Kami sudah saling memahami dan menerima satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kami tetap memiliki komitmen untuk tetap membangun kebersamaan dan cinta kasih dalam keberagaman," katanya.

Pihaknya mengharapkan agar terus meningkatkan perdamaian dan kerukunan serta membangun relasi yang baik antara semua pihak. "Kami juga akan menyampaikan semua kesepakatan ini kepada jemaat-jemaat dari 15 denominasi Gereja di Jayawijaya, sehingga menjadi ketentuan dan kesepakatan bersama yang bisa mencapai arus bawah. Dengan demikian suasana kondusif dirindukan bersama terpelihara dengan baik," katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Jayawijaya, Solehudin mengatakan kesepakatan bersama ini sangat bijak. "Dengan adanya kesepakatan ini, saya mengimbau kepada seluruh umat Islam di Jayawijaya dan lebih umum di pegunungan tengah untuk menerima dan mengetahui serta melaksanakan sebaik-baiknya," katanya.

Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Oditha R Hutabarat mengharapkan keputusan bersama itu menguntungkan semua pihak, baik pihak Muslim maupun pihak Kristen. "Dari panitia pembangunan Masjid, maupun FKUB dan PGGJ juga menerima apa yang bupati putuskan," katanya.

Oditha mengaku begitu mendengar informasi terkait surat terbuka dari PGGJ, dirinya bersama Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abd Rahman Mas'ud mendapat mandat dari Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk segera mengirim tim ke Papua. Sebagaimana biasanya, Kepala Balitbang Diklat selalu menerjunkan para peneliti ke lokasi untuk melakukan tugas fact finding agar dapat memahami persoalan dengan utuh. Walhasil, peneliti BalitbangDiklat Kemenag, Kakanwil Kemenag Provinsi, dan Kakankemenag Jayawijaya, dan Dirjen Bimas Kristen Oditha R Hutabarat bertemu dengan Bupati Jayawijaya untuk mendapatkan penjelasan.

"Bupati menjelaskan bahwa sebetulnya ini salah paham. Saya tidak memberikan izin baru karena ini adalah renovasi yang keempat. Masalahnya yang beredar adalah pembangunan tanpa izin serta tidak melibatkan FKUB dan masyarakat. Juga beredar info kalau akan ada 3 lantai dan menara sekian puluh meter. Itu juga tidak benar," demikian Oditha menceritakan ulang apa yang disampaikan Bupati Jayawijaya saat ditemui di Jayawijaya sebelum digelar pertemuan dengan berbagai pihak, Kamis 3 Maret 2016. Hal ini disampaikan Oditha kepada Majalah Ikhlas Beramal di ruang kerjanya, Jakarta, Senin 7 Maret 2016 lalu.

Menurut Oditha, sebagai kepala daerah, Bupati Jayawijaya menegaskan bahwa dirinya bertanggungjawab penuh dengan masyarakat di wilayahnya, apapun agamanya, Islam, Hindu , Buddha, ataupun Kristen. Bupati meyakinkan kalau dirinya sudah mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nyata, pertemuan digelar dan semua pihak akhirnya bersepakat untuk menjaga perdamaian dan kerukunan.

Meski tidak ikut dalam pertemuan para tokoh agama di Jayawijaya, Oditha mengaku sempat bertemu dengan pihak-pihak yang ada di sana. Oditha terkesan dengan sikap mereka yang sadar akan pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian. "Dari teman muslim, mereka menyampaikan bahwa kami tidak apa-apa. Pada dasarnya kami rukun dan tidak terganggu," tutur Oditha.

"Mereka bilang, kami tidak mau terprovokasi. Kami sadar. Muslim juga ngomong seperti itu ke saya dari PPGJ juga begitu. Akhirnya kami foto ramai-ramai," tambahnya sembari mengatakan pentingnya sosialisasi SKB Dua Menteri terkait pendirian rumah ibadah guna meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman masyarakat saat akan mengurus IMB rumah ibadah.

Moh Khoeron
dari berbagai sumber

PENGUKUHAN PENGURUS BARU
MASJID NEGARA, ISTIQLAL 2015-2020

MASJID ISTIQLAL, HARUS JADI CONTOH

SEBAGAI MASJID NEGARA, MASJID ISTIQLAL TIDAK HANYA MENJADI DESTINASI RELIGI UMAT ISLAM KHUSUSNYA DI INDONESIA TAPI HARUS BISA MASJID CONTOH DAN KARENANYA PERLU TERUS DIKEMBANGKAN SEBAGAI PUSAT IBADAH DAN PUSAT PEMBINAAN UMAT.

Indonesia memiliki masjid terbesar di Asia Tenggara yang dikenal sebagai Masjid Istiqlal. Masjid yang menempati kawasan seluas 9,7 ha dengan luas bangunan 3,7 ha ini pembangunan konstruksinya dimulai pada 1961, dan menghabiskan dana Rp7 miliar ditambah 12 juta dolar AS. Masjid yang penggunaannya diresmikan pada 22 Februari 1978 itu kini menjadi masjid Negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI).

Jumat 22 Januari 2016, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mengukuhkan Imam Besar dan Pengurus BPPMI yang baru untuk masa bakti 2015 – 2020. Prof. KH. Nazaruddin Umar menggantikan KH Ali Mustafa Yaqub sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Sedangkan Muhammad Muzamil Basyuni menggantikan Mubarak sebagai Ketua BPPMI.

Menag berharap, BPPMI dapat terus mengembangkan kegiatan Masjid Istiqlal yang merupakan salah satu etalase umat Islam di Indonesia. Menurutnya, sebagai masjid negara, Masjid Istiqlal harus bisa masjid contoh dan karenanya perlu terus dikembangkan sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan umat. "Keberadaan Masjid Istiqlal di jantung kota, harus memiliki daya tarik dari segi kegiatan dan program pembinaan keagamaan," kata Menag.

Masjid Istiqlal harus dapat menjadi benteng umat Islam dari pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan agama dan ideologi bangsa. Masjid ini, lanjut Menag juga harus dapat berperan sebagai pusat pembinaan umat dan generasi muda dengan nilai-nilai islam dan dakwah secara komprehensif.

Bersih-Bersih

Tidak ada lagi pengemis berseliweran, pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, serta tumpukan sampah di berbagai titik pada rumah ibadah kebanggaan bangsa Indonesia ini. Masjid Istiqlal tampak lebih bersih sehingga memberikan rasa damai dan nyaman bagi setiap pengunjung yang datang.

"Masjid ini hadir sebagai manifestasi rasa syukur bangsa Indonesia. Siapa pun yang masuk wilayah ini diharapkan merasa damai," kata Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid (BPPM) Istiqlal, Muhammad Muzamil Basyuni ketika ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini. Masjid megah ini ke depan harus menjadi "icon" paru-paru kota Jakarta dan harus menjadi contoh atau panutan bagi masjid lainnya di Tanah Air.

Sebagai ketua BPPMI, Muzammail berkomitmen agar Masjid Istiqlal ke depan tidak sekedar menjalankan fungsi masjid sebagai tempat ritual seperti shalat, tetapi harus menjangkau lebih luas lagi. Masjid Istiqlal ke depan sudah memiliki konsep go internasional. Istiqlal di masa yang akan datang juga diharapkan dapat menjadi pusat kajian Islam, dengan dukungan para ahli guna meningkatkan kualitas sumber daya umat Muslim.

"Untuk meningkatkan SDM umat Muslim, pihaknya telah meminta agar para tokoh mumpuni dapat tampil di masjid tersebut untuk memberi pencerahan kepada semua pihak," terang Muzammil. Selain kajian tafsir tematik dan hadits, kini di Masjid Istiqlal juga diadakan pengajian Fiqih dan Tasawwuf. Kajian Tasawwuf bahkan diampu langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar yang membacakan Kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah as-Sakandari. Melalui Masjid istiqlal, Muzammil berkomitmen untuk menyuarakan Islam yang damai dan rahmatan lil alamin.

Sejarah Masjid Istiqlal

Ide awal pembangunan masjid ini ialah dari KH. Wahid Hasyim (Menteri Agama tahun 1950) dan Anwar Cokroaminoto. Tahun 1953 dibentuk lah pantia pembangunan masjid Istiqlal yang diketuai Anwar Cokroaminoto. Beliau menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Ir. Soekarno dan disambut baik oleh presiden.

Ir. Soekarno sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi kepala bagian teknik pembangunan Masjid istiqlal, dan juga menjadi ketua dewan juri sayembara maket Istiqlal yang diadakan setahun berikutnya (1955). Dari 27 peserta yang menyerahkan gambar, terseleksi 22 yang memenuhi syarat, dan tersaring 5 pemenang, yaitu: Dewan Juri akhirnya sepakat memenangkan maket dengan sandi "Ketuhanan" arsitek: F. Silaban, seorang penganut Kristen.

Penanaman tiang pancang pertama pembangunan masjid Istiqlal dilakukan pada 1961 dan resmi digunakan 17 tahun kemudian, tepatnya pada 22 Februari 1978.

Edi Syafei, Ramadanyl

KTT LUAR BIASA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM KE 5

MENERUSKAN PERJUANGAN YANG BELUM SELESAI

KTT OKI KE-5 MENGHASILKAN DUA DOKUMEN PENTING, PERTAMA, RESOLUSI YANG MENEGASKAN KEMBALI POSISI PRINSIP DAN KOMITMEN OKI TERHADAP PALESTINA DAN AL-QUDS AL-SHARIF. DOKUMEN KEDUA ADALAH JAKARTA DECLARATION SEBAGAI INISIATIF INDONESIA, YANG MEMUAT RENCANA AKSI KONKRIT PARA PEMIMPIN OKI UNTUK PENYELESAIAN ISU PALESTINA DAN AL-QUDS AL-SHARIF.

Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.' Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut. [Presiden Soekarno, 1962]

Indonesia sebagaimana ditegaskan Presiden Soekarno berkomitmen penuh bagi penyelesaian Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Posisi Indonesia dengan peran strategisnya dalam organisasi dunia yang angggotanya adalah negara-negara Islam menjadi alasan penting pemerintah Palestina meminta kesediaan Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke 5 untuk membahas isu Palestina dan Al-Quds Al Sharif di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016.

Rangkaian KTT ini diawali dengan pertemuan tingkat pejabat tinggi dalam bentuk Senior Officials Meeting (SOM) dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) pada tanggal 6 Maret 2016. Penyelenggaraan KTT LB ke-5 dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam Pemerintah RI atas perkembangan situasi di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif yang terus memburuk, eskalasi kekerasan terhadap warga Palestina serta pembatasan akses beribadah yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Al-Quds Al-Syarif yang masih belanjut. Bahkan, Pemerintah RI juga prihatin dengan perkembangan situasi politik dan keamanan di Timur Tengah yang semakin menggeser isu Palestina dari perhatian masyarakat internasional.

KTT OKI LB ke-5 bertujuan untuk memperkuat dukungan OKI terhadap penyelesaian Palestina dan Al-Quds Al-Syarif sebagai isu prioritas dunia Islam. Selain hal itu, KTT LB ke-5 diharapkan pula dapat mencari strategi terobosan untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah yang selama ini tertunda dan berlarut-larut. Bila membaca sejarahnya, Komite Al-Quds OKI yang diketuai oleh Raja Maroko (terdiri dari 16 negara anggota, termasuk Indonesia) didirikan pada tahun 1975 diberikan mandat untuk mengimplementasikan seluruh resolusi yang berkenaan dengan konflik Arab-Israel, khususnya terkait dengan Al-Quds.

KTT Luar Biasa OKI ke-5 ini dihadiri oleh 55 negara anggota OKI dan 4 negara pengamat (observer) OKI diharapkan akan menghasilkan sebuah resolusi yang akan memuat pernyataan politik negara anggota OKI, juga akan mencanangkan Jakarta Declaration yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif.

Selain merupakan elemen penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dukungan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari amanat UUD 1945 yang menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan awal di atas disampaikan Presiden Joko Widodo atas nama Pemerintah RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB-OKI) di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta, Senin 7 Maret 2016. "Hari ini, Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara OKI untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu," tegas Presiden Jokowi.

Di hadapan para pemimpin negera-negara dan delegasi OKI lainnya, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di

Palestina. Menurutnya, Israel telah membatasi ruang gerak rakyat Palestina hingga menjadi tak berdaya. "Banyak kebijakan sepihak dan ilegal, serta hukuman kolektif Israel semakin menyulitkan rakyat Palestina. Akses Umat Islam ke Masjid Al-Aqsa di Jerusalem juga dibatasi. Rakyat Palestina semakin tidak berdaya. Situasi kemanusiaan di wilayah-wilayah pendudukan semakin memburuk," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengajak seluruh negara Islam yang tergabung dalam OKI untuk senantiasa bersatu. Diharapkan dengan solidaritas yang kuat tersebut, rekonsiliasi bisa tercapai dalam waktu dekat. Bahkan, Indonesia dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi rekonsiliasi tersebut. "Situasi tersebut harus bersama-sama kita hadapi, kita lawan. Untuk berjuang diperlukan kesatuan. Kita harus bersatu, Palestina harus bersatu, Palestina harus rekonsiliasi. Indonesia siap membantu proses rekonsiliasi ini," ujar Presiden.

Dukungan penuh Pemerintah RI untuk kemerdekaan Palestina tidak hanya sampai disitu, Indonesia mengajak negara-negara Muslim untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan Palestina yang damai dan merdeka. Presiden Jokowi mengakui dan merasa terhormat karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam pertemuan KTT LB ke-5 OKI. Hal ini membuktikan bahwa Bangsa Indonesia turut serta berkontribusi dalam membahas dan memberikan solusi mengenai perdamaian di Palestina dan Al Quds Al-Sharif. "Semangat menjadi bagian dari solusi harus diutamakan, karena konflik masih terjadi di beberapa bagian di dunia, karena stabilitas dan perdamaian masih merupakan sebuah tantangan bagi dunia," kata Presiden.

Two State Solution

Awal dari semangat "perdamaian" dalam KTT LB ini diharapkan Jokowi harus terus digelorakan dengan cara damai dan demokratis, serta menghindari penggunaan kekerasan. "Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang lebih besar," terang Presiden. Diakui Presden Jokowi bahwa dukungan untuk proses perdamaian Palestina merupakan hal mendasar, akan hal itu, Indonesia mendorong semua faksi untuk bersatu guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Mengawali rangkaian KTT OKI, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas dukungan penuh pemerintah Indonesia dan OKI terhadap kemerdekaan Palestina. "Saya harap KTT OKI ke-5 ini mendorong persatuan negara-negara anggota OKI dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan isu Al-Quds Al Sharif", kata Presiden.

Dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina ini akan dilaksanakan sesuai kerangka two-state solution dan sejalan dengan berbagai resolusi PBB yang relevan. Indonesia mendukung berbagai terobosan, inisiatif untuk menyelenggarakan konferensi internasional tentang perdamian Palestina. "Konferensi OKI LB ke-5 ini akan dapat memberikan solusi konkrit, Indonesia akan terus berpartisipasi untuk mendukungnya," Kata Presiden.

Selain sebagai seruan perdamaian untuk Palestina, KTT OKI LB ke-5 di Jakarta kali ini juga dapat digunakan untuk menyerukan persatuan Palestina. Seruan persatuan untuk Palestina ini terungkap dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Pangeran El Hassan bin Talal dari Yordania. Menurut Presiden Jokowi, inisiatif dan terobosan yang lebih konkrit diperlukan dalam rangka menciptakan perdamaian di Palestina.

Munculnya berbagai isu terkait Palestina di berbagai media, seperti masalah perbatasan, pengungsi, sampai dengan persoalan air harus segera diselesaikan karena di berbagai negara, Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan Pemerintah Yordania yang memfasilitasi delegasi Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka Pembukaan Konsul Kehormatan RI di Ramallah.

Kuota Haji

Di tengah-tengah konferensi, Presiden menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Adel Bin Ahmed Al Jubeir. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta agar penambahan kuota haji bagi Indonesia dapat segera direalisasikan. Harapan tersebut disambut baik oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Sebagai tindak lanjut, Menteri Agama akan diutus Presiden ke Arab Saudi untuk merealisasikan rencana ini seperti penjelasan Tim Komunikasi Kepresidenan melalui rilis yang diterima Pinmas, Senin 7 Maret 2016.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Saudi Arabia dan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, pada pertengahan September tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa kuota jamaah haji Indonesia akan ditambah sebanyak 10 ribu. Selain soal tambahan kuota haji, kepada Menlu Saudi, Presiden juga menyampaikan harapan Indonesia atas terciptanya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. "Sebagai sahabat dekat, Indonesia ingin mengajak Arab Saudi untuk terus menyebar-luaskan Islam yang Rahmatan Lilalamin dan pesan-pesan perdamian. Indonesia senantiasa siap berkontribusi bagi terciptanya situasi yang kondusif di Timur Tengah," ucap Presiden.

M. Arif Efendi
| Foto: Romadanil

PRESTASI SISWA MADRASAH

PEMBASMI BAKTERI SAPI DARI MTSN 1 MALANG

ALAT PEMBASMI BAKTERI SAPI PERAH MENGHANTARKAN DUA SISWA MTSN 1 MALANG MERAIH EMAS DI AJANG ISPO 2016. ALAT TERSEBUT DIBUAT SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN DUA SISWA CERDAS TERSEBUT AGAR DIPEROLEH SUSU YANG BERSIH DARI SAPI PERAH YANG TERBEBAS DARI BAKTERI.

Sebuah kotak kecil dengan desain sederhana disaput warna abu-abu tidak tampak sebuah alat penting yang berguna menseterilkan bakteri sapi perah. Dua kabel berwarna merah dan hitam dengan karet tipis di ujung masing-masing yang kelak bisa menempel di tubuh seekor sapi terhubung dengan aki kecil sebagai penyuplai listrik. Kotak kecil ini adalah karya siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Malang yang berhasil meraih Medali Emas untuk Bidang Teknologi pada Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2016 yang digelar di Semarang pada 20-21 Februari 2016 lalu. Penemu alat tersebut adalah Amelia Putri Wulandari dan Nalita Livia Chandradevi.

Kedua siswi ini menciptakan alat terapi untuk membunuh bakteri pada sapi perah yang terkena penyakit mastisis (Mastitis Therapeutic Technology: Innovation of Dairy Cows Matitis Therapeutic Tool Through Electroporation Technology). Dengan menggunakan alat ini, susu yang dihasilkan oleh sapi akan bebas bakteri. Salah satu juri di ISPO menyatakan bahwa ini merupakan solusi terbaik yang bisa dilakukan karena selama ini peternak memakai antibiotik yang bisa mengkontaminasi susu yang dihasilkan sapi. Atas inovasi tersebut, kedua siswi MTsN 1 Malang mendapatkan medali emas, piagam dan uang penghargaan Rp2.000.000,00.

Kepada Majalah Ikhlas Beramal yang menemuinya di sela-sela aktivitas belajarnya, Amelia Putri Wulandari dan Nalita Livia Chandradevi mengatakan awal mula ide pembuatan alat muncul saat mereka melaksanakan study tour dan melihat sapi yang sakit. Karena merasa kasihan atas kondisi sapi yang sakit itu, munculah ide ingin membuat alat yang bisa menyembuhkan sapi tersebut

Selaku Guru pembimbing siswa MTsN 1 Malang, Lailatul Chusniah menjelaskan bahwa ada 500 laporan penelitian yang dipamerkan dan dilombakan di ISPO 2016. Dari jumlah itu, diambil 82 laporan untuk masing-masing 6 bidang. Laporan penelitian siswa MTsN 1 Malang masuk dalam bidang Teknologi. Dari 82 Laporan tersebut disaringlah menjadi 15 Finalis. Dan satu-satunya finalis dari tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah MTsN 1 Malang. Peserta lainnya adalah tingkat SMA.

Menurut Laili - panggilan akrabnya -, alat hasil kreasi siswa MTsN 1 Malang ini sudah dilakukan uji Laboratorium di Universitas Brawijaya. Selain itu, alat tersebut juga telah dilakukan Uji Lapangan di Peternakan Dau Malang selama dua minggu. "Alat ini menjadi solusi terbaik bagi peternakan sapi dan produksi susu. Sampai-sampai pihak panitia ISPO merekomendasikan kami untuk mengikuti lomba selanjutnya di Thailand. Prof. Riri Fitri Sari dari Universitas Indonesia yang menjadi juri di bidang Teknologi bersedia mendampingi kami untuk persiapan ke Thailand," tutur Laili.

Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Pacific Countries Social And Economic Solidarity Association (PASIAD), sebuah lembaga sosial dan pendidikan dari Turki. Kegiatan ISPO didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan sejumlah perguruan tinggi ternama, yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Negeri Semarang (UNES), dan Universitas Syiah Kuala. Tujuan dari ISPO adalah merangsang bakat-bakat muda untuk berpikir, melakukan pengamatan, mengembangkan dan menyelami rasa keingintahuannya yang mengarah pada suatu solusi praktis.

Tingkat Internasional

Setelah meraih Medali Emas untuk Bidang Teknologi pada ISPO 2016 yang digelar di Semarang, Amelia Putri Wulandari dan Nalita Livia Chandradevi yang saat ini menjadi siswa kelas VIII MTsN 1 Malang keduanya mendapat pembinaan khusus dari guru pembimbing untuk mengikuti perlombaan tingkat internasional di Thailand pada bulan Maret 2016 dengan harapan bisa meraih juara.

Disinggung soal mempatenkan alat tersebut, selaku guru pembimbing Amelia Putri Wulandari dan Nalita Livia Chandradevi, Chusniah mengaku belum ada rencana dan pemikiran apakah alat terapi pembunuh bakteri pada sapi perah ini akan segera dipatenkan. "Belum punya rencana, bila di patenkan. Semoga saja, karena sekarang lagi fokus

IDE PEMBUATAN ALAT MUNCUL SAAT MEREKA MELAKSANAKAN STUDY TOUR DAN MELIHAT SAPI YANG SAKIT. KARENA MERASA KASIHAN, MUNCULAH IDE INGIN MEMBUAT ALAT YANG BISA MENYEMBUHKAN SAPI TERSEBUT

untuk ke Thailand saja," kata Laili yang berharap Kementerian Agama terus mendukung target juara tersebut.

Kedua siswa yang bisa berbahasa Inggris dengan baik ini menyampaikan harapannya agar madrasah dan Kementerian Agama terus dapat memberikan dukungan atas prestasi mereka yang sudah diraih. "Saya senang dibimbing dan berharap dukungan penuh dari Kementerian Agama," kata Amelia Putri Wulandari yang pernah tinggal 2 tahun di Australia bersama orangtuanya.

Kepala MTsN 1 Malang Syamsudin menyampaikan bahwa prestasi-prestasi yang pernah diraih siswa MTsN 1 Malang selalu dilaporkan ke Kanwil Jatim. Syamsudin berharap, agar siswa yang berprestasi dan berpotensi jangan sampai meninggalkan Madrasah dalam melanjutkan jenjang pendidikannya. Saat ditanya terkait pembinaan kepada siswa berprestasi, Syamsuddin menyampaikan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dilakukan mulai Senin-Sabtu, ada kegiatan ekstra kurikuler untuk memfasilitasi siswa yang berbakat lain seperti, bakat seni, olahraga dan karya ilmiah. Siswa-siswa tersebut diberi bimbingan khusus secara periodik setelah pulang sekolah, pada hari Jumat dan Sabtu.

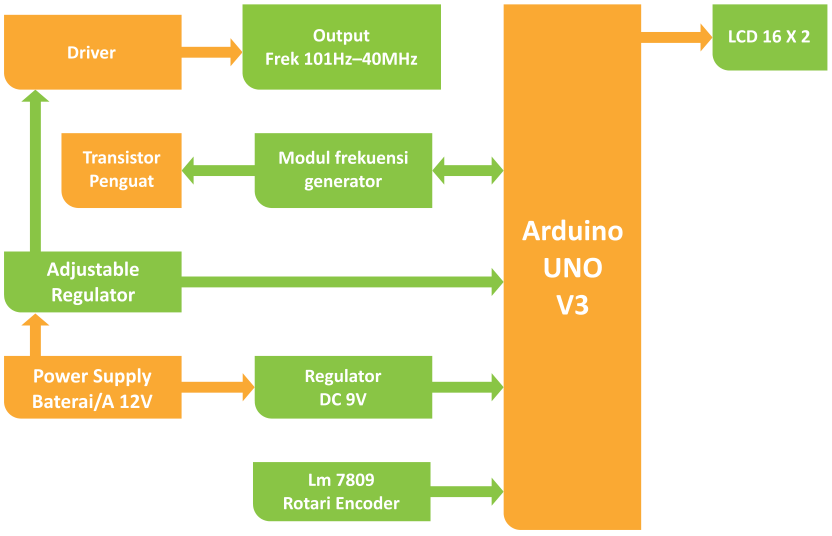

PRINSIP KERJA ALAT

Penempelan pen elektroda disesuaikan dengan letak kelenjar mamae (kelenjar ambing) pada ambing sapi pe rah yang terserang mastitis. Koloni bakteri Staphylococus aureus dialiri listrik dengan tegangan 9 volt selama 8 menit dan frekuensi listrik arus searah 900 hertz. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atauproton, dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik dapat berinteraksi dengan molekul bermuatan atau tidak bermuatan, juga dengan sel hidup pada makluk hidup.

Sel bakteri mengalami pembelahan yang tek terkendali yang dilakukan secara terus menerus, efek medan listrik akan mengganggu proses pembelahan sel. Aliran listrik juga dapat mengganggu proses sel memperbanyak diri dengan cara mitosis. Medan listrik memberikan pengaruh terkuat saat fase mitosis. Listrik arus searah inilah yang menghambat perkembangan dan menghancurkan bakteri dengan menggunakan prinsip elektroporasi, yaitu dengan melubangi membran sel bakteri lewat sengatan listrik.

Medan magnet ditimbulkan oleh power supply sebesar 9 volt dari input listrik arus searah accu 12 volt yang telah diubah menjadi tegangan sebesar 9 volt oleh IC Regulator LM7809. Arus listrik dari power supply diatur oleh arduinouno dan dibangkitkan oleh modul frekuensi agar menghasilkan frekuensi yang dibutuhkan. Arus listrik dan frekuensi dapat diatur sesuai kebutuhan melalui sebuah rotari yang nantinya akan terhubung ke pin elektroda sehingga akan menghancurkan bakteri dengan cara melubangi membran selnya.

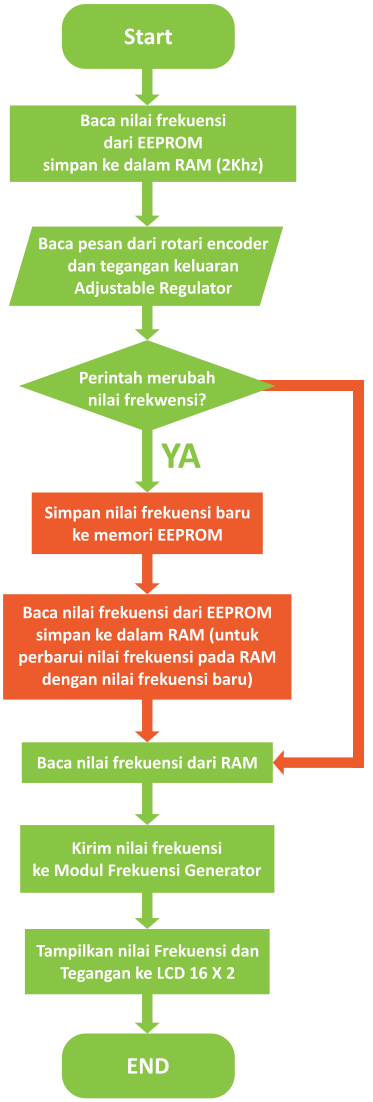

M. Arif Efendi

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1437H/2016M

IKHTIAR MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja selama enam hari di Saudi Arabia. Bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, kunjungan Menag ini kali untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1437H/2016M, termasuk menandatangani MoU dengan Menteri Urusan Haji Saudi, Bandar Muhammad Hajjar.

Menurutnya, setiap tahun, jelang pelaksanaan ibadah haji, negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia, melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Saudi. Kesempatan bertemu Menteri Urusan Haji Saudi dimanfaatkan Menag untuk menyampaikan beberapa usulan peningkatan kualitas layanan haji." Usulan itu tidak hanya semata peningkatan layanan jamaah haji Indonesia, lebih utama Pemerintah Indonesia mengajukan usulan agar kenyamanan jamaah haji dunia bisa didapat," terang Menag saat melakukan jumpa pers setibanya di Jakarta, Rabu 16 Maret 2016.

Berikut usulan perbaikan yang disampaikan Menag kepada Menteri Urusan Haji Saudi Arabia: Pertama, perbaikan kualitas tenda di Arafah agar dibuat permanen dan lebih kokoh. Pengalaman tahun 2015, beberapa tenda jamaah Indonesia roboh karena angin. Kedua, pembangkit listrik permanen yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik selama jamaah di Arafah. Ketiga, tenda Mina dibuat bertingkat. Mina adalah wilayah yang jelas batas-batasnya. Luas wilayah ini sekitar 7,8 km2, namun yang bisa didiami hanya 4,8 km2 karena selebihnya adalah pegunungan batu. Sementara itu, ketika menginap di Mina, seluruh jamaah haji diharuskan berada dalam kawasan ini. Padahal, total jamaah haji setiap tahunnya berkisar 2 juta orang, sangat padat.

Keempat, penyediaan fasilitas pos kesehatan *emergency* pada rute jamaah dari tenda di Mina menuju Jamarat. Keberadaan pos kesehatan diperlukan untuk mengantisipasi jamaah yang butuh pertolongan kesehatan saat dalam perjalanan dari Mina ke Jamarat atau sebaliknya.

Kepada Menteri Haji Saudi, Menag juga menanyakan perkembangan pengurusan santunan bagi jamaah haji yang menjadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Ada 61 korban dari Indonesia, terdiri dari: 12 orang wafat, dan 49 luka-luka. Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan untuk memberikan santunan kepada mereka. "Menteri Urusan Haji Saudi tegas mengatakan bahwa realisasi pencairan ini sudah mendekati penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian tahapan yang cukup panjang. " jelas Menag.

Apresiasi untuk Indonesia

Menteri Haji Saudi mengapresiasi usulan perbaikan layanan yang disampaikan Indonesia. Bahkan, tenda Arafah mulai tahun ini akan dipasang sejak 1 Dzulhijjah (delapan hari sebelum puncak haji) dan Indonesia diminta untuk mengecek langsung. "Jika ada tenda yang dinilai kurang kokoh, mereka akan memperbaikinya. Ada 30 - 35 maktab dari total 57 maktab Indonesia yang AC-nya akan diperbaharui," kata Menag.

Selain bertemu Menteri Urusan Haji, Menag juga melakukan pertemuan dengan muassasah, baik Muassasah Asia Tenggara yang Adadi Makkah maupun Muassasah al Ahliyah al Adilla di Madinah. Muassasah adalah lembaga di luar Pemerintah yang mendapat kewenangan penuh dari Saudi untuk mengurus jamaah. Kedua lembaga ini melayani hal ihwal jamaah yang terkait dengan dokumen, pemondokan, katering transportasi darat, dan lainnya. "Dari pertemuan itu, disepakati adanya upaya peningkatan layanan agar lebih baik," jelas Menag.

Menag juga bertemu Dirut Bandara Amir Muhammad dan Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Sofyan Abdussalam. Kedua belah pihak sepakat bahwa jamaah haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama akan mendarat di Bandara AMAA Madinah seperti padat ahun lalu. Kesepakatan ini penting agar jamaah haji Indonesia tidak mengalami kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang dari Tanah Air menuju Tanah Suci. Selain itu, jamaah haji yang diberangkatkan pada gelombang kedua juga akan bertolak dari Bandara AMAA Madinah menuju Tanah Air.

Menag menilai kunjungan kerja ini kali berjalan sukses. Menteri Urusan Haji Saudi bahkan secara eksplisit mengapresiasi jamaah haji Indonesia karena dinilai tertib dan taat terhadap aturan di Saudi. Apresiasi yang sama disampaikan Dirut Bandara AMAA Madinah. Dia menilai Indonesia sebagai negara terbaik dalam mengorganisasi jamaah haji sehingga tercepat pengurusannya, sejak jamaah keluar dari pesawat sampai meninggalkan bandara.

Iwan Supriyadi

SISTEM INI AKAN LEBIH MENGEFISIENKAN WAKTU KERJA DAN MEMUDAHKAN KOORDINASI

INOVASI LAYANAN HAJI

MENGOPTIMALKAN KINERJA PETUGAS DENGAN SISKOPAHAT

AKAN ADA HAL BARU LAGI PADA MUSIM HAJI 1437H/2016M. KEMENTERIAN AGAMA AKAN MENGGUNAKAN SISTEM KOMUNIKASI PETUGAS HAJI TERPADU (SISKOPAHAT) UNTUK MENGOPTIMALKAN KINERJA PETUGAS HAJI.

Sistem aplikasi hasil kerjasama Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) KJRI Jeddah dengan Telkom Indonesia ini telah dirilis Menag Lukman Hakim Saifuddin di Jeddah. "Saya senang dengan inovasi yang dilakukan rekan-rekan di KUHI dalam memantau para petugas di lapangan yang pada akhirnya dapat memperbaiki pelayanan kita kepada jamaah haji Indonesia," kata Menag setibanya di Jakarta dari kunjungan kerja di Saudi Arabia, Rabu 16 Maret 2016.

Menurut Menag, sistem ini merupakan pengembangan dari SMS Center yang diresmikan tahun lalu. Sistem komunikasi ini mempunyai kemampuan yang sangat diperlukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saat operasional, yaitu: kemampuan memetakan tugas, tanggung jawab dan lokasi petugas secara sistematis dan komprehensif, kemampuan mengendalikan dan mengkoordinasi dari posko, dan menampilkan dan monitoring posisi dan lokasi riil petugas lapangan berbasis GPS dan Google Maps. "Sistem yang ada sekarang ini dengan kemampuan tiga besar tadi diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja para petugas di lapangan," jelasnya.

Terkait fungsi pemetaan, sistem ini akan lebih mengefisienkan waktu kerja dan memudahkan koordinasi. Sistem ini memetakan struktur PPIH menjadi 9 level, mulai dari Amirul Hajj, penanggung jawab, koordinator (Dubes), koordinator harian (Konjen), Ketua PPIH, para Kabid dan Kadaker, hingga kasi dan kasektor, serta korwil.

Fungsi pengendalian aktivitas akan memberikan kemudahan dalam distribusi informasi karena memungkinkan pengiriman secara bersamaan ke seluruh petugas haji atau kelompok tertentu sesuai bidang tugas. Selain itu, aplikasi ini juga dapat secara otomatis menerima dan mengkompilasi informasi dan laporan aktivitas petugas haji. Termasuk juga mengirim permintaan khusus ke dan dari petugas tertentu, sekaligus memantau perkembangannya.

Adapun terkait fungsi pemantauan, sistem informasi ini dapat memantau posisi petugas saat melakukan absensi, masuk dan pulang. SISKOPAHAT juga dapat memantau posisi seluruh petugas secara real time dan pencarian posisi real time maupun historical position petugas selama jam kerja (24 jam terakhir).

Menurut Menag, inovasi semacam ini harus didukung. Selain sejalan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama (inovatif), sistem ini juga didukung aplikasi yang dapat mengefisienkan pelaksanaan tugas.

Menandai peluncurannya, Menag mencoba sistem komunikasi yang akan digunakan para petugas haji pada musim haji tahun ini. "Diinstruksikan kepada seluruh petugas yang ada di lapangan agar segera mengecek kembali perintah yang diberikan tadi pagi jam 8 dan melaporkannya," tulis Menag dalam simulasi yang dipandu oleh petugas dari KUHI dan teknisi dari PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) Saudi Arabia.

Instruksi yang disampaikan Menag, masuk dalam inbox para petugas, baik Jeddah, Madinah, maupun Makkah. Hal ini terlihat dari layar yang terpampang di aula serbaguna KUHI. Pada saat yang sama, keberadaan petugas terpantau di di papan indikator.

Moh Khoiron

MAN 13 JAKARTA

SIAP BERSAING

SEIRING TINGGINYA MINAT ORANG TUA YANG INGIN PUTRA PUTRINYA BELAJAR DI MADRASAH, MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 13 JAKARTA TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN SARANA PRASARANANYA.

Sebuah ruangan dengan desain interior dapur modern lengkap dengan perangkatnya tertata rapih, warna orange memberi aksentuasi tersendiri dengan balutan kaca yang mendominasi dindingnya. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk setiap sesi praktek keterampilan ini. Saat IB mengunjungi dapur ini, satu kelompok siswa dengan celemek biru sedang membuat Spaghetti, kuliner khas negara Italia dibimbing dua guru sarjana tata boga lulusan Unibersitas Negeri Jakarta (UNJ), satu kelompok lainnya meracik burger dengan bahan utama tempe sebagai pengganti daging sapi.

Keterampilan tata boga menjadi salah satu ciri khas keterampilan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 13 Jakarta. MAN yang berada di bilangan kawasan Lenteng Agung ini selain memberikan keterampilan tata boga, siswa juga dibekali keterampilan tata busana dan keterampilan elektronika komputer. "Tujuannya agar siswa-siswa kami tidak hanya mampu mengoperasikan komputer, tapi juga mengerti desain grafis, membuat animasi, bahkan membuat film-film pendek. Kami membekali mereka tidak hanya dari sisi akademis, tapi juga non-akademis atau ekstrakurikuler yang sifatnya aplikatif," kata Kepala MAN 13 Nuroto kepada IB yang di temui di ruang kerjanya.

Madrasah yang mengusung motto: *Care, Share, and Trusted* berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan MAN 13 yakni membentuk alumni yang memiliki 3T. Tinggi moral dan budi pekerti, tinggi ilmu pengetahuan dan tinggi keterampilan. "Itu yang kita jual, yang kita kampanyekan kepada publik melalui media brosur, pamflet, dan website, dan perangkat sosialisasi lainnya," ujar Nuroto.Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah langkah strategis dan terobosan penting diinisiasi oleh para pemangku MAN 13 yang dahulunya merupakan kelas jauh dari MAN 7 Jakarta.

Dengan dukungan 86 tenaga pengajar yang 65 persennya sudah bergelar master dan 1 orang Doktor, MAN 13 seperti dinyatakan Nuroto siap bersaing dengan SMA. Menjaga kualitas, peningkatan SDM guru menjadi salah satu faktor elementer tercapainya tujuan madrasah dan menjadi distingsi MAN 13 ini kepada orangtua murid sebagai *customer* selain sarana dan prasarana yang linear dengan tuntutan kekinian. "Kami mendorong upgrade untuk para pengajar, misalnya pembelajaran melalui sistem Buku Elektrik. Jadi sekarang tidak ada lagi guru yang ceramah-ceramah," tandas Nuroto yang sebelumnya bertugas di MAN 4 Jakarta. Dalam amatan IB, seluruh kelas di MAN 13 sudah difasilitasi dengan perangkat multimedia sebagai sarana pembelajaran guru dan siswa-siswanya.

Keberadaan MAN 13 dengan distingsi dan prestasi yang dimilikinya mendorong tingginya animo orangtua siswa yang ingin putra putrinya belajar di madrasah yang tahun 2014 lalu meraih Juara 1 Lomba Cepat Tepat Ekonomi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Data tahun 2015, siswa yang mendaftar di MAN 13 Jakarta mencapai 1.150,dan setelah melalui sejumlah tes dan seleksi hanya 280 yang lulus atau sekitar 25% yang diterima, jumlah ini disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar dan fasilitas pembelajaran lainnya.

Untuk menjaring siswa yang diharapkan, MAN 13 Jakarta tidak melakukan pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) didahului oleh SMA yang sistem online. "Kami kan sistemnya tes, jadi kami duluan. "Kami tidak ingin di nomor duakan," tandas Nuroto. Merujuk kalender pendaftaran MAN 13, tanggal 1 April 2016 sudah dimulai penerimaan siswa, kemudian seleksi berkas, setelah itu pengumuman kelulusan. "Jadi anak-anak itu belum lulus SMP atau MTs namun sudah masuk ke MAN 13. Kami tidak mau mendapat sisa-sisa dari pendaftaran SMA," ucap Nuroto.

Berbasis ICT

Madrasah Aliyah dengan 85 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri ini dalam proses pembelajarannya terus mengoptimalkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Di antara pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran siswa, MAN 13 sudah menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi ujian nasional tahun 2016 ini. Saat ini, terdapat 103 komputer untuk UNBK dengan dukungan tiga server yang terbagi dalam tiga ruang kelas berpenyejuk ruangan.

Selain digunakan untuk UNBK, siswa MAN 13 kini tidak lagi menggunakan kertas sebagai bahan konvensional untuk setiap ulangan harian atau semesternya. "Semua guru wajib menyelenggarakan ulangannya dengan perangkat CBT (*Computer Based Test*). Anak-anak setiap ulangan harian sudah tidak memegang kertas, anak-anak menghadapi monitor dan dia tinggal melihat saja soal yang terpampang," kata Nuroto.

Saat ini MAN 13 dalam proses pembelajarannya menggunakan Kurikulum 2013. Dalam pandangan Nuroto, dalam Kurikulum 2013 seseorang tidak hanya mengajar pada konten kurikulum tersebut seperti matematika. Tetapi perangkat guru disitu ada yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti tersebut mencakup kompetensi religius, kompetensi sosial kemasyarakatan, kompetensi inti tentang konten mata pelajaran keilmuannya, serta kompetensi tentang ilmu fisikomotorik. "Semua guru saya tekankan walaupun bukan guru agama, setiap mengajar harus ada kompetensi inti yang pertama yaitu tentang keagamaan," kata Nuroto yang menyelesaikan sarjananya di IAIN (kini UIN) Jakarta.

Bagi Nuroto, setiap guru sekarang berkewajiban mengajarkan budi pekerti atau moral keagamaan kepada siswanya. Kita tekankan agar setiap pembahasan mata pelajaran dikaitkan dengan konten religius. "Sampai-sampai pelajaran IPA dan Agama kita kolaborasikan dengan nama teaching colaboration. Jadi, penciptaan manusia versi Al-Qur'an itu bagaimana dan versi biologi itu bagaimana," ucapnya. Dikatakan Nuroto, keilmuan agama dan sains itu satu kesatuan yang harus dipahami benar itu berbeda disiplin.

Proyeksi MAN 13

Sebagai pendidik dan kepala madrasah, Nuroto melihat di metropolitan ini kalau lembaga madrasah tidak eksis ini sangat berbahaya untuk generasi penerus apalagi dikaitkan dengan pernyataan madrasah lebih baik, lebih baik madrasah. Diakui Nuroto, ia berobsesi agar madrasah tidak dinafikan eksistensi dan kualitasnya. "Obsesi saya, saya ingin madrasah tidak menjadi pilihan kedua dan membuktikan prestasinya di masyarakat seperti itu, sehingga tidak hanya slogan saja yang mengatakan madrasah lebih baik, lebih baik madrasah kita sudah lakukan," katanya.

Selain pandangan di atas, Nuroto selalu menyampikan motivasi bagi peserta anak didiknya agar ketika mereka berkumpul dengan anak STM (Sekolah Teknik Menengah), atau SMA (Sekolah Menengah Atas), maka anak MAN 13 harus menjadi imam. "Jadi obsesi madrasah kedepannya baik skill ilmu pengetahuan umum ataupun agamanya tidak tertinggal, karena kami punya hak yang sama bisa menjadi doktor, insinyur, bisa kuliah diluar negeri, ini kami akan buktikan," ujarnya optimis. Dan satu obsesi yang belum terlaksana mengenai sarana, Nuroto ingin MAN 13 dibuatkan sarana untuk *boarding* (asrama). "Kami siap untuk mengelola sarana tersebut," tandasnya.

Syaiful Huda, Dodo Murtado

Yaa… dalam hitungan menit, mereka akan menyaksikan moment ketika rembulan menutup sinar mentari atau yang dikenal sebagai gerhana matahari. Dalam kerangka syukur, mereka hadir untuk ikut bersama-sama melakukan observasi dari lokasi yang juga menjadi tempat penangkaran Penyu dan kawasan pelestarian Mangroove. Sekitar pukul 06.10, mentari yang awalnya tertutup, muncul dari balik awan, menampakkan sinar terangnya yang masih berwarna kemerahan. Dipimpin ketua tim observasi, Fajar Fathurrahman, kacamata gerhana mulai dibagikan.

Menurut Fajar, kontak awal gerhana terjadi pada pukul 06.21. Hanya posisinya masih tertutup awan. Matahari kembali muncul di atas awan pada sekitar pukul 06.28. Saat itu, kontak gerhana mulai tampak. Perlahan sinar mentari tertutup rembulan menyisakan sisi gelap dalam bulat terang bagian atas matahari. Perlahan, sisi gelap itu membesar dan terus membesar, sepertiga, setengah, sampai hampir tertutup semua. Jamaah yang hadir mulai melangitkan takbir dan tasbih, mengagungkan dan mansucikan Sang Rahman.

Tepat pukul pukul 07.21, gerhana memasuki masa puncak, mentari tertutup sekira 90%. Suasana mendadak redup seperti jam lima sore. Selang dua menit, suasana perlahan kembali terang. Marhadi (40), warga asli pulau Pramuka ini mengaku bahagia berkesempatan menyaksikan fenomena gerhana. "Ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Kita semakin percaya bahwa Allah Maha Besar," katanya.Hal sama disampaikan Khudriyah (50), guru MI 17 Kepulauan Seribu. "Subhanalllah. Dulu pernah terjadi tapi tidak bisa lihat seperti ini," tuturnya mengekspresikan kegembiraannya.

Selepas puncak gerhana, masyarakat kembali ke Masjid Al-Makmuriyah untuk menjalani sunah Nabi, Salat Gerhana. Sebagai imam, M. Faishol Hasan, mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, membaca Surat At-Takwir pada

LAPORAN PEMANTAUAN GMT
DI KEPULAUAN SERIBU

KETIKA REMBULAN MENUTUP MENTARI DI LANGIT KEPULAUAN SERIBU

RABU 9 MARET 2016,
WAKTU MENUNJUKAN PUKUL 06.00 WIB,
KETIKA MASYARAKAT MUSLIM PULAU PRAMUKA
YANG SUDAH BERKUMPUL DI MASJID AL MAKMURIYAH
BERGERAK BERSAMA MENUJU TANAH LAPANG
DI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU.
MENYUSURI JALAN KECIL KAMPUNG NELAYAN
SEKIRA 500 M, MASYARAKAT BERJALAN BERSAMA
UNTUK MENJADI SAKSI TERJADINYA
FENOMENA ALAM PENANDA KEKUASAAN
SANG MAHA RAHMAN.

rakaat pertama dan Al-A'la pada rakaat kedua. Sementara sebagai Khatib, KH. Khudrin Hasbullah mengajak umat Islam untuk merenungi fenomena gerhana dengan kejernihan hati dan fikir agar menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Menyitir hadits Rasulullah, Khatib menjelaskan bahwa adanya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang, juga bukan karena kelahiran atau kehidupannya. Keduanya merupakan bukti kekuasaan Allah. Jika kalian melihat kejadian gerhana, maka shalatlah.

Ditemui usai Salat Gerhana, Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ada yang mengatur dan menjadi kewajiban manusia untuk menjaganya. "Saya sering mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan, karang jangan dirusak, dan lainnya karena kalau dirusak dan terjadi bencana juga kita yang akan menerima," terangnya.

Hal sama dikatakan Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Abdurrahman. "Dari peristiwa ini kita bisa ambil iktibar bahwa Allah mengatur segalanya, dan sebagai refleksi rasa syukur kita melaksanakan Salat Kusuf bersama masyarakat," ujarnya.

Antusiasme, lanjut Abdurrahman, menunjukan rasionalitas masyarakat semakin baik. Semuanya bisa menikmati fenomena alam yang menandai Kemahakuasaan Allah. "Apapun bisa terjadi karena Allah Maha Menghendaki," pesan Abdurrahman.

Abdurrahman berharap, ke depan kemampuan pencernaan masyarakat, khususnya di Kepulauan Seribu terhadap gejala alam semakin baik sehingga fenomena bisa dinikmati dan dipelajari.

Moh Khoeron
| Foto: Chairul Wahyudi

KEBIJAKAN TATA KELOLA LAYANAN HAJI

KINI PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN HAJI SEMAKIN MUDAH

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (PHU) KEMENTERIAN AGAMA TERUS BERINISIASI MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM TATA KELOLA LAYANAN TERHADAP CALON JAMAAH HAJI. KEBIJAKAN TERBARU ADALAH DENGAN MEMANGKAS PROSES PENDAFTARAN MENJADI HANYA DUA TAHAP DARI SEBELUMNYA SAMPAI EMPAT TAHAP.

Kebijakan tersebut tertuang dalam SK Dirjen PHU No 28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler yang ditetapkan pada 27 Januari 2016. "Tahun ini pendaftaran hanya dua tahap. Semula dilakukan sebanyak empat tahap. Ini memangkas waktu dan biaya serta lebih mempermudah bagi calon jamaah. Ini hadir karena adanya inisiasi," kata Dirjen PHU Abdul Djamil saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Layanan Haji Siskohat di Cisarua Bogor, Rabu 23 Maret 2016.

Hal sama ditegaskan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori. Menurutnya, regulasi baru ini rencananya dilaksanakan mulai April 2016. "Prinsipnya menyederhanakan pendaftaran haji dari empat tahap menjadi dua tahap, sehingga pendaftaran akan lebih efektif, lebih mudah, dan dipastikan tidak dipungut biaya," kata Ahda, Kamis 24 Maret 2016.

Dengan aturan baru ini, maka calon jamaah haji cukup membuka tabungan di Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Setelah mendapat validasi, calon jamaah bisa mengisi formulir pendaftaran haji di Kemenag domisili. "Kemudian cetak nomor porsi di sana, maka proses pendaftaran selesai.Tidak perlu bolak balik," ujar Ahda. Sebelumnya, calon jamaah haji harus kembali ke BPS BPIH setelah mendaftar di Kemenag domisili untuk mencetak nomor porsi setelah itu kembali lagi ke Kemenag domisili untuk menyampaikan bukti cetak tersebut.

Meski proses pendaftarannya dimudahkan, Ditjen PHU memperketat persyaratan pendaftaran. MenurutAhda, jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Dalam persyaratan pendaftaran juga disebutkan, calon jamaah haji berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar. Dua aturan tersebut sengaja dibuat untuk membatasi jumlah pendaftar jamaah haji reguler yang setiap tahunnya membludak.

Secara nasional, Kemenag mencatat terdapat tiga juta orang yang sedang mengantre berhaji. Dengan tak adanya penambahan kuota jamaah haji pada 2016--Pemerintah Arab Saudi masih menetapkan pemangkasan kuota jamaah haji 20 persen dari kuota normal sehingga sama dengan tahun sebelumnya, yakni 168.800 orang--maka waktu antrean dipastikan makin panjang.

Untuk itu, Ditjen PHU terus berupaya melakukan langkah optimalisasi pemanfaatan kuota yang ada. Salah satunya dengan menyederhanakan proses pelunasan menjadi hanya dua tahap dengan inisiatif membuka pelunasan bagi calon jamaah haji kuota cadangan. Pengalaman tahun lalu kebijakan ini terbukti efektif dalam pemanfaatan kuota. Padahal tahun-tahun sebelumnya, pelunasan dibuka sampai enam tahap dan berdampak pada adanya sisa kuota. "Saya tidak mau kuota tersisa digunakan serampangan. Mesti harus dialokasikan sesuai dengan ketentuan akuntable dan transparan," kata Abdul Djamil.

Kondisi antrean haji tersebut menggambarkan antusiasme warga untuk berhaji. Jika tidak dikelola dengan baik, jelas akan berdampak pada makin panjangnya antrean. Dua persyaratan, yakni jamaah yang pernah berhaji boleh mendaftar lagi pada 10 tahun berikutnya danusia minimal daftar berhaji 12 tahun diharapkan bisa mengatur dan mengurangi masa tunggu calon jamaah haji. Sebab, jika dirata-ratakan, saat ini masa tunggu pemberangkatan haji berkisar 18-19 tahun.

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada calon jamaah adalah terkait pembatalan haji. Proses pembatalan yang awalnya membutuhkan waktu lama dan panjang, prosedurnya kini disederhanakan. Kalau sebelumnya calon jamaah harus mengurus ke Kemenag Kabupaten/Kota lalu ke Kanwil Kemenag Provinsi, baru ke Ditjen PHU, sekarang dipangkas, tanpa harus ke Kanwil Kemenag provinsi. Artinya dari Kankemenag, langsungkeDitjen PHU. "Pembatalan haji juga lebih praktis dan transparan," katanya.

Proses pengembalian uang pembatalan haji juga diupayakan bisa diterima lebih cepat oleh calonjamaah haji. Jika sebelumnya jamaah bisa menunggu hingga satu bulan, saat ini diupayakan maksimal hanya 11 hari. "Sebelumnya calon jamaah tidak tahu uangnya sudah kembali atau belum, waktunya juga lama bisa sampai sebulan lebih. Sekarang, diupayakan maksimal hanya 11 hari. Selain itu, calon jamaah juga bisa ikut memantau bagaimana prosesnya. Bisa dilihat secara transparan uangnya sudah sampai di mana," jelas Ahda. Aturan yang akan mulai diterapkan pada April 2016 ini diharapkan bisa membenahi pelayanan haji.

Kadar Santoso

KEBIJAKAN TATA KELOLA ANGGARAN

KEHADIRAN BIMAS KATOLIK, HARUS DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH UMAT

DI TAHUN ANGGARAN 2016 INI, DITJEN BIMAS KATOLIK MEMANTAPKAN KOMITMENNYA UNTUK BERUPAYA MENGHADIRKAN BIMAS KATOLIK BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN UMATNYA. UNTUK ITU, SEMUA JAJARAN PEJABAT DAN APARATUR DITJEN BIMAS KATOLIK DIHARAPKAN DAPAT MENYUKSESKAN ANGGARAN DENGAN MENINGKATKAN KOMITMEN BERSAMA DAN AKUNTABILITAS YANG TERUJI.

Setiap program kerja harus memberi makna bahwa Bimas Katolik hadir di tengah-tengah umat. Kehadiran kita harus benar-benar dirasakan umat Katolik karena menjawabi kebutuhan umat. Maka semua jajaran pejabat dan aparatur Direktorat Jenderal Bimas Katolik diharapkan dapat menyukseskan anggaran dengan meningkatkan komitmen bersama dan akuntabilitas yang teruji. Penegasan tersebut menjadi poin penting yang ditekankan Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi saat memberikan arahan dan pandangannya dalam Forum Konsultasi Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah, tanggal 5-8 Maret 2016 di Jakarta. Ditjen Bimas Katolik berkomitmen penuh pada implementasi lima nilai budaya kerja, juga mendukung program wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM). “Ini harus menjadi tekad Bimas Katolik Pusat dan Daerah juga,” tandas Dirjen.

Forum ini seperti dikatakan, ujar Dirjen, menegaskan tentang garis-garis kebijakan Ditjen Katolik yang menjadi penekanan dalam proyeksi program kegiatan Bimas Katolik. Diantaranya, meningkatkan kualitas mutu lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan keagamaan Katolik, jumlah Taman Seminari (PAUD), SMAK dan PTAKS yang terus bertambah. Ia mengingatkan tema-tema aktual yang perlu menjadi roh dalam setiap kegiatan. Misalnya, Keluarga, perkawinan beda agama, RUU Perlindungan Umat Agama, Masalah Hukuman Mati, Pernikahan dan perceraian, Isu Gender, dan Bela Negara menjadi bahan dalam program kegiatan sehingga benar-benar berguna bagi masyarakat.

Selain isu isu penting di atas, forum konsultasi menjadi medium bersama untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui usaha pemberian bimbingan kepada masyarakat Katolik dalam berbagai aktivitas program kegiatan misalnya pertemuan serta pemberian bantuan yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Usaha lainnya, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama melalui serangkaian aktivitas seperti dialog dan konsultasi, pemberian bantuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dirjen juga menekankan tentang pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui usaha pemberian bantuan kepada tenaga pendidik, lembaga pendidikan keagamaan termasuk di dalamnya pertemuan pembinaan.

Di hadapan lebih dari 200 Pejabat Pusat dan Daerah, Dirjen pun menyinggung tentang pelaksanaan pengelolaan anggaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik baik di Pusat maupun di Daerah. “Sampai saat ini kita akui bahwa jumlah aparat dan kompetensinya masih jauh dari harapan, maka menjadi penting upaya peningkatan kualitas SDM tersebut,” ungkap Dirjen. Meski demikian, Diren menyatakan apresianya terhadap realisasi anggaran 2015 yang menyerap lebih dari 84 persen dari anggaran yang disediakan. “Untuk itu saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras kita semua,” ucap Dirjen.

Adapun alokasi anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 824.450.417.000, dengan penyebarannya pada Fungsi Pendidikan Rp. 616.426.664.000, Fungsi Agama sebesar 35.287.055.000, dan Fungsi Pelayanan Umum sejumlah 172.736.698.000. Sedangkan sebaran alokasi anggaran Tahun 2016 Pusat (DITJENBIMAS Katolik) adalah Rp. 66.482.592.000 atau 8,06 % dari anggaran yang disediakan, dan untuk Daerah (324 Satker: 1 Pusat, 33 Kanwil/Provinsi dan 290 Kab/Kota Kankemenag – 135 satker Kab/kota yang memiliki struktur Bimas Katolik) senilai Rp. 757.967.825.000 atau 91,94 % dari anggaran.

Selain Dirjen Bimas Katolik, hadir pula sebagai Pembicara diantaranya, Sekretaris Eksekutif KWI – Rm. Edy Purwanto Pr, Biro Perencanaan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Anggaran II – Kementerian Keuangan, Sekretaris DITJENBIMAS Katolik, Direktur Urusan Agama Katolik, dan Direktur Pendidikan Katolik.

Maria Masang, Dodo Murtado

TATA KELOLA PT KEAGAMAAN NEGERI

2016, PT HINDU TARGETKAN AKREDITASI B

DI ERA MASYARAKAN EKONOMI ASEAN DAN PERSAINGAN GLOBAL, PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU DITUNTUT MEMPERSIAPKAN DIRI DENGAN MENINGKATKAN STANDAR PENDIDIKAN BERMUTU DAN PEMBENAHAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL PT HINDU

Pendidikan Tinggi (PT) Hindu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk membangun kemampuan sehingga dapat berkompetisi dalam persaingan pasar bebas di masa mendatang. Agar hal tersebut dapat terwujud diperlukan standar pendidikan yang bermutu dengan melakukan pembenahan internal maupun eksternal di Perguruan Tinggi Agama Hindu. Penekanan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, I Ketut Widnya yang memaparkan materi "Akselerasi Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan Tinggi Agama Hindu" sekaligus membuka resmi Pertemuan Pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan Pengelola Perguruan Tinggi Agama Hindu di Denpasar Bali, 2-4 Maret 2016.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen guna akselerasi dalam pencapaian peringkat B dalam akreditasi pada perguruan tinggi di bawah Ditjen Bimas Hindu, yang berkaitan erat dengan rencana strategis dari Ditjen Bimas Hindu yang menargetkan pada tahun 2019 Perguruan Tinggi Hindu dapat memiliki akreditasi minimal B.

Kegiatan yg diikuti oleh 50 peserta ini berasal dari 3 Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri, 8 Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta, dan perwakilan dari Pejabat Ditjen Bimas Hindu Pusat Dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 hari menghadirkan 5 orang Narasumber, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Ph.D. (Dirjen Bimas Hindu), I Wayan Suharta, S.Ag., M.Si. (Sekretaris Ditjen Bimas Hindu), Drs. Ida Bagus Gede Subawa, M.Si. (Direktur Pendidikan Hindu), I Made Sutresna, S.Ag., MA. (Kasubdit Pendidikan Tinggi Hindu), dan Adil Basuki Ahza (Dosen IPB yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BAN-PT).

Nara sumber Adil Basuki Ahza yang memiliki pengalaman luas dalam akreditasi perguruan tinggi dan banyak mengetahui tentang penjaminan mutu perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri menekankan tentang sumber utama dapat berkembangnya sebuah perguruan tinggi adalah visinya. "Untuk mengevaluasi ke arah yang lebih baik maka visi tersebut dapat direvisi setiap tahunnya," ujar Adil. Disamping itu, tandas Adil, untuk menjadi perguruan tinggi yang besar pasti diperlukan dana yang besar pula, Bapak Adil dengan pengalamannya di luar negeri mengatakan perguruan-perguruan tinggi besar di luar negeri banyak mendapatkan asupan dana dari para alumninya. "Jadi diharapkan para pengelola perguruan tinggi dapat merangkul para alumninya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkembang lebih baik," ucap Adil yang menjabat Sekretaris Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Good Governance

Setiap aparatur pemerintahan memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat terutama dalam upaya menujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu penerapan prinsip prinsip Good Governance adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar atau ditunda. Seperti halnya dalam penyelenggaraan pengadaan penyedia barang dan jasa (barjas). Sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah., agar proses pengadaan berjalan efektif, transfaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Untuk mencapai good governance dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bimas Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu I Ketut Widnya mendorong agar kualitas SDM aparatur Negara Khususnya pegawai dilingkungan Ditjen Bimas Hindu kementerian Agama RI dalam hal pengadaan barang dan jasa mutlak terus ditingkatkan. Harapan ini disampikan Dirjen dalam Sosialisasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Pusat dan Wilayah serta Perguruan Tinggi Hindu Tahun 2016 di Denpasar, 16 s.d. 18 Maret 2016.

AA, Boy Azhar

VICON SOSIALISASI REGISTRASI ONLINE SIMDIKLAT

SIMDIKLAT HARUS MUDAH DIAKSES MASYARAKAT

SEBAGAI INSTITUSI STRATEGIS YANG MENJADI DAPUR RISET KEMENTERIAN AGAMA, SEJUMLAH INISIASI INOVASI DAN TEROBOSAN PENTING DIHELAT BADAN LITBANG DAN DIKLAT DALAM MENINGKATKAN LAYANAN DALAM BIDANG PENELITIAN DENGAN MENGOPTIMALKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. BENTUK INOVASI TERSEBUT YAITU SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN (SIMDIKLAT) KEMENTERIAN AGAMA.

Untuk mengoptimalkan layanan ini, Balitbangdiklat melakuan mensosialisasikan registrasi online ke seluruh Admin Sistem Informasi Kediklatan (Simdiklat) Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan (BDK) Padang, melalui video conference (Vicon) dari Gedung Kemenag Thamrin, JakartaKamis 28 Januari 2016. Hadir dalam video conference tersebut, Kabalitbang dan Diklat Abd. Rahman Mas'ud dan Sekretaris Badan, Rahmat Mulyana Sapdi. Sedang dari BDK Padang, hadir Kepala Balai, Kepala TU dan para WI.

Dalam kesempatan tersebut, Kabalitbang menguaraikan Kebijakan Badan Litbang dan Diklat tentang ICT. Sedang Sekretaris Badan memaparkan Urgensi Simdiklat. "Perkembangan IT sudah sangat luar biasa. Sebaik dan sebijak mungkin kita memanfaatkan perkembangan IT ini sebagai sebuah sistem yang berguna, dan juga untuk memudahkan pekerjaan. Semoga, ke depan, Simdiklat ini bisa kita lakukan kontinyu," harap Rahmat Mulyana.

Simdiklat merupakan sebuah sistem aplikasi baru yang mencoba diperkenalkan Balitbangdiklat Kemenag. Karenanya, diperlukan continuity dan sustainability dalam menjalankannya. "Balai Diklat adalah centre of learning bagi pegawai. Karenanya, besar harapan masyarakat pada kita untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik. Semoga, ke depan, Simdiklat dapat mudah diakses oleh masyarakat luas, baik kurikulum diklat, jenis-jenis pelatihan yang akan diselenggarakan, hingga besaran unit cost pun dapat diakses sebagai bentuk keterbukaan informasi publik," katanya.

Saat ini, Badan Litbang dan Diklat sedang merancang beberapa aplikasi, seperti Sistem Informasi Kelitbangan (Simlitbang), Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran (SIPPA), e-office, dan e-library.

Pujiyanto

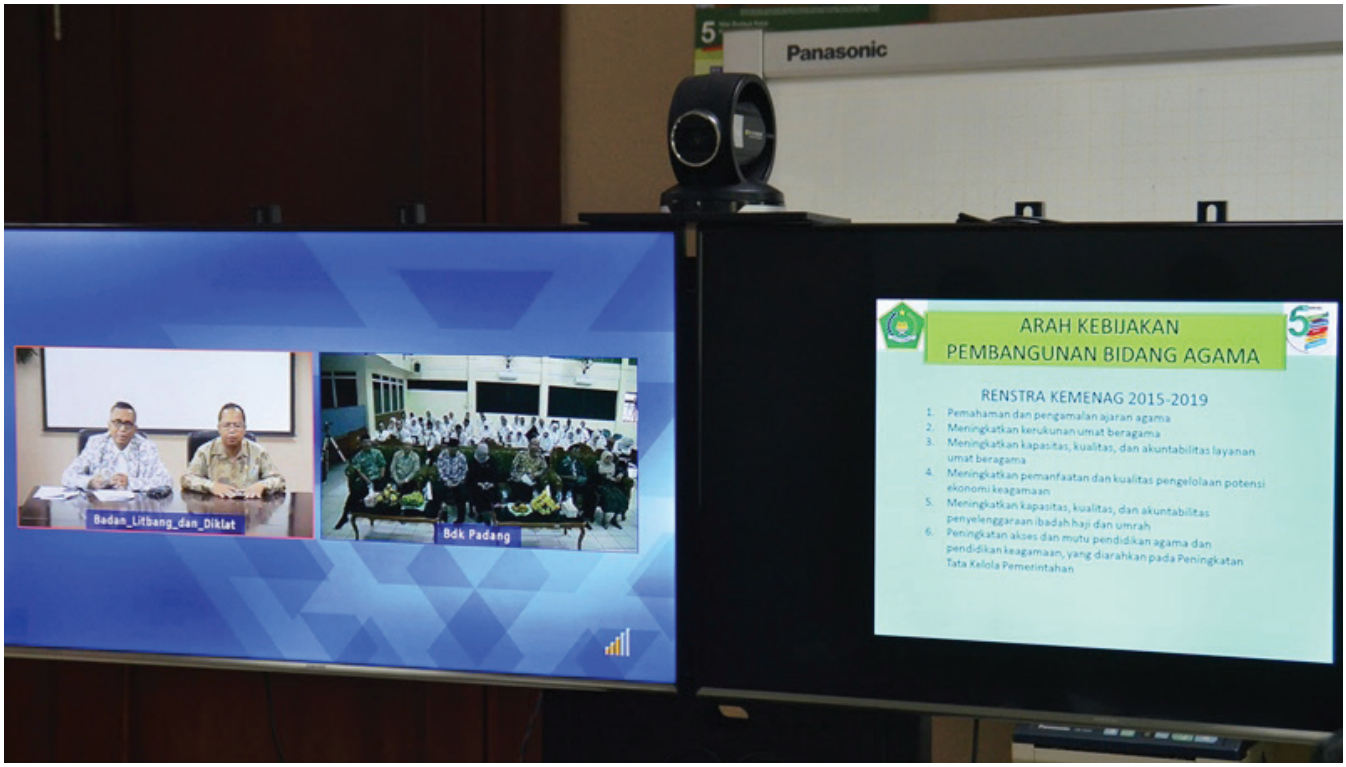

HASIL RAKERNAS UNTUK KINERJA BERNAS

Oleh: Thobib Al-Asyar | Kasubag Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam

Kegiatan Raker, Rakor, dan sejenisnya yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga selama ini sering dianggap sebagai media kumpul-kumpul rutin tahunan. Selain kurang banyak memberikan dampak langsung terhadap organisasi dan kualitas layanan publik, kegiatan yang banyak mengundang peserta tersebut memakan biaya yang tidak sedikit. Apalagi diselenggarakan di hotel, dengan segala fasilitas yang nyaman dan sajian menu yang enak.

Pemahaman di atas tentu tidak selamanya benar, meski juga tidak semuanya salah. Benar, jika mayoritas pesertanya hanya ingin hadir tanpa modal gagasan, sesekali bolos, atau bahkan meninggalkan tempat acara tanpa alasan. Hal ini bisa dipahami karena rerata model acaranya berjalan monoton, pesertanya diposisikan sebagai obyek informasi, sehingga tidak menambah values untuk mengembangkan organisasi. Bisa juga salah, jika seluruh atau mayoritas peserta berkeinginnan dan nyata memberikan kontribusi gagasan konkrit untuk kemajuan dan kualitas kinerja organisasi.

Nah, catatan itulah yang menjadi perhatian Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat memberikan arahan pada rapat pra Rakernas. Menurut Menag melalui arahan Sekjen dalam rapat pra-Rakernas, Rakernas harus menjadi pemicu semangat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenag di semua lini dan benar-benar menjadi entry point bagi kualitas kinerja. Jika Rakernas hanya arena kumpul-kumpul maka perlu dievaluasi pelaksanaannya karena hanya menghamburkan anggaran negara.

Didasarkan pada semangat itu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Jakarta, pada 29/2 sd 2/3 2016, sengaja didesain agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Meski perbedaannya tidak terlalu mencolok, setidaknya sudah muncul semangat yang kuat agar Rakernas dapat memberikan kontribusi nyata bagi Kemenag. Menurut catatan penulis, setidaknya ada dua poin penting yang menjadi sorotan.

Pertama, format kegiatan. Jika sebelumnya Rakernas lebih dominan pada sesi ceramah dengan mendatangkan nara sumber untuk mensuplai informasi kepada para peserta yang berisi tentang kebijakan, arahan, perspektif dan lainnya, kini Rakernas disetting secara berimbang. Waktu antara materi ceramah dengan rapat (komisi dan Pleno) lebih seimbang, sehingga dapat menghasilkan ide-ide yang produktif.

Dalam pelaksanaannya, panitia telah menyiapkan konsep secara utuh. Pada sesi ceramah didatangkan pembicara yang sangat kompeten, seperti Menag, Menpan RB, Menko Polhukam, Sekjen, dan Irjen Kemenag agar peserta mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan berbagai kebijakan penting dalam pengelolaan birokrasi dan kebijakan. Sementara pada sesi diskusi didesain secara lebih terarah agar Rakernas dapat menghasilkan rekomendasi yang bersentuhan langsung dengan problem organisasi dan layanan publik.

Kedua, outputs kegiatan. Poin inilah yang menjadi fokus penting agar Rakernas dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas. Jika poin pertama lebih pada input dan proses, sementara poin kedua menitikkanberatkan outputs dan outcomes. Pada sidang komisi dan pleno telah disiapkan panitia melalui kertas kerja berupa daftar isu-isu utama Kementerian Agama untuk dijadikan bahan kajian untuk menjawab masalah-masalah di lapangan. Ada tiga bidang utama yang menjadi agenda pembahasannya, yaitu: (a) bidang tata kelola, (b) bidang layanan pendidikan; dan (c) bidang layanan keagamaan.

Mencermati outputs Rakernas yang dituangkan dalam tiga rumpun masalah tersebut akan memberikan arah perjalanan Kementerian Agama yang jelas selama tahun 2016 dan

persiapan tahun 2017. Meskipun tahun anggaran 2016 sedang berjalan dan Rakernas dilaksanakan pada tahun yang sama, setidaknya meneguhkan kembali beberapa agenda penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pada bidang tata kelola, isu utama yang menjadi perhatian peserta adalah isu tentang redistribusi pegawai dan layanan unggulan tahun 2016. Isu redistribusi pegawai sebenarnya merupakan problem lama yang diangkat kembali untuk dibahas, karena problem ini sangat berkait dengan permasalahan umum organisasi Kementerian Agama. Pada beberapa Satker, baik pusat maupun daerah, terdapat banyak pegawai dengan JFU yang paralel. Pada saat yang sama, banyak Satker atau Unit Teknis lain yang kekurangan pegawai. Di situ tidak ada pemerataan pegawwai secara brinbang. Belum lagi berbicara kualitasnya. Banyak pegawai yang minim kapasitas dan kurang keahlian teknis dalam memberikan pelayanan.

Hal menarik dari pembahasan redistribusi pegawai adalah belum adanya komitmen atau keberanian pimpinan Satker. Dalam konteks ini, peserta Rakernas merekomendasikan agar segera diterbitkan intruksi Sekjen dan petunjuk teknis (SOP) nya, serta pendampingan dari pihak Inspektorat. Hal ini diperlukan sebagai penguat para pimpinan Satker untuk mengambil kebijakan karena terkait dengan aspek yang sensitif dan syarat kepentingan. Selain itu juga disebutkan masih adanya penerimaan pegawai honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Peserta memberikan penekanan perlunya mengambil tindakan berupa pemutusan tenaga honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Satu isu penting lain bidang tata kelola yang mendapat perhatian lebih adalah pelaksanaan layanan unggulan yang berhubungan dengan pendaftaran haji, penerimaan CPNS, pencatatan nikah, sertifikasi dosen dan sertifikasi guru, pemberian beasiswa, yang hingga kini belum dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini mengemuka karena prioritas pemerintahan sekarang adalah peningkatan layanan publik yang harus diwujudkan dalam program Quick Wins. Rekomendasi atas masalah ini adalah perlunya segera mengevaluasi secara konprehensif dan menyempurnakan KMA 118 tahun 2010 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: memperjelas parameter keberhasilan layanan unggulan; memperkuat diseminasi dan monitoring dan valuasi; dan mempertajam layanan unggulan baru yang mendapat perhatian masyarakat luas.

Untuk bidang layanan pendidikan yang menjadi sorotan cukup krusial ada tiga isu. Pertama, strategi peningkatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan kebijakan strategis pemerintahan Jokowi yang sebelumnya bernama Bidik Misi belum berjalan secara optimal. Hal pokok yang menjadi faktor penghambat adalah

problem pendataan yang kurang sinkron, sehingga pelaksanaan program belum berjalan dengan baik. Banyak faktor yang menjadikan hal tersebut terjadi, diantaranya perubahan regulasi pemberian PIP dan payung hukum kerjasama dengan OJK belum jelas. Satu masalah lain yang menjadi penyebabnya adalah sosialisasi ke calon penerima belum massif dan sistematik.

Rekomendasi Rakernas yang perlu segera diselesaikan adalah perlunya pemutakhiran data calon penerima PIP dengan meningkatkan koordinasi dan koordinasi data dengan semua instansi secara maksimal. Selain itu, erlunya peningkatan sosialisasi secara lebih massif dan sistemik kepada lembaga (diniyyah, pesantren salaf, kesetaraan, pengelola Wajar Dikdas, dan calon penerima lainnya, terutama santri di lembaga tersebut) yang memiliki sebaran dan tingkat kesulitan tinggi.

Kedua, strategi peningkatan PTKN unggul dalam era MEA. Tahun 2016 adalah dimulainya perdagangan bebas tingkat ASEAN, dimana arus barang dan SDM datang silih berganti secara kompetitif akan benar-benar terjadi. Pada era ini akan muncul persaingan jasa terampil dari luar, sementara jenis jasa yang ditawarkan PTK belum spesifik dan mendukung tenaga terampil yang dibutuhkan MEA. Kondisi ini jika terus dibiarkan akan sangat mungkin menenggelamkan keberadaan PTKN yang tidak siap menghadapinya. Faktanya, hingga saat ini belum ada rumusan konkrit tentang kompetensi (keterampilan teknis) lulusan setiap Prodi yang terukur dan kompetitif untuk menghadapi MEA. Artinya, jika fenomena ini tidak direspon cepat dan baik, maka bukan hal mustahil ke depan peran PTKN tidak akan mendapatkan tempat di publik.

Menghadapi fakta tersebut, Rakernas merekomendasikan agar segera dibuatkan blueprint pelatihan dan peningkatan multi-skill competencies mahasiswa pada setiap PTK sesuai karakteristik dan keunggulannya, seperti bidang bahasa, keterampilan agama, seni, profesi guru/dai, advokat, orator, dan lain-lain. Selain itu perlu juga dilakukan reviu kurikulum PTK secara periodik untuk antisipasi percepatan informasi dan kehalian yang dibutuhkan masyarakat, dan pembuatan action-plan pengembangan PTKN untuk 5-10 tahun ke depan.

Ketiga, beban kerja guru dan dosen terkait pemberian tunjangan profesi/kinerja. Masalah ketiga ini merupakan hal yang perlu disikapi dengan seksama mengingat terdapat kesenjangan antara das-sein dan das-sollen. Tunjangan profesi tidak equivalen dengan peningkatan mutu pembelajaran dan hasil karya, publikasi, atau penelitian. Hal lain yang menjadi problem adalah penerapan BKD dosen masih mengalami kendala, terutama kehadiran dosen di kantor/kampus. Pada saat yang sama juga ada fakta sebagian dosen menolak atas penerapan disiplin kehadiran dengan tugas mengajar karena mereka tidak mau disamakan dengan PNS struktural.

Rekomendasi atas masalah yang ketiga ini adalah perlunya pengaturan ulang melalui regulasi tentang disiplin kerja dosen. Pengaturan lebih lanjut juga harus mencakup kewajiban yang mengiringi tunjangan profesi guru/dosen yang mengarah pada hasil.

Sedangkan untuk bidang layanan keagamaan terdapat empat isu utama. Pertama, peningkatan layanan KUA. Beberapa masalah yang muncul terkait dengan ini adalah administrasi pernikahan berbasis IT yang belum berjalan dengan baik, masih adanya kebingungan tentang status kepala KUA apakah jabatan struktural atau fungsional yang diberi tugas tambahan, tingginya angka perceraian, dan perluasan tugas KUA.

Untuk menyikapi masalah tersebut peserta Rakernas memberikan rekomenadasi penyelesaian beberapa langkah, yaitu perlunya SE Kepala Kanwil kepada seluruh Kepala Kemenag Kabupaten/Kota untuk penuntasan penerapan layanan administrasi nikah berbasis IT melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada seluruh KUA Kecamatan di Indonesia. Untuk status kepala KUA perlu percepatan penyelesaian regulasi agar status kepala KUA tidak membingungkan. Terkait dengan tingginya angka perceraian, Rakernas mendesak agar KUA menjalankan program nasional Kursus Pra-Nikah secara konsisten. Sedangkan perluasan peran KUA perlu dibuat kajian secara utuh tentang layanan pernikahan bagi penganut agama non-Islam, serta perlu juga dibuka atase agama di Negara yang banyak jumlah WNI-nya.

Kedua, peran Kemenag dalam deradikalisasi. Fakta yang dikemukakan selama pembahasan sidang komisi terkait masalah ini adalah peran penyuluh agama yang dinilai belum maksimal dalam penanggulangan radikalisme paham keagamaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah honorarium penyuluh agama non-PNS yang tidak memadai serta tidak jelasnya tugas yang memiliki indikator kinerja. Rekomendasi yang diberikan

pada masalah ini adalah perlunya pengaturan ulang regulasi penyuluh agar disesuaikan dengan UU ASN sebagaimana baseline yang dibuat oleh Bapenas, dimana sistemnya harus disamakan dengan penyuluh lainnya, seperti penyuluh pertanian.

Ketiga, inovasi layanan penyelenggaraan haji. Masalah utama yang dikemukakan pada masalah ini adalah masih terjadinya hambatan dalam penyediaan dokumen ibadah haji akibat perubahan regulasi di Arab Saudi. Selain itu belum optimalnya perlindungan bagi jamaah haji, dan perlunya peningkatan pembinaan dan pelayanan serta perlindungan jamaah. Rekomendasi yang diberikan meliputi: penyempurnaan pendaftaran haji, peningkatan layanan bimbingan manasik haji dan perlindungan jamaah, peningkatan layanan haji di luar negeri mencakup akomodasi, catering, dan transportasi antar kota dan dalam kota di Arab Saudi, peningkatan pengawasan haji khusus dan swasta, peningkatan layanan perjalanan haji melalui bimbingan secara online (Haji Pintar).

Keempat, isu terakhir pada bidang layanan keagamaan adalah terkait dengan kerukunan umat beragama. Beberapa isu yang menjadi perhatian peserta Rakernas adalah berhubungan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, seperti munculnya kasus-kasus Ahmadiyah, Syiah, Saksi Yehova, dan beberapa ekspresi pahama keagamaan yang berlatar belakang pemahaman ajaran secara sempit dan eksklusif. Selain itu masalah pelayanan agama di luar 6 agama resmi juga menjadi pembahasan, belum optimalnya dialog intern dan antar umat beragama, kurang sensitifnya sebagian pemeluk agama, dan juga masih banyaknya ketidakpatuhan PBM terkait dengan pendirian dan penghentian pembangunan rumah ibadah.

Menyikapi hal tersebut, Rakernas memberikan rekomendasi agar kerukunan umat beragama terus meningkat dengan beberapa penegasan, yaitu: mengkampayekan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui dialog intern dan antar umat beragama, perlunya penyusunan pedoman tentang pemeliharaan kerukunan dan kearifan local, penggalakan cerita keberhasilan (success story) tentang pemeliharaan kerukunan tingkat local dan bahaya tindakan sebaliknya. Perlu juga dilakukan program-program peningkatan kebersamaan antar umat beragama, seperti camp pemuda, kepanitiaan bersama, kunjungan bersama, dan lain-lain.

Dari beberapa catatan pelaksanaan Rakernas tahun 2016 tersebut, menurut hemat penulis telah muncul beberapa gagasan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Agama yang lebih bernas dan berkualitas. Meski hasil-hasil tersebut merupakan sebagian rekomendasi yang dihasilkan dari even Rakernas, setidaknya Kementerian Agama akan menjadi lebih baik jika rekomendasi tersebut betul-betul dilaksanakan sesuai dengan target-target tertentu. Kuncinya hanya satu, hasil-hasil Rakernas bukan hanya menjadi dokumen laporan, namun betul-betul disosialisasikan agar diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan nyata.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah seluruh unit yang berhubungan dengan isu-isu utama tersebut siap melaksanakannya? Jika sudah siap, mari kita mulai sejak saat ini! *Wallahu a'lam*. []

> outputs Rakernas yang dituangkan dalam tiga rumpun masalah tersebut akan memberikan arah perjalanan Kementerian Agama yang jelas selama tahun 2016 dan persiapan tahun 2017.

UNIVERSAL JUSTICE NETWORK (UJN)

DUNIA NILAI INDONESIA SEBAGAI NEGARA TOLERAN

SEJUMLAH AKTIVIS UNIVERSAL JUSTICE NETWORK (UJN) BERKUNJUNG KE INDONESIA PADA AKHIR JANUARI 2016. UJN MERUPAKAN WADAH BERKUMPUL PARA AKTIVIS DARI BERBAGAI ORMAS DI BELAHAN DUNIA, ANTARA LAIN: ISLAMIC HUMAN RIGHTS COMMISSION (IHCR), HUMAN RIGHTS ORGANIZATION IN TURKEY, TERMASUK WASHINGTON DC ISLAMIC CENTER.

Salah satu tokoh yang ditemui UJN selama di Indonesia adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Bertemu di kantor Kementerian Agama, Jumat 29 Januari 2016, UJN menyampaikan bahwa Indonesia dikenal luas sebagai negara multikultural dengan tingkat toleransi tinggi. Mewakili utusan yang hadir, Ketua IHCRMassoud Shadjareh menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjaga semangat toleransinya sehingga tidak mudah terpecah belah seperti negara-negara di Timur Tengah. Pesan yang sama diusung mantan Imam Washington DC Islamic CenterMohammad al-Asi, Mujtahid Hashem, Mohideen Abdul Kader, serta Ahmet Faruk Unsal dari Human Rights Organization in Turkey.

"Kami, di beberapa kesempatan di beberapa negara, sering kali menyatakan dan mendeklarasikan bahwa paham takfiri adalah paham di luar Syari'ah. Selain itu, seorang muslim dilarang untuk menghina Sahabat Nabi Muhammad SAW, apa pun aliran ideologinya," kata Massoud yang juga berharap, Pemerintah Indonesia berperan aktif agar masyarakat hidup damai dan harmoni.

Grand Syekh Al Azhar Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb juga mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga harmoni dalam perbedaan.Menurutnya, Indonesia berhasil mengelola perbedaan pandangan keagamaan dan itu tidak terlepas dari peran para ulama.

"Itu tidak terlepas dari kiprah para ulama yang dapat bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Ikhtilaf (perbedaan) adalah rahmat," terang Syekh Ath-Thayeb saat bertemu sejumlah ulama di di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Senin 22 Februari 2016.

Grand Syekh menghargai peran MUI yang dapat menghimpun banyak ulama dari beragam ormas dan pemikiran yang berbeda. Menurutnya, MUI menjadi modal besar bagi upaya menyatukan umat Islam dan memberikan penyadaran kepada umat Islam agar tidak mudah terprovokasi.

Pernyataan lebih tegas disampaikan Grand Syekh saat berpidato di hadapan civitas akademika UIn Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa 23 Februari 2016. Menurutnya, Indonesia telah dipilih Allah sebagaitempat menyebarkan Islam sebagai agama yang menyerukan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjaga orisinalitas dengan tetap menerima segala hal baru. Indonesia juga telah mampu menyingkap khazanah keislaman yang suci, serta nilai-nilai hukum dan akhlaknya dengan mewujudkan nilai keadilan, persamaan, sikap terbuka pada orang lain. Indonesia juga mampu memadukan ilmu, iman dan amal sehingga dapat menjadikan Islam sebagai agama untuk membangun kehidupan dunia dan mencapai kebahagiaan ukhrawi, bahkan merupakan agama kemanusiaan secara universal.

Fakta yang sama ditemukan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Mr Moazzam Malik. Selama hampir 16 bulan bertugas sebagai Dubes Inggris untuk Indonesia, Moazzam mengaku sering berkunjung ke Perguruan Tinggi Islam dan Pesantren. "Saya melihat, Indonesia sangat penting.Di sini, ada kehidupan cendekiawan dan sangat toleran. Banyak pengalaman yang menyenangkan dan menarik," katanya kepada Menag Lukman Hakim Saifuddin, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.

Moazzam bahkan berkeinginan kuat untuk menjalin kerja sama di bidang keagamaan dengan Indonesia. Menurutnya, Inggris dan Indonesia telah bekerja sama lama dan karenanya dia berharap ada kemitraan yang lebih, khususnya di bidang Pendidikan Keagamaan.Ada duaskema kerja sama yang ditawarkan, yaitu:

Pertama, kerja sama di bidang Keagamaan Islam, baik dengan masyarakat Muslim Inggris maupun dengan lembaga pendidikan tinggi agamanya dengan masyarakat, ormas dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Kedua, kerja sama untuk menemukan cara agar remaja Inggris, terutama yang muslim, bisa melihat secara langsung Islam di Indonesia. "Jadi, mereka mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa, agar tidak terus terpaku pada Islam di Timur Tengah," imbuh Moazzam.

Saking pentingnya Indonesia dalam menjaga toleransi, Rektor Universitas Kulliya Dakwah, Beirut Lebanon, Abd

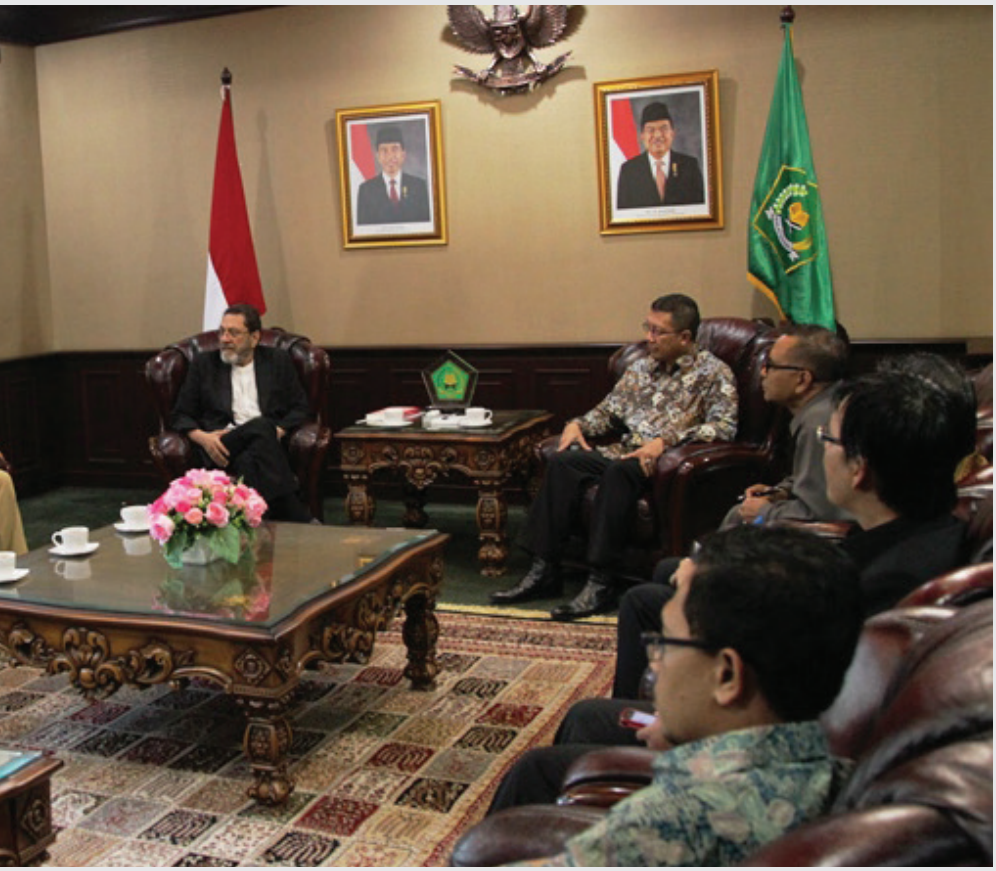

Nasir Jabriy menyengaja berkunjung ke Indonesia untuk bertemu sejumlah tokoh Islam di Tanah Air, salah satunya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Kami telah berkunjung ke India, lalu ke sini di Indonesia, kemudian ke Malaysia.Kunjungan kami selain bersilaturahim dengan saudara se-iman dan se-agama, juga ingin mengingatkan tentang konflik di Timur Tengah yang kemungkinan besar bisa menjalar ke negara lain, khususnya tiga negara ini," terang Nasir, Rabu 23 Maret 2016.

Nasir menengarai konflik di Timur Tengah terjadi karena faham Takfiri dan karenanya dia mengimbau agar Indonesia mempersiapkan diri sehingga tidak sampai mengalami keadaan seperti yang terjadi di Timur Tengah. Nasir juga mengajak Menag Lukman dan Indonesia untuk bekerja sama dalam membendung maraknya Faham Takfiri ini.

Terbiasa Bertoleransi

Menag Lukman mengatakan, masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun silam sudah terbiasa menerapkan kehidupan bertoleransi. Nenek moyang bangsa Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan, meski beda paham agama, suku, ras, kebudayaan, dan lainnya.

"Para orang tua kami, guru kami, mengajarkan, bahwa perbedaan adalah rahmat.Keragaman sangat positif bagi kami.Karena dengan adanya perbedaan, Tuhan memberi kemudahan bagi kami untuk memilih, karena semua ideologi atau aliran mempunyai dasar hukum dan dasar agama yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya kapada Nasir.

Menurutnya, Indonesia beruntung mempunyai ormas-ormas yang moderat seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Indonesia juga mempunyai pondok pesantren, lembaga pendidikan khas Indonesia yang aktif menjaga, memelihara, dan merawat Islam ala Indonesia yang moderat sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga.

Pernyataan Menag ini diperkuat oleh hasil survei nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2015 yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan dirilis di Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.Hasil survei menunjukan bahwa rerata nasional kerukunan umat beragama di tahun 2015 berada pada poin 75,36 (dalam rentang 0 – 100). Tingkat kerukunan diukur melalui tiga indikator, yaitu: tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa Indonesia secara rerata nasional, berada pada kategori kerukunan tinggi. Angka ini menguatkan hasil survei KUB 2012 yang berada pada indeks 3,67 (dalam rentang skala 1-5) yang berarti cukup harmonis.

Meski demikian, Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Muharram Marzuki mengatakan bahwa Kementerian Agama tidak menutup mata tentang adanya sejumlah kasus di beberapa daerah, sepanjang 2015, antara lain: 1) Kasus Gereja Santa Clara di Kota Bekasi, 2) Kasus Gereja Advent di Pasar Minggu, dan 3) Kasus pembangunan masjid di Jalan Trikora KM 19 Arfai II, Manokwari, Papua Barat.

Selain itu, konflik di Tolikara bersamaan Salat Idul Fitri I Syawal 1436 Hijriah. Ada juga kasus penertiban pembangunan gereja/undung-undung tanpa IMB di Kab. Singkil Aceh, dan kasuspenolakan pendirian Masjid As-Syuhada di Bitung, Sulawesi Utara. "Semua kasus tersebut, ditangani Kementerian Agama dengan memediasi pihak-pihak terkait, sehingga konflik yang lebih luas dapat direduksi," tulis Muharram.

Menurut Muharram, secara umum Kemenag bersama instansi terkait melakukan sejumlah langkah penyelesaian, antara lain: 1) mengirimkan peneliti untuk melakukan kajian, 2) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga negara dan pihak terkait, untuk penanganan konflik, khususnya pemerintah daerah, 3) penyelesaian resolusi konflik melalui mediasi pihak yang berkonflik, 4), meningkatkan dialog para tokoh agama, 5) mendorong upaya penegakan hukum, 6) penanganan psikososial para korban, dan 7) rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik.

Moh Khoeron

SABDA PENTING DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT TOLERANSI ANTARWARGA. SAYA BERHARAP, KEGIATAN SABDA KE DEPAN BISA DIIKUTI SISWA SEKOLAH, MULAI DARI SD/MI, SMP/MTS, HINGGA SMA/MA UNTUK MENGENALKAN TOLERANSI LEBIH DINI

WAGUB DKI JAKARTA
DJAROT SYAIFUL HIDAYAT

SABDA, ROLE MODEL KERUKUNAN DI JAKARTA

Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Abdurrahman Harun memastikan suasana kerukunan hidup antar umat beragama di ibu kota kondusif. "Tingkat kesadaran beragama di Jakarta lebih baik. Persoalan kerukunan juga baik, sehingga jika ada masalah di daerah seperti kasus Tolikara, tidak dapat ditarik ke Jakarta," kata Abdurrahman.

Meski demikian, Abdurrahman menyatakan kerukunan harus terus dipelihara. Sebab, lanjutnya kerukunan hidup adalah amanah dari founding father dan para pendiri Republik Indonesia serta perintah dari agama. Berbagai upaya dilakukan Kanwil Kemenag DKI Jakarta, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SABDA atau Sekolah Agama-agama dan Bina Damai.

SABDA terselenggara berkat kerja sama antara Kanwil Kemenag, FKUB DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak lainnya." SABDA sudah dilaksanakan dua angkatan. Sabda bentuk role model kerukunan di Jakarta, karena kerukunan perlu dalam bentuk akademik," jelasnya.

Angkatan II SABDA digelar pada23 – 27 November 2015, diikuti oleh 38 orang, utusan dari MUI, KAJ. PGIW, Matakin, PHDI, Walubi dan FKUB Provinsi Jawa Timur. Dibuka oleh Wagub Djarot Syaiful Hidayat, SABDA II mengangkat tema "Meneguhkan Kembali Komitmen Kebangsaan Melalui Kerukunan Umat Beragama". Menurut Djarot, SABDA penting dalam meningkatkan semangat toleransi antarwarga. Djarot berharap, kegiatan SABDA ke depan bisa diikuti siswa sekolah, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA untuk mengenalkan toleransi lebih dini.

Selama mengikuti SABDA, peserta menerima materi tentang Kerukunan ditinjau dari perspektif agama-agama yang disampaikan oleh tokoh agama masing-masing. Materi lainnya terkait: 1) Manajemen dan Konflik Resulotion, Strategi Memelihara Kerukunan, 2) Agama, Kekerasan dan Perdamaian, 3) FKUB dan Pemolisian Konflik Keagamaan; 4) Meneguhkan Komitmen Kebangsaan; dan lainnya.

Ketua FKUB DKI Jakarta, Ahmad Syafi'I Mufid saat memberikan materi mengatakan, sekolah agama ini penting untuk menumbuhkembangkan kader bina damai dari kalangan agama. "Akhir-akhir ini kita sedang diganggu berbagai macam kasus, ada korupsi, terorisme, sampai narkoba. Maka kita lakukan kegiatan sekolah agama ini untuk memperjuangkan peradaban yang satu yakni kemanusiaan," terangnya.

Selain SABDA, kerukunan DKI Jakarta juga dijaga dengan mengadakan dialog antar umat yang tergabung dalam FKUB terkait persolan kemasyarakatan dan kerukunan. FKUB DKI Jakarta bahkan mempunyai pilot kerukunan. "Di Jakarta, para tokoh agama sering bertemu. Pertemuan jangan hanya jika ada konflik," ungkap pria yang sebelumnya menjadi Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung.

Walhasil, Abdurrahman merasa bangga dengan potret kerukunan masyarakat DKI Jakarta. Sebagai contoh, Abdurrahman menyebut potret keharmonisan gedung Gereja yang bersebelahan dengan Masjid Awwabin di Taman Sari, Jakarta Barat. Menurutnya, meski hanya dibatasi dengan tembok, keduanya tetap hidup berdampingan. Lonceng gereja dan azan terdengar saling bersahutan tanpa berseteru. Sudah 17 tahun, masjid dan gereja ini hidup berdampingan bagai saudara. Sampai detik ini, tidak pernah terjadi gesekan atau konflik antar kedua umat beragama."Berbeda tidak harus bermusuhan, tapi bagaimana kita hidup rukun. Masyarakat Jakarta sudah makin cerdas menyikapi perbedaan," pungkas Abdurrahman.

Kadar Santoso

PROGRAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF

GORONTALO DIUSULKAN JADI PERCONTOHAN

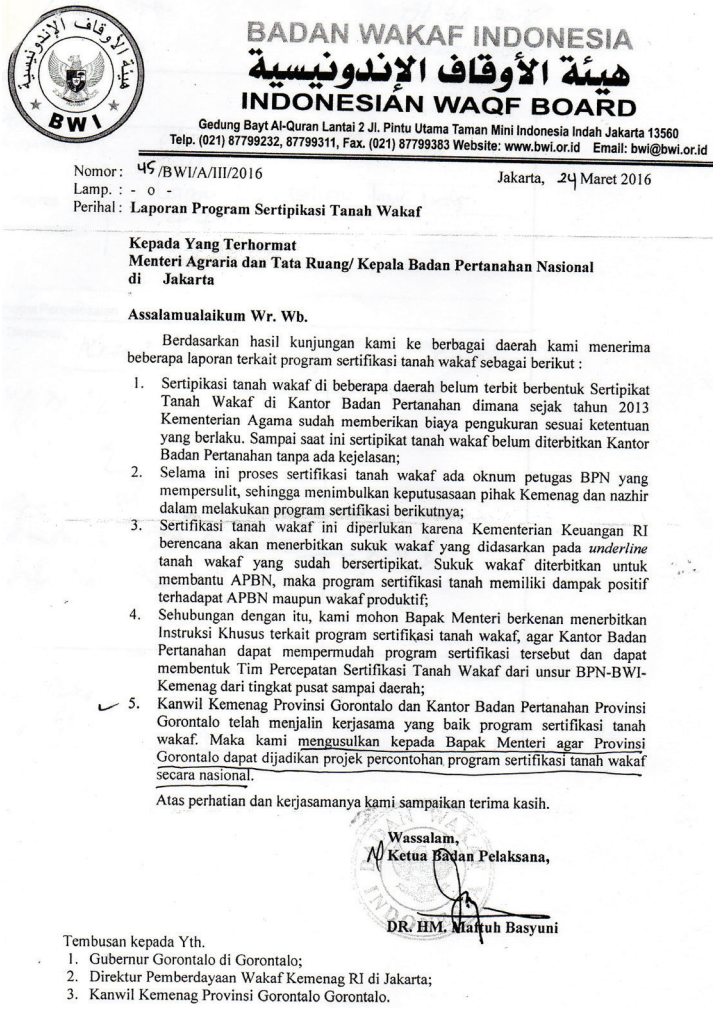

BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

Nomor : 45 /BWI/A/III/2016
Lamp. : - o -
Perihal : **Laporan Program Sertipikasi Tanah Wakaf**

Jakarta, 24 Maret 2016

Kepada Yang Terhormat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil kunjungan kami ke berbagai daerah kami menerima beberapa laporan terkait program sertifikasi tanah wakaf sebagai berikut :

1. Sertipikasi tanah wakaf di beberapa daerah belum terbit berbentuk Sertipikat Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan dimana sejak tahun 2013 Kementerian Agama sudah memberikan biaya pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini sertipikat tanah wakaf belum diterbitkan Kantor Badan Pertanahan tanpa ada kejelasan;
2. Selama ini proses sertifikasi tanah wakaf ada oknum petugas BPN yang mempersulit, sehingga menimbulkan keputusasaan pihak Kemenag dan nazhir dalam melakukan program sertifikasi berikutnya;
3. Sertifikasi tanah wakaf ini diperlukan karena Kementerian Keuangan RI berencana akan menerbitkan sukuk wakaf yang didasarkan pada *underline* tanah wakaf yang sudah bersertipikat. Sukuk wakaf diterbitkan untuk membantu APBN, maka program sertifikasi tanah memiliki dampak positif terhadapat APBN maupun wakaf produktif;
4. Sehubungan dengan itu, kami mohon Bapak Menteri berkenan menerbitkan Instruksi Khusus terkait program sertifikasi tanah wakaf, agar Kantor Badan Pertanahan dapat mempermudah program sertifikasi tersebut dan dapat membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dari unsur BPN-BWI-Kemenag dari tingkat pusat sampai daerah;
5. Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo dan Kantor Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo telah menjalin kerjasama yang baik program sertifikasi tanah wakaf. Maka kami mengusulkan kepada Bapak Menteri agar Provinsi Gorontalo dapat dijadikan projek percontohan program sertifikasi tanah wakaf secara nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,
Ketua Badan Pelaksana,

DR. HM. Maftuh Basyuni

Tembusan kepada Yth.
1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
2. Direktur Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI di Jakarta;
3. Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Gorontalo.

Sinergi antara Kanwil Kementerian Agama Gorontalo dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Gorontalo dalam pengelolaan tanah wakaf, khususnya sertifikasi, mendapat apresiasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat mengusulkan Provinsi Gorontalo menjadi percontohan program sertifikasi tanah wakaf. Menurut Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Gorontalo, Sabara K.Ngou, usulan ini tertuang dalam surat BWI Pusat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan nomor 45/BWI/A/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kantor Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo telah menjalin kerjasama yang baik program sertifikasi tanah wakaf. Maka kami mengusulkan kepada Bapak Menteri agar Provinsi Gorontalo dapat dijadikan projek percontohan program sertifikasi tanah wakaf secara nasional. Demikian bunyi salah satu point surat Ketua Badan Pelaksana BWI, Maftuh Basyuni, kepada Menteri Agraria yang dibacakan oleh Sabara baru-baru ini. "Tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi Gorontalo. Jika hal ini dikabulkan Menteri Agraria, maka akanmenjadi tanggung jawab besar bagi kami untuk bisa mewujudkannya agar bisa sukses," ujar Sabara.

Menurut Sabara, usulan BWI didasarkan pada hasil pemantauan dan kunjungan ke sejumlah daerah. Dari situ, BWI Pusat mendapati kerjasama antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan baik provinsi maupun kabupaten/kota di Gorontaloterjalin dengan baik dan sehat. Bahkan, kata Sabara, jika ada kendala dalam hal serfitikasi tanah wakaf, pihak Badan Pertanahan secara terbuka menyampaikan ke pihak Kementerian Agama. "Kita secara bersama-sama mencari solusinya, dengan melibatkan para nazhir maupun wakif," kata Sabara.

Sementara untuk daerah lainnya, BWI mendapati kondisi yang berbeda. Sertifikat Tanah Wakaf belum diterbitkan Kantor Badan Pertanahan tanpa ada kejelasan. Padahal, sejak 2013, Kementerian Agama sudah memberikan biaya pengukuran sesuai ketentuan. Maftuh Basyuni dalam suratnya bahkan menyampaikan bahwa ada oknum petugas BPN yang mempersulit sehingga menimbulkan keputusasaan pihak Kementerian Agama dan Nazhir dalam melakukan program sertifikasi berikutnya. "Alhamdulillah di Gorontalo, kendala seperti itu bisa terkomunikasikan dengan baik," ucap Sabara.

Kasi Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag Gorontalo, A.A. Fikri Tuli mengakui bahwa beberapa tanah wakaf di Gorontalo juga ada yang belum diterbitkan sertifikatnya. Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan, hal itu biasanya disebabkan adanya ketidaksesuaian data tanah wakaf denganfakta di lapangan, baik dari segi ukuran maupun lainnya sehingga menghambat proses sertifikasi. Namun demikian, kata Fikri, selama ini pihaknya tidak tinggal diam dan selalu membangun komunikasi dengan pihak BPN, baik secara personal maupun dalam forum Rapat Koordinasi. "Setiap Rapat Koordinasi, pihak BPN Gorontalo selalu menunjukan komitmennya terhadap persertifikatan tanah wakaf," terang Fikri. Dari hasil koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, kata Fikri, ditargetkan Tahun 2017, Gorontalo Bebas Tanah Wakaf yang tidak bersertifikat.

Pada bagian lain surat BWI Pusat ke Menteri Agraria disebutkan, sertifikasi tanah diperlukan karena Kementerian Keuangan berencana menerbitkan sukuk wakaf berdasarkan underline tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Sukuk wakaf diterbitkan untuk membantu APBN sehingga program sertifikasi tanah berdampak pada APBN dan wakaf produktif. Sehubungan itu, Maftuh meminta Menteri Agraria untuk menerbitkan Instruksi Khusus yang dapat mempermudah program sertifikasi tanah wakaf. Lebih dari itu, Menteri Agraria dapat membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dari unsur BWI, BPN, dan Kemenag, pusat maupun daerah.

Ukhy Inmas Gorontalo,
Moh Khoeron

HASIL TABAYYUN ATAS PEMBERITAAN PENGUSIRAN JAMAAH AHMADIYAH DI KAB. BANGKA TENGAH

KEMENAG BABEL: TIDAK BENAR ADA PENGUSIRAN

Pemberitaan tentang penolakan masyarakat tentang kehadiran ajaran Ahmadiyah di wilayah Bangka Belitung mendapat perhatian dan *concern* Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung Andi M. Darlis selaku orang nomor satu yang mengurusi bidang keagamaan di Bangka Belitung, terjun langsung ke lapangan menemui Pengurus Jemaah Ahmadiyah, Senin 18 Januari 2016. Setelah melakukan tabayyun secara langsung, temuan dilapangan ternyata tidak benar terjadi pengusiran. "Tidak ada pengusiran terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Bangka," kata Darlis.

Fakta yang ditemukan, lanjut Darlis, masyarakat memang mengalami keresahan dengan keberadaan Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, ini bermula dari pindahnya seseorang yang disebut mubaligh oleh Jemaah Ahmadiyah bernama Ahmad Syafii beserta istrinya Yati Nurhayati dari Jakarta Selatan ke wilayah Kabupaten Bangka. Kepindahan keluarga Ahmad Syafii telah disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan diterbitkannya KTP dan Kartu keluarga pada Bulan Nopember 2015.

Namun yang menjadi permasalahan adalah penerbitan KTP dan KK tersebut tidak diterima oleh masyarakat, karena menurut masyarakat melalui tokoh setempat, pengurusan KTP dan KK tersebut tanpa sepengetahuan kepala lingkungan setempat. Masyarakat juga khawatir terhadap kepindahan Ahmad Syafii dan istrinya akan menghidupkan kembali ajaran Ahmadiyah di wilayah mereka.

Padahal, jika merunut kembali pada tahun 2010 dan 2011 sudah ada Surat Bupati Bangka yang isinya melarang kepada Jemaah Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya dan mengakomodir dari keinginan masyarakat yang menolak keberadaan

Ahmadiyah, yang dinilai menyimpang berdasarkan fatwa MUI sehingga memicu reaksi masyarakat Kabupaten Bangka.

Untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut, Pemerintah kabupaten Bangka pada tanggal 14 Desember 2015 mengadakan pertemuan dengan menghadirkan perwakilan masyarakat Kelurahan setempat, Tokoh masyarakat, Agama, Pemuda, Pejabat Pemerintah, Kepolisian dan Pengurus Jemaah Ahmadiyah. Dalam pertemuan tersebut hampir semua yang hadir menolak keberadaan Ahmadiyah di Kabupaten Bangka.

berdasarkan hasil pertemuan diatas, Pada Tanggal 5 Januari 2016 Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada Ketua Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berisi tentang keputusan hasil pada tanggal 14 Desember 2015 yang pada intinya memuat empat butir kesepakatan peserta rapat sebagai berikut :

a. Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilarang menyebarluaskan aliran agama yang dianutnya.
b. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yag ada di lingkungan Sri Menanti segera bertobat sesuai dengan syariat Islam, bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
c. Mentaati SK Bupati Bangka Nomor :188.45/837/Kesbanglinmaspol/2010 tanggal 16 November 2010 tentang peringatan dan dann perintah kepada penganut, anggota, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka.
d. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), jika tidak menaati dan mengindahkan poiin yang tertera pada huruf a s.d. c, maka forum rapat sudah sepakat bahwa untuk pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) segera meninggalkan lingkungan Sri Menanti Sungailiat khususnya di Kabupaten Bangka pada umumnya dan silahkan berdomisili ke tempat asalnya.

Tanggal 18 Januari 2016 Pengurus Jemaah Ahmadiyah Cabang Bangka mengirimkan surat balasan kepada Sekretaris Daerah Kab. Bangka, yang isinya mereka tidak dapat menerima hasil keputusan rapat yangt diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan berbagai argumen yang dikemukakan.

Ketika berkunjung ke rumah yang dijadikan pusat kegiatan Ahmadiyah, Andi M Darlis menyampaikan pandangannya kepada pengurus Jemaah Ahmadiyah agar mematuhi SKB 3 Menteri dan juga Surat Keputusan Bupati Bangka yang isinya agar Ahmadiyah Cabang Bangka menghentikan kegiatannya dalam penyebaran ajaran yang dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama tentang keberadaan Nabi setelah Nabi Muhamad SAW. Kakanwil juga menghimbau agar pengurus Jemaah Ahmadiyah ikut serta menciptakan suasana yang damai dengan masyarakat sekitar sebagai kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Iwan Supriyadi

PEMBINA DWP : JANGAN BOSAN LAKUKAN PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL

PARA PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN PUSAT (DWP) KEMENTERIAN AGAMA DAERAH AGAR TIDAK BOSAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL KEPADA ANGGOTA.

Dengan terus dilakukan pembinaan secara berkesinambungan, diharapkan para anggota menjadi pribadi bertaqwa serta berkepribadian dan berbudi pekerti luhur. "DWP juga harus memperkokoh persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial," hal tersebut disampaikan Pembina DWP Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim saat silaturahim dengan pengurus DWP Kementerian Agama daerah (wilayah) di Operational Room, Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4, Jakarta, Senin 29 Februari 2016.

Trisna Willy menyampaikan apresiasinya atas usaha keras para pengurus DPW Daerah yang berkenan hadir untuk bertatap muka, silaturahim, kenalan, sharring, diskusi, saling memberi masukan dan lain sebagainya. "Jika ada beda di antara kita, jangan sampai perbedaan itu menjauhkan kita. Kemenag merangkul semua, apa pun agamanya. Karenanya, paham radikal tidak boleh berkembang," kata Trisna Willy. Trisna berharap, DWP, baik Pusat maupun Daerah, dapat membuka diri dan bekerja sama dengan pihak luar, selama hal tersebut tidak menyalahi aturan. "Mari membuka diri. Kita tunjukkan pada kementerian lain, bahwa DWP Kemenag siap menjadi pelopor Perempuan anti korupsi," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DWP Kemenag Pusat, Endah Nur Syam menyampaikan, bahwa silaturahim ini kali harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari ilmu dan pengalaman agar apa yang dilakukan oleh DWP bisa berjalan maksimal dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. "Kita telah berkomitmen untuk semaksimal mungkin untuk menjadi pelopor Wanita Anti Korupsi. Karenanya, besok kita akan mencari ilmu di Itjen," Endah

Dalam momentum silaturahim tersebut, Pengurus DWP Kemenag Pusat dan para ketua DPW Daerah melakukan diskusi dan sharring. Satu persatu berbicara, untuk berbagi pengalaman, kendala dan kegiatan yang telah dilakukan di tempatnya masing-masing. Silaturahim ini diikuti oleh pengurus DWP Aceh, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Jawa Timur, Kalimentan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali, Papua Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan sejumlah Kemenag wilayah lainnya.

Pujiyanto

PELUH PENGHULU DI PULAU TERLUAR INDONESIA

Rasa khawatir sempat muncul sebelum kami berangkat ke kepulauan luar paling utara Indonesia, Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Maklum, jarak yang harus ditempuh cukup jauh, dengan dua penerbangan panjang, Jakarta-Batam dan Batam-Natuna.Tempat ini sekarang juga sedang jadi sorotan media terkait kasus illegal fishing di perbatasan Laut China Selatan. Namun, keinginan untuk memotret pengabdian penghulu di Pulau Natuna menguatkan niat kami.

Di pagi, Selasa, 22 Maret 2016, tepatnya pukul 10.45 WIB, pesawat yang kami tumpangi mendarat di Bandara Ranai, Natuna. Kedatangan kami ini kali disambut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Natuna Sudarmadi. Selain berdiskusi dengan para penyuluh agama di Kantor Kankemenag Natuna, kami ingin melihat langsung kondisi KUA Pulau Tigadi perbatasan Indonesia.

Sesuai rencana, Rabu, 23 Maret 2016 pagi, kami dan tim Kankemenag Natuna berangkat dari tempat menginap menuju Pulau Tiga. Kami harus menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 jam dari pusat kota Natuna, Ranai untuk sampai di dermaga. Jalanan aspal nan berkelok, kawasan perbukitan yang naik turun, ditambah deretan pohon hutan yang rimbun dan asri memberi nuansa indahnya alam Indonesia. Ditambah lagi tingkah lucu monyet-monyet lapar yang bercengkerama di pinggir jalan sembari menunggu lemparan makanan dari pelancong yang datang.

Waktu menunjukan pukul 08.45 ketika kami tiba di parkiran dermaga kecil khusus penumpang. Hamparan laut nampak membiru, ditunjang cuaca cerah seiring terik mentari yang terus meninggi. Tak jauh dari situ, perahu kecil (pompong) milik warga berjejer di sepanjang pantai, siap mengantar penumpang dan barangnya ketujuan. Tampak pula warung-warung sederhana di pinggir dermaga, tempat para penumpang menunggu kedatangan kapal yang akan ditumpangi mereka.

"Nanti kita naik pompong itu pak, milik KUA kite", kata Sudarmadi dengan logat Melayu yang sangat kental, sambil menunjuk kapal kecil berwarna hijau yang terparkir di sisi paling ujung. Sebuah tulisan pada sisi kiri atap kapal berbunyi "KUA Kec. Pulau Tiga", menandai bahwa pompong itu adalah Barang Milik Negara (BMN). Yaa... pompong KUA Kec. Pulau Tiga itu dibeli dengan anggaran khusus dari Ditjen Bimas Islam tahun 2015 lalu.

Bunyi menderu, menandai mesin kapal telah dinyalakan dan siap mengantar kami ke Pulau Tiga. Tenaga honorer KUA yang menjadi operator tampak handal mengendalikan laju pompon memecah gelombak ombak lautan. Selang 35 menit, tiba lah kami

PERAHU KECIL (POMPONG)
MILIK KUA KEC. PULAU TIGA YANG DIBELI DENGAN ANGGARAN KHUSUS DARI DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2015

di pulau tujuan, disambut Kepala KUA Pulau Tiga, Camat Pulau Tiga, dan beberapa staf. "Pak, ini Kepala KUA Pulau Tiga, Ayaturrahman. Dia pernah menjadi wakil Provinsi Kepulauan Riau saat Pemilihan KUA Teladan Nasional, tahun 2012," jelas Sudarmadi.

Sejenak menyusuri jalan-jalan kayu di atas air laut, kami sampai di Aula Desa. Terlihat sekitar 40 orang sudah berkumpul, terdiri dari penyuluh agama, Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), imam masjid, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Hidangan makanan khas Pulau Natuna (Nasi Dagang) dan makanan lainnya juga sudah tersaji, mengundang selera makan kami.

Sebentar di aula, kami lalu berkunjung ke MTs Bakti Natuna. Setelah shalat dzuhur berjamaah dan makan, saatnya kami menuju tujuan utama, meninjau kantor KUA Pulau Tiga. Awalnya kami menduga kalau lokasinya sudah dekat. Ternyata salah! Gedung KUA berada di pulau seberang dan kami harus kembali berlayar.

Penghulu antar Pulau

Jam menunjukkan pukul 13.00 WIB, saat pompong kembali melaju. Meski lelah mulai mendera, namun semangat untuk menengok KUA Pulau Tiga, di pulau Sabang Mawang, tetap kami jaga. Perjalanan ke sana ditempuh sekira 20 menit hingga kami tiba di dermaga.

Sudah sampai? Belum. Perjalanan selanjutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak tanah kuning yang berbelok dan menanjak. Jika musim hujan, bisa dipastikan jalanan ini becek bak "sambal kacang". Meski gedungnya sudah nampak saat masih menyebrang lautan, namun nyatanya tetap butuh energi lebih untuk sampai kelokasi. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di KUA Kecamatan PulauTiga.

Secara geografis, Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari tiga pulau besar, yaitu: Tanjung Kumbik, Sabang Mawang Barat, danSededap. Pulau Tanjung Kumbik, terdiri dari 4 desa, yaitu: Pulau Tiga, Tanjung Kumbik Utara, Setumuk, dan Selading. Pulau Sabang Mawang, juga terbagi menjadi 4 desa, yaitu: Sabang Mawang, Sabang Mawang Barat, Tanjung Batang, dan Serantas. Sedangkan Pulau Sededap terdiri dari 2 desa, yaitu: Sededap dan Teluk Labuh.

Kantor KUA Kec. Pulau Tiga berlokasi di Desa Sabang Mawang. Adapun cakupan wilayah tugas penghulunya meliputi ketiga pulau yang ada. Terbayang, medan pengabdian yang tentu tidak ringan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

"Kami harus mengunjungi ketiga pulau itu untuk melakukan pembinaan dan pelayanan bidang pernikahan kepada masyarakat. Kami selalusiapmenyapa mereka, meski harus menembus gelapnya malam dengan kapal kecil (pompong), sendirian jika tenaga honorer berhalangan. Belum lagi jika cuaca kurang bersahabat," kisah Ayaturrahman dengan suara memberat.

Ungkapan Ayaturrahman menggambarkan beratnya wilayah tugas penghulu di pulau terluar. Luasnya lautan dan jauhnya jarak antar pulau menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah dijalani, apalagi harus terpisah dari anak dan isteri.

"Saya tinggal di pulau seberang itu (Tanjung Kumbik), menumpang di rumah saudara. Ditempuh dengan menggunakan pompong sekitar 20 menit dari sini (Sabang Mawang Barat). Sementara rumah tinggal saya jauh pak, di balik pulau itu (Sededap) yang harus ditempuh sekitar 1,5 jam perjalanan air. Kami tidak mampu membeli BBM jika harus menggunakan pompong ke sana setiap hari karena akan menghabiskan BBM 10 liter PP dengan biaya Rp 70 ribu. Jika dikalkulasi selama sebulan hampir 1,5 juta. Habis lah gaji saya nanti lah pak,"guraunya.

Menurut Ayaturrahman, penduduk Kecamatan Pulau Tiga berjumlah 5.236 jiwa. Peristiwa nikahnya pun tidak banyak, sekitar 3 atau 4 peristiwa nikah

per bulan atau 35 - 40 peristiwa nikah per tahun. Prosentase pernikahan di KUA sebanding dengan pernikahan di luar KUA. Pernikahan di luar kantor, rata-rata dilakukan pada hari kerja,meski ada juga yang di hari libur, Sabtu atau Minggu. Jika begitu, Ayaturrahman berarti tidak sempat pulang, bertemu anak-istri di rumah."Tarif layanan nikah sesuai ketentuan. Di kantor gratis, luar kantor bayar 600 ribu, dan disetorkan langsung ke bank," jelasnya.

Lokasi gedung KUA yang berada di Pulau Sabang Mawang terbilang cukup jauh dari tempat tinggal warga. Selain gedung KUA, di sana juga ada bangunan Puskesmas, namun sudah tidak lagi digunakan. Karena jauh dari warga, lokasi KUA ini seperti berada di pulau tak berpenghuni. Kami bisa merasakan betapa KUA bak di tengah hutan dengan fasilitas serba terbatas. Untuk sekedar makan minum selama di kantor saja, misalnya, para pegawai harus memasak sendiri. Ada dapur khusus di belakang kantor. Tidak ada warung penjual makanan di sekitar kantor, apalagi mini market.

Setiap hari para pegawai harus menempuh lautan, karena mereka tinggal di pulau lain. Masyarakat yang memerlukan layanan KUA juga tinggal di pulau yang berbeda.Terbayang beratnya tugas layanan yang harus dijalani, terlebih saat KUA ini belum memiliki pompong. Jadwal mereka berkantor terpaksa harus disesuaikan dengan jadwal transportasi yang lewat.

"Sebelum memiliki pompong yang dibeli Bimas Islam tahun 2015, keberangkatan kami ke kantor menyesuaikan jadwal pompong ojek milik warga, berangkat jam 8.30 dan pulang jam 14.00. Jadi kami dulu tidak bisa berada di kantor sejak jam 7.30 sampai 16.00 karena kondisi. Sebenarnya sih dulu bisa saja menyewa, namun anggaran sewa waktu itu tidak cukup. Terpaksalah kami menyesuaikan jadwal yang ada,"urainya.

Kini, KUA Pulau Tiga sudah memiliki kapal kecil aset BMN. Keberadaannya sedikit memberikan kemudahan dalam bertugas. Apalagi, meski berada di pulau terluar, layanan Kantor KUA Pulau Tiga juga sudah menggunakan perangkat modern. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) secara online sudah digunakan, dengan printer Passbook untuk print-out buku nikah dan akta NB.

Tokoh Agama

Selain mencatat peristiwa pernikahan warga, Sang Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA ini juga harus membina umat melalui penyuluhan, bimbingan, sekaligus menjadi muballigh untuk menyampaikan pesan-pesan agama dari satu tempat ke tempat lainnya, khususnya pada moment hari-hari besar Islam. Ayaturrahman mengaku, SDM di KUA sangat terbatas, khususnya penyuluh agama yang memiliki kualitas cukup dalam menyampaikan pesan-pesan agama.

"Kepala KUA di sini oleh masyarakat diangap sebagai tokoh agama. Penghormatan mereka kepada kami sangat tinggi. Makanya sikit-sikit, Pak KUA. Sementara saya hanya sendiri. Kami hampir setiap malam, habis maghrib atau isya memberikan ceramah agama dari masjid ke masjid atau mushalla dan Majelis Taklim di pulau saya tinggal (Tanjung Kumbik)," kisahnya.

Bagaimana pembinaan di pulau Sabang Mawang Barat dan Sedadap? Ayaturrahman mengaku punya program khusus berkunjung kedua pulau lainnya. Dia melakukan muhibbah ke masjid-masjid desa seminggu sekali. "Jika muhibbah dilaksanakan di masjid A, misalnya, maka perwakilan jamaah masjid yang lain ada perwakilannya yang hadir. Setidaknya kami harus mengunjungi ke pulau-pulau itu seminggu sekali, di luar tugas rutin ceramah setiap malam di tempat saya tinggal,"tegasnya.

"Di sini kami kekurangan penyuluh agama. Kami sangat membutuhkan penyuluh agama yang memiliki kapasitas. Kirimkan kepada kami lulusan pesantren, dimana mereka mengerti betul dasar-dasar agama untuk membina masyarakat," harapnya.

Ayaturrahman mengaku sulit mengkader anak-anak muda Pulau Tiga untuk menjadi penyuluh agama, karena rata-rata hanya lulusan aliyah. Ada yang alumni Perguruan Tinggi Islam, namun sebelumnya tidak belajar di pesantren, serta tidak memiliki kemampuan ceramah dan menjadi penyuluh agama. Sementara penyuluh agama honorer yang ada hampir semuanya guru ngaji di kampung yang sudah tuasehingga penyuluhannya terbatas,"tambahnya.

Harapan Kepala KUA Pulau Tiga tersebut memang betul adanya. Terbukti, saat kami datang di Kepulauan Natuna, masyarakat setempat meminta kami menyampaikan ceramah di beberapa tempat, baik masjid maupun Majelis Taklim. Semangat keagamaan masyarakat Natuna terbilang bagu, khas masyarakat Melayu, karenanya kehadiran para dai yang memiliki kapasitas cukup sangat dibutuhkan. Terlebih mereka sekarang juga harus berhadapan dengan tantangan masalah sosial yang semakin berat, seperti ancaman narkoba, dan lainnya.

Demikian sekilas catatan tentang beratnya tugas dan tangung jawab abdi negara di pulau-pulau terluar atau perbatasan sehingga memerlukan perhatian lebih dari pengambil kebijakan. Semoga jerih payah mereka dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Thobib Al-Asyhar

Kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia bukan lagi sebuah mimpi. Berawal dari doa yang dipanjatkannya di pojok Masjid Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Waskito Jati kini mewujudkan mimpinya. Ia diterima di program Master of Theological Studies (MTS) di Harvard Divinity School dengan jurusan Islamic Studies. Alumnus MA Ali Maksum Krapyak, Bantul ini mampu menumbangkan stigma negatif yang sejauh ini masih dipercaya sebagian masyarakat.

Tujuh tahun yang lalu, setelah membaca doa witir di pojok Masjid al-Munawwir di Pondok Pesantren Krapyak, Waskito melangitkan harapan agar diberi kesempatan kuliah di universitas terbaik di dunia. Awalnya, ia berpikir doa tersebut agak berlebihan. Namun, dia tidak patah arang. Man jadda wa jada, pesan Kyainya itu menjadi pelecut baginya untuk mencapai mimpi: Belajar di Universitas Terbaik di Dunia.

Waskito mengaku, belajar di MA Ali Maksum berkontribusi besar bagi keberhasilannya. Sadar bahwa kemampuan bahasa asing menjadi syarat mutlak belajar di luar negeri, ia pun bergabung dalam pelatihan debat Bahasa Inggris di pesantrennya yang dibimbing Ali al-Hussein. "Pak Ali melatih saya dan tim setiap hari, ba'da Isya' dan seusai mengaji sorogan hingga tengah malam tanpa diberikan bayaran tambahan sama sekali," kenangnya saat ditemui kontributor IB di Yogyakarta baru-baru ini.

Hasil latihan rutin tersebut mengantarkan Waskito dan timnya menjadi juara satu pada lomba debat Bahasa Inggris se-DIY di tahun 2008. Saat itu, MA Ali Maksum bahkan mengalahkan banyak SMA favorit lainnya di Yogyakarta. Dengan bekal kemampuan Bahasa Inggris itu juga Waskito berhasil mengikuti program pertukaran pelajar, ketika di Aliyah.

Lulus Aliyah, Waskito ingin kuliah. Karena keterbatasan biaya, maka pilihan utamanya tentu adalah jalur beasiswa. Saat itu, dia mendaftar Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dan beasiswa dari Universitas Paramadina. Sayang, keduanya gagal. Lalu dia mendaftar dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan maksud nantinya dapat mendaftar beasiswa pesantren yang disediakan oleh UII. Namun dia harus melakukan proses registrasi dahulu dan membayar Rp 8 juta sebelum bisa mengikuti seleksinya. Uang segitu tentu tidak dimilikinya hingga dia mengurungkan niatnya kuliah di sana.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian dirasa Waskito menjadi pilihan tepat baginya karena biaya kuliahnya lebih terjangkau. Mengambil jurusan Jinayah Siyasah di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Waskito menjalani kuliah dengan serius. Hal ini ditunjukan dengan komitmennya untuk duduk selalu di depan dosen, aktif dalam riset dan organisasi, dan melestarikan Indeks Prestasi selalu di atas 3,8.

WASKITO JATI

ALUMNI MADRASAH PERAIH BEASISWA
DI HARVARD UNIVERSITY

MELANGITKAN HARAPAN

Selain kuliah, Waskito juga aktif dalam organisasi luar kampus. Selama tahun 2010-2014, ia menjadi *volunteer* pada Bina Antar budaya, sebuah organisasi yang pernah mengirimnya dalam program pertukaran pelajar ke Amerika. Awalnya sebagai *volunteer* biasa, akhirnya Waskito diangkat menjadi Vice President untuk chapter Yogyakarta. Ia juga didaulat sebagai Presiden asosiasi alumni program pertukaan pelajar yang bernama IYAA.

Selama memimpin organisasi ini, dia membuat proyek yang berskala nasional seperti pengumpulan buku di 15 kota di Indonesia, donor darah massal, hingga hari mengajar nasional. Bersama dengan organisasi ini, Waskito seringkali diundang untuk mengikuti training dan rapat di luar negeri mulai dari Filipina, hingga Yordania dan Ghana.

Waskito lulus S1 di UIN Sunan Kalijaga dengan Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi, meski tidak yang tercepat. Setelah lulus ia langsung mendapatkan perkerjaan di kantor Australian National University di Yogya selama beberapa bulan. Waktu itu, ia sudah mulai berpikir untuk mendaftar beasiswa S2. Sebagai persiapan awal, Waskito mengikuti test IELTS dan meraih nilai Band 7.5. Berbekal IELTS tersebut, ia mencoba mendaftar beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), dan sayangnya belum berhasil.

Waskito tidak menyerah. Berbekal band IELTS 7.5, dia mendaftar ke University of Chicago dan Harvard University. Selain IELTS, kampus Amerika ternyata juga mensyaratkan test GRE (Graduate Record Examination). Alasan biaya les GRE yang sangat mahal memaksa Waskito untuk belajar sendiri. Selama persiapan lima bulan, ia harus menghafalkan sekitar 25 kosakata Bahasa Inggris setiap hari. Ia juga harus menulis dua esai per hari. Hasilnya, sampai akhir persiapan belajar, dia telah menghafalkan kira-kira 1.800 kosakata dan menulis kurang lebih 80 esai.

Berangkatlah ia ke Surabaya untuk mengikuti tes GRE. Hasilnya cukup memuaskan, walaupun nilai *writing* masih di bawah standar rata-rata Universitas Chicago dan Harvard. Namun ia beranikan diri untuk mendaftar ke kedua universitas unggulan di Amerika itu: Chicago dan Harvard.

Usahanya tidak sia-sia. Awal Maret 2016, dia mendapatkan email, bahwa ia diterima di University of Chicago dan juga ditawarkan beasiswa yang akan menutupi 50% dari biaya pendidikan. Ia sangat bahagia mendapatkan kabar ini. Satu minggu kemudian, ada email masuk dari Harvard University. "Congratulation!" demikian tulisan di awal surat itu menandai Waskito diterima di Harvard University.

Harvard University juga membebaskan dari biaya kuliah dan memberi sedikit uang saku. Awalnya dia sungguh tidak percaya bahwa Harvard benar-benar ingin agar dia bergabung dengan institusi mereka. Dalam email itu juga dilampirkan sebuah link video yang berisi pesan selamat atas diterimanya Waskito di Harvard University. Barulah disana dia sadar bahwa ini semua adalah kenyataan.

Inmas Yogya, Hamam

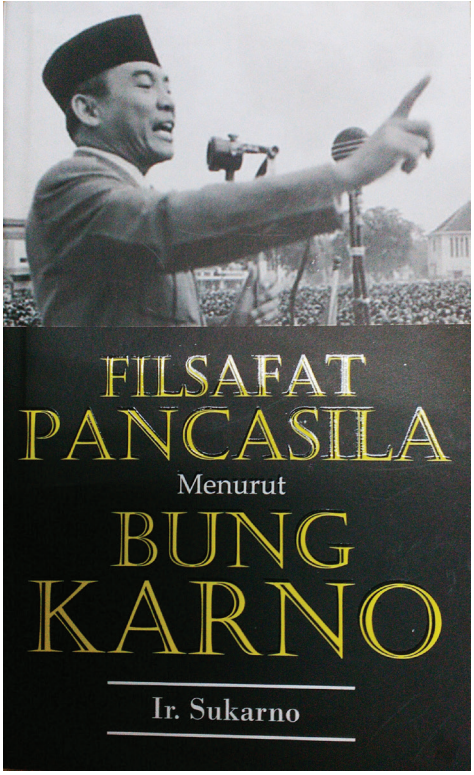

Memahami Falsafah Negara dan Bangsa

Judul : Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno
Penulis : Ir. Sukarno
Penyunting : Floriberta Aning
Penerbit : Media Pressindo
Cetakan : I, Februari 2016
Tebal : 364 halaman

Gaung revolusi mental sejak satu tahun terakhir didengungkan oleh pemerintah nampaknya mendapatkan apresiasi positif yang cukup tinggi. Namun, disatu sisi masih banyak kalangan yang nyinyir terhadap kekuatan revolusi mental yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila itu. Pelbagai permasalahan kronis yang secara bertubi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk neo-liberal yang ekstrem dan gerakan radikal bernuansa agama, menjadi kekuatan untuk terus menusuk dan membajak pilar-pilar bangsa, termasuk Pancasila.

Akibatnya, Pancasila kembali menjadi persolan akut.Masih ada gerakan manifesto yang berusaha menghapus kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.Dalam konteks demikian, buku ini hadir mewartakan mutiara-mutiara pemikiran brilian pemimpin bangsa mengenai Pancasila. Dalam buku ini, filsafat pancasila menjadi kekuatan imajiner formasi diskursif perumusan nilai-nilai negara sebagai dasar ideologis negara Republik Indonesia.

Memoar, imajinasi, dan bayang-bayang mengenai sebuah tatanan politik negara-bangsa, dihadirkan kembali dalam konteks kebangkitan nalar dan pola perjuangan bangsa untuk mencapai titik yang diinginkan *founding fathers* negara ini. Maka, buku ini hadir secara jernih dengan usaha yang matang hendak mendokomentasi kembali ingatan pelbagai ide dan gagasan jernih mengenai negara Republik Indonesia.

Denyut nadi siapapun yang membaca buku ini akan bangkit terhentak oleh laku pemikiran dan perjuangan Bung Karno. Apa yang disampaikan Bung Karno puluhan tahun yang lalu seakan menggiring deru bangsa ini dalam sebuah kerangka ideologis bagi suatu tatanan-politik aktual yang sengaja ia buat untuk menjadi panduan bagi perwujudan cita-cita bangsa.

Saat Bung Karno menyampaikan pidato pada waktu menerima gelar doktor honoris causa sebagai penggali Pancasila dari Universitas Gajah Madja (UGM), ia menyampaikan bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah mewujudkan perbuatan. Tugas pemimpin bukan hanyut dalam perenungan teoritis, melainkan perjuangan nyata untuk bangsa dan negara. Karena itu, Bung Karno selalu menyampaikan bahwa tugas pemimpin adalah mendorong kemauan manusia Indonesia dan kemauan nasional Indonesia, hingga pada akhirnya sampai pada puncak yang setinggi-tingginya. Menurut Bung Karno, kemauan nasional adalah wahyu cakraningrat; sebuah revolusi untuk mengantarkan bangsa dalam penjelmaan laku dan perjuangan nasional.

Bung Karno dalam pidatonya berjudul di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1960 mulai mengenalkan pancasila di tingkat dunia. Tidak heran, jika filsuf Inggris Betrand Russel takjub dan menjuluki Soekarno sebagai *great thinker in the east*. Sementara seorang ahli sejarah, JF Rutgers mengatakan bahwa dari semua negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya pertama-tama melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya.

Para tokoh dan intelektual dunia mengakui bahwa Bung Karno mampu menempatkan ideologi pancasila dalam setiap benak bangsa Indonesia. Saat pancasila kali pertama resmi dijadikan sebagai falsafah negara, maka nilai-nilai yang terkandung didalamnya tergurat pada jiwa bangsa Indonesia.

Yang menarik, dari pelbagai pidato Bung Karno yang ada dalam buku ini, ia justru mengakui dengan sadar bahwa ternyata masih banyak bangsa Indonesia yang bermental imprealistis. Imprealistis karena kepribadiannya masih haus dengan kekuasaan. Laku perjuangannya masih diselimuti materi, dan poros langkahnya senantiasa di bumbui pragmatisme.

Terlepas dari itu, buku anggitan bahasa Bung Karno dalam setiap pidatonya ini mampu menghantarkan bangsa Indonesia hanyut dalam pekikan kemerdekaan yang menghujam kemauan untuk bertindak dalam setiap aksi nyata. Bung Karno mengatakan bahwa ia hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia setelah terpendam 350 tahun lamanya. Struktur lima prinsip dalam Pancasila yang sifatnya komplementer ditatar oleh Bung Karno dalam setiap nadi bangsa Indonesia. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi pijakan awal sebagai pengikat pelbagai gagasan dalam menginisiasi Indonesia merdeka. Bung Karno mendudukkan dasar negara dalam kerangka dasar falsafah yang komplementer dan egaliter.

Buku ini begitu kuat untuk menghadirkan memoar dari totalitas perjuangan Bung Karno dalam usaha menggaungkan Indonesia merdeka dari keterjeratan masa lalu, kini, dan masa depan. Setidaknya, buku ini menjadi refrensi otentik dari sistematika Pancasila yang dalam setiap baitnya mengandung pesan kuat tentang Indonesia dalam altar percaturan falsafah negara dan bangsa.

Wildan Hefni

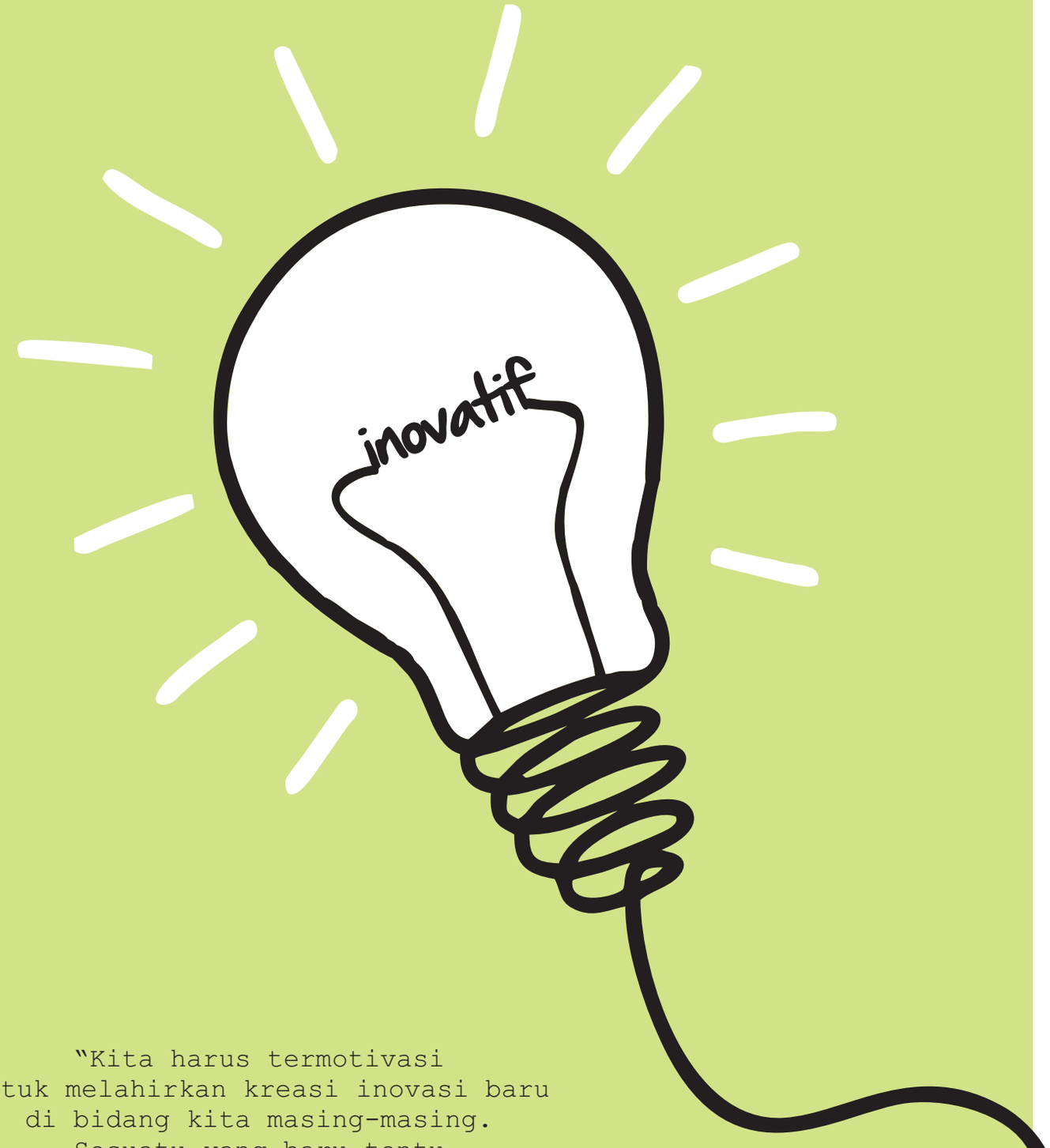

"Kita harus termotivasi
untuk melahirkan kreasi inovasi baru
di bidang kita masing-masing.
Sesuatu yang baru tentu
membawa manfaat yang lebih banyak,
sesuai dengan konteks situasi
dan kondisi kita,"

Menag
Lukman Hakim Saifuddin

"BERSAMA DAMAI DALAM HARMONI"

(Joko Widodo)

CORETAN JOKOWI DI DINDING FACEBOOK | FOTO: DETIK.COM